

**KOMUNIKASI BENCANA DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA BANJIR DI KAWASAN PLTA KOTO PANJANG, KAMPAR,
RIAU**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh :

Pipit Barato Vanezsa

14321169

**PRODI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2018

SKRIPSI
KOMUNIKASI BENCANA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
BANJIR DI KAWASAN PLTA KOTO PANJANG, KAMPAR, RIAU

Disusun Oleh
PIPIT BARATO VANEZSA
14321169

Telah di setujui oleh dosen pembimbing skripsi untuk disajikan dan dipertahankan
di hadapan tim penguji skripsi

Tanggal:



Dosen Pembimbing Skripsi



Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA

NIDN: 0516087901

SKRIPSI
KOMUNIKASI BENCANA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
BANJIR DI KAWASAN PLTA KOTO PANJANG, KAMPAR, RIAU

Disusun Oleh
Pipit Barato Vanezza
14321169

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Tanggal:

09 JUN 2018

Dosen Penguji :

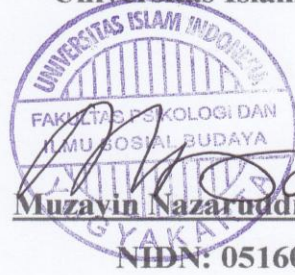
1. Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA
NIDN. 0516087901
2. Mutia Dewi, S.Sos., M.I.Kom
NIDN. 0520028302



Muzayin
.....
Mutia Dewi
.....

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA
NIDN: 0516087901

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Pipit Barato Vanezsa

No. Mahasiswa : 14321169

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Judul Skripsi : Komunikasi Bencana dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kawasan PLTA Koto Panjang, Kampar, Riau.

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan berlaku di Universitas Islam Indonesia
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 2 Mei 2018



Yang menyatakan

(Pipit Barato Vanezsa)

NIM 14321169

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur pada Zat yang Maka Kuasa

Allah Subhanahu wa taala

Atas segala rahmat, hidayah, nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Sholawat dan salam selalu mengiringi kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga, sahabat dan para kerabat lainnya.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Ayah dan Bunda tercinta

Bapak Yanizar dan Ibu Yulinda

Atas cinta dan kasih sayang, dukungan, baik materi maupun moril dalam bentuk apapun. Mereka adalah orang tua yang hebat yang telah membesarkan dan mendidiknya dengan pengertian dan penuh kasih sayang.

Selain itu juga terima kasih penulis sampaikan untuk

Saudari ku tersayang Andien Tiara Alifa

Selain itu juga teruntuk keluarga besarku dan kerabat juga teman lainnya yang selalu mengiringi doa dan selamat untuk kelancaran skripsi.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
[al-Baqarah/2:286].*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, puji dan syukur atas segala rahmat, hidayah, dan taufiq yang telah dilimpahkan sehingga skripsi dengan judul “Komunikasi Bencana dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kawasan PLTA Koto Panjang, Kampar, Riau” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam juga tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah berjuang dan berdedikasi tinggi membawa seluruh umat Muslim menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Skripsi ini penulis selesaikan sebagai persyaratan untuk memenuhi gelar Sarjana Strata Satu dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Disamping itu, ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya juga tidak lupa penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang bersedia memberi dukungan baik dari segi material maupun non material. Adapun ucapan terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan seluruh rahmat dan hidayah-Nya serta restu yang tiada hentinya hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Ayah Yanizar dan Bunda Yulinda, support system nomor satu yang dengan ikhlas selalu mendoakan agar semua urusan dilancarkan.
3. Andien Tiara Alifa, adik kandung saya yang selalu mendukung dan menghibur dan Dede Riswal, abang sepupu yang selalu ada untuk mendukung pengerjaan skripsi ini.
4. Bapak Muzayin Nazaruddin, S.Sos., M.A selaku Kepala Prodi Ilmu Komunikasi dan juga Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam membimbing hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Kepada semua narasumber yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan selama penelitian.
6. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan menghibur: Fakhriza Amalia, Retno Puji, Geni Yustikarini, Lira Maharani, Silvrillia, Ulfa Indra Yuni, Dwi Prasetyo, Arwin Ausatria, Agung Pratomo, Dhera Yudika, Bayu Hadi, Ryandi Ciputra, Erick Anderson, dan Rony Tondy.

7. Sahabat Bucil: Khalfiah Zahara, Shelsi Novisa, Risa Aglina, Yusuf Satrio, Andre Siahaan, Dimas Tri.
8. Sahabat-sahabat di Jogja yang selalu mendukung: Anisa Chandra, Arini Lisyawati, Mulia Kharis, Ridho Afwan, Syanthia Wingy, Putri Khaira, Ratih Gayatri, Nadra Alfiaty dan Dina Rizka.
9. Muzayin Squad yang selalu membantu dan mendukung: Sunnora Meilisa, Nadilla Anindita, Sanik Ismata, Prita, Ken Swari, Andara Okta.
10. Teman-teman KKN Unit 226 Guyangan: Adelia Dwiyani, Illah Rahmawati, Dian Maris, Cantika, Ifan Hidayat, Ayik Zaki, Salaman Firdaus dan Rizki Kridho.
11. Keluarga Komunikasi 2014, yang sudah berjuang bersama selama ini.
12. Serta seluruh pihak yang sangat membantu selama proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai.

Semoga segala bantuan yang kalian berikan kepada penulis dapat menjadi pahala dan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga memohon maaf apabila terdapat kekhilafan dan kesalahan dalam skripsi ini, karena penulis hanyalah manusia biasa dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Akhir kata, peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Wabillahi taufik walhidayah Wassalamualaikum Wr, Wb.

Yogyakarta, 30 April 2018

Penulis

Pipit Barato Vaneza

14321169

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori	12
1. Bencana dan Penanggulangan Bencana	12
2. Komunikasi Bencana	15
3. Pola Komunikasi	17
G. Metode Penelitian	21
BAB II.....	26
DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN	26
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN BANJIR KAMPAR.....	26
B. BPBD KABUPATEN KAMPAR.....	29
BAB III.....	36
TEMUAN PENELITIAN.....	36
A. Komunikasi Pra Bencana	37
1. Mitigasi Bencana	38
a. Desa Tangguh Bencana (Destana)	38
2. Piket Siaga	51
B. Komunikasi saat bencana.....	55
a. Pemberian Informasi & Koordinasi	55
2. Kedaruratan dan Logistik	69

3.	Respon dan Perilaku Warga	74
4.	Hambatan-hambatan dalam Komunikasi Tanggap Darurat Bencana.....	78
C.	Komunikasi Pasca Bencana	81
1.	Pendataan Kerugian dan Kerusakan	81
2.	Rekonstruksi dan Rehabilitasi	84
BAB IV.....		87
PEMBAHASAN		87
A.	Pola Komunikasi Menggunakan Struktur Rantai dan Struktur Roda Pada Masa Pra Bencana.....	87
B.	Pola Komunikasi Menggunakan Struktur Roda dan Struktur Y Pada Masa Tanggap Darurat Bencana.....	93
C.	Pola Komunikasi Menggunakan Struktur Rantai Pada Masa Pasca bencana	99
D.	Analisis SWOT	100
1.	Masa pra bencana.....	100
2.	Masa tanggap darurat.....	101
3.	Masa pasca bencana	102
4.	Analisis umum dan usulan	103
BAB V.....		106
PENUTUP		106
A.	Kesimpulan.....	106
B.	Keterbatasan Penelitian.....	112
C.	Saran	112
Daftar Pustaka.....		113
Buku		113
Undang-Undang		114
Internet		114

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama dan Instansi Informan.....	34
Tabel 3.2 Nama dan Asal Informan	35
Tabel 3.3 Alur Komunikasi Masa Normal	48
Tabel 3.4 Alur Komunikasi Masa Tanggap Darurat.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta kabupaten Kampar.....	24
Gambar 3.2 Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Kampar.....	30

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Model Komunikasi Bencana Masa Normal.....	50
Bagan 3.2 Bagan Komunikasi Bencana Masa Tanggap Darurat	69
Bagan 4.1 Pola Komunikasi Rantai dalam Menyampaikan Informasi Pra Bencana.....	85
Bagan 4.2 Pola Komunikas Roda dalam melakukan Program Destana	87
Bagan 4.3 Pola Komunikasi Roda dalam Penyebaran Informasi Kebencanaan.....	91
Bagan 4.4 Pola Komunikasi Y dalam menjalankan Komando.....	93
Bagan 4.5 Pola Komunikasi Rantai Masa Pasca Bencana.....	68

ABSTRAK

14321169

Pipit Barato Vanezsa. 14321169. Komunikasi Bencana Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kawasan PLTA Koto Panjang, Kampar, Riau. Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. 2018.

Pada saat terjadi bencana, koordinasi dalam melakukan komunikasi merupakan sebuah hal yang dianggap penting, karena pada saat bencana terjadi terdapat banyak sekali tuntutan dari masyarakat kepada lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam menangani bencana secara cepat dan tepat. Penelitian ini berfokus pada komunikasi bencana secara menyeluruh yang dilakukan oleh instansi-instansi yang bergerak dibidang kebencanaan dan masyarakat sekitar kawasan bencana, mulai dari pra, saat, hingga pasca bencana banjir di kawasan PLTA Koto Panjang, Kabupaten Kampar.

Berdasarkan kerangka pikir diatas, penelitian ini hendak menjawab pola komunikasi bencana pihak-pihak terkait dalam penanggulangan bencana banjir dan faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan komunikasi bencana. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam semiterstruktur dan dokumentasi. Dalam penelitian ini terdapat 2 kategori narasumber yaitu, pemerintah dan masyarakat.

Dalam melakukan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Kampar, BPBD melakukan dua program yaitu desa tangguh bencana (DESTANA) yang sudah dijalankan di dua desa yaitu, Desa Mentulik pada tahun 2016 dan Desa Buluh Cina pada tahun 2017, serta program piket siaga. Saat tanggap darurat terdapat tahap pemberian informasi serta kedaruratan dan logistik. Pada pasca bencana terdapat tahap pendataan kerugian dan kerusakan dan rekonstruksi dan rehabilitasi.

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pada masa prabencana pola komunikasi yang digunakan yaitu pola rantai dan roda, masa tanggap darurat menggunakan pola Y dan roda, masa pascabencana menggunakan pola rantai. Dalam menyampaikan informasi, pemerintah menggunakan berbagai medium dalam menyebarkan informasi kebencanaan, media yang paling dominan digunakan yaitu *WhatsApp*. Alur yang terdapat dalam melakukan komunikasi secara struktural dan non-struktural. Faktor pendukung saat melakukan tanggap darurat bencana yaitu banyaknya stakeholder. Sedangkan faktor penghambat saat melakukan tanggap darurat bencana terbagi menjadi dua yaitu, kendala internal dan kendala eksternal.

Kata Kunci: Komunikasi bencana, Pola Komunikasi, Banjir

ABSTRACT

14321169

Pipit Barato Vaneza. 14321169. Disaster Communications In Flood Disaster Management in Koto Panjang Hydroelectric Region, Kampar, Riau. Bachelor Thesis. Communication Studies Program, Faculty of Psychology and Socio-Cultural Studies, Islamic University of Indonesia. 2018.

In the event of a disaster, coordination of communication is an important thing, because at the time of the disaster there are many demands from the public to government agencies responsible for dealing with disasters quickly and appropriately. This study focuses on overall disaster communications conducted by agencies engaged in disaster and surrounding communities in disaster areas, ranging from the pre, during, until after the floods in Koto Panjang Hydroelectric district, Kampar.

Based on the above framework, this study was about to answer disaster communication patterns related parties in flood disaster management and supporting factors and obstacles in conducting disaster communications. The method used in this research is qualitative research with case study approach, and collection of data through observation, in-depth semi-structured interviews and documentation. In this study, there are two categories of speakers, namely, government and society.

To mitigate flooding in Kampar, BPBDs perform two programs: disaster resilient village (DESTANA) was run in two villages namely, Village Mentulik in 2016 and Desa Buluh China in 2017, as well as standby picket program. Currently there are emergency response and emergency information provision and logistics. In the aftermath there is a data collection phase loss and damage and the reconstruction and rehabilitation.

This study get the result that at the time of communication used Predisaster pattern is a pattern of chains and wheels, the emergency response using Y pattern and wheels, the post-disaster period using chain patterns. In presenting the information, the government uses a variety of mediums to disseminate disaster information, the most dominant medium used is WhatsApp. Grooves contained in the communication structural and non-structural. The supporting factors when making emergency response which is the number of stakeholders. While the inhibiting factors when making emergency response is divided into two, namely, internal constraints and external constraints.

Keywords: disaster Communication, Communication Patterns, Flood

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata bencana sudah tidak asing lagi didengar di telinga masyarakat Indonesia. Banyak sekali bencana yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya secara tidak diduga. Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 pasal 1 tentang penanggulangan bencana, telah dikemukakan bahwa “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”. Terdapat tiga jenis bencana dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 yaitu, bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam merupakan kejadian atau peristiwa yang berasal dari alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Bencana non alam merupakan kejadian atau peristiwa yang meliputi kegagalan teknologi, semisal wabah penyakit. Bencana sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang dibut atau berasal dari masyarakat itu sendiri, seperti teror dan konflik antarkelompok.

Pada saat terjadi bencana, koordinasi dalam melakukan komunikasi merupakan sebuah hal yang penting, karena pada saat bencana terjadi terdapat banyak sekali tuntutan dari masyarakat kepada lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam menangani bencana secara cepat dan tepat. Selain itu, pada saat terjadi bencana tidak sedikit pula lembaga swasta atau komunitas-komunitas yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana muncul untuk membantu menangani permasalahan tersebut, sehingga tidak jarang pula komunikasi antar lembaga pemerintah dan swasta tidak terkoordinasi dengan baik dalam menanggulangi bencana tersebut. Kecepatan

informasi yang ingin didapat oleh masyarakat menjadi tugas yang harus dikerjakan dengan baik pula oleh lembaga pemerintah, agar informasi yang tersebar menjadi tidak simpang siur dan memiliki kepastian, sehingga dapat mengurangi informasi yang tidak jelas sumbernya. Chamsah (dalam Susanto, 2011: 14) mengatakan bahwa dalam implementasi penanggulangan bencana, pemerintah daerah harus menyusun *contingency plan* penanggulangan bencana, yang mencakup analisa daerah rawan bencana, identifikasi potensi dan sistem sumber yang dapat di mobilisasi, menentukan kebijakan serta langkah strategis jika terjadi bencana.

Banjir adalah bencana akibat curah hujan yang tinggi dengan tidak diimbangi dengan saluran pembuangan air yang memadai sehingga merendam wilayah-wilayah yang tidak dikehendaki oleh orang-orang yang ada di sana, banjir bisa juga terjadi karena jebolnya sistem aliran air yang ada sehingga daerah yang rendah terkena dampak kiriman banjir (Lestari dalam Susanto, 2011: 81).

Menurut analisa daily, bencana banjir di Indonesia sudah terjadi sebanyak 766 kejadian dengan presentase mencapai 52%, hal tersebut meningkat dari kejadian bencana banjir pada tahun 2015 (Analisa daily, <http://news.analisadaily.com/read/kejadian-banjir-meningkat-52-persen-di-2016/292422/2016/12/29>, akses 3 April 2018). Berdasarkan data statistik bencana BPBD Provinsi Riau, pada tahun 2016 terdapat 7 kejadian bencana banjir, dimana bencana banjir tersebut merupakan bencana yang paling sering terjadi di Provinsi Riau dibandingkan bencana lainnya. Bencana banjir terbesar di Provinsi Riau terdapat di daerah PLTA Koto Panjang Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Banjir bukan merupakan hal baru bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan waduk PLTA Koto Panjang, sebab masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan tersebut selalu terkena dampaknya setiap tahun secara berulang. Seperti yang dinyatakan oleh bu Fitri yang merupakan warga desa Buluh Cina yang mengatakan bahwa:

“Jadi ketika banjir, jika kita mau barang-barang selamat, jadi kita sendiri yang naikin barangnya. Karena sudah dari dulu terkena banjir jadi sudah mengerti sendiri apa yang mau diperbuat, tidak perlu menunggu kabar ini, tidak perlu harus seperti ini, sudah kesadaran masing-masing, makanya jika disuruh ngungsi tidak mau mengungsi, karena saat banjir itu ada sebagian yang senang ada juga yang sebagian tidak senang. Senangnya jika yang mencari ikan, makan ikannya banyak. Namun yang tidak senang seperti yang punya sayur-sayuran, yang punya tanaman dan kebun menjadi rusak”.

PLTA Koto Panjang merupakan sebuah perusahaan listrik tenaga air yang terdapat di daerah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Turbin PLTA ini digerakkan menggunakan air dari Sungai Kampar. Pada musim curah hujan meningkat, PLTA tidak jarang harus membuka penutup pintu air dikarenakan ketidakmampuannya menahan air.

Berdasar data pra riset yang didapat, banjir disebabkan oleh tidak mampunya pintu air membendung aliran air sungai Kampar setiap curah hujan meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh PLTA Koto Panjang adalah dengan mengimbau warga untuk mengungsi dan menyelamatkan beberapa barang berharga ke tempat yang lebih aman saat status sudah menunjukkan tingkat waspada, dan membuka pintu air yang kemudian dapat membuat kawasan di sekitar waduk PLTA Koto Panjang terendam banjir. Namun berdasarkan penuturan warga, pihak PLTA Koto Panjang pernah tidak memberi imbauan pada warga sehingga warga tidak memiliki persiapan.

Berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bu Fitri bahwa banjir bukan lagi merupakan sebuah bencana karena banjir di Kabupaten Kampar bujan merupakan suatu hal yang baru, pak Iwan yang merupakan Supervisor Operasi di PLTA Koto Panjang, mengatakan bahwa banjir yang terjadi pada awal tahun 2016 merupakan sebuah bencana, seperti dalam pernyataannya:

“Jadi plta itu mendatanya di inflow waduk, inflow waduk paling besar itu di 2016 awal. Jadi air yang dari hulu itu memang sangat-sangat besar, perjamnya itu bisa ribuan meter kubik/detik. Jadi satu jam itu kalau rata-rata sih 2500 meter kubik/detik, jadi kenaikan elevasi itu terlihat. Kita berdiri saja di dam itu maka kelihatan kenaikan air yang drastis padahal dam itu luas dan dalam. Kalau standarnya 268 atau diangka 300 meter kubik/detik, jadi kalau udah ribuan ya sudah diluar kehendak kita memang itulah air bah itu dan mau tidak mau harus di maintain. Kalau kita hanya diam menunggu, ya dam ini yang akan menjadi resikonya, ya itu resiko pekerjaan dan juga memang sudah termasuk kategori bencana alam”.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar (BPBD Kabupaten Kampar), merupakan lembaga pemerintah yang lebih dikhususkan menangani setiap permasalahan penanggulangan bencana yang terdapat di Kabupaten Kampar, salah satunya ialah bencana banjir tahunan yang melanda hampir seluruh daerah di Kabupaten Kampar.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang menjalankan beberapa tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam memberikan informasi mengenai perubahan iklim suatu daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, salah satu fungsi yang diselenggarakan BMKG, yakni penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan bencana karena faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika (BMKG Pekanbaru, <http://www.stametpekanbaru.com/>, akses 28 Maret 2017).

Berdasarkan kronologi pembangunan PLTA Koto Panjang, Putra melayu (<http://www.putramelayu.web.id/2013/05/kronologi-sejarah-danau-plta-koto.html> akses 11 Maret 2017), menjelaskan bahwa TEPSCO (Tokyo Electric Power Service

Co. Ltd) merupakan sebuah perusahaan konsultan yang berasal dari Jepang. TEPSCO memiliki peran besar pada proyek PLTA Koto Panjang ketika akan dibangun, karena pada saat PLN Provinsi Riau merencanakan pembangunan, TEPSCO mengirim tim pencarian proyeknya ke daerah Sumatera untuk melakukan survey. Proyek yang rencananya akan dibangun dalam skala kecil ini, berubah menjadi proyek berskala besar ketika TEPSCO telah melakukan survey berupa studi kelayakan, dan mempresentasikan hasil survey tersebut kepada pemerintah Jepang dan Indonesia. Hasil yang telah didapat oleh TEPSCO kemudian ditindaklanjuti untuk memastikan proyek tersebut layak atau tidak, Pemerintah Daerah Kampar Riau kemudian mengambil langkah cepat dalam mencatat seluruh harta benda masyarakat yang akan tenggelam dalam pembangunan berskala besar tersebut. Keputusan dalam membangun PLTA ini berdasarkan hasil studi kelayakan yang telah dilakukan oleh TEPSCO dalam kurun waktu 2 tahun 2 bulan.

Penelitian ini berfokus pada komunikasi bencana secara menyeluruh yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kampar dengan pihak-pihak terkait, diantaranya PLTA Koto Panjang, BMKG Pekanbaru dan masyarakat sekitar kawasan bencana, mulai dari pra bencana, saat terjadi bencana, hingga pasca bencana banjir di kawasan PLTA Koto Panjang, Kabupaten Kampar.

Signifikasi membahas komunikasi bencana secara menyeluruh adalah dalam mengatasi penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan pada saat terjadi bencana saja, tetapi memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat dan mengetahui bagaimana karakteristik bencana menjadi hal yang juga dianggap penting yang harus diperhatikan, agar setiap elemen baik bagi lembaga pemerintah, non pemerintah serta masyarakat disekitar kawasan bencana banjir, agar dapat mengantisipasi dan mempersiapkan diri terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, sehingga kemungkinan terdapatnya korban jiwa semakin berkurang. Selain itu, pentingnya membahas komunikasi bencana adalah pada saat terjadi bencana maka akan banyak pihak yang terkait dalam penanggulangan bencana, baik

dari lembaga pemerintah, non pemerintah, relawan, maupun dari masyarakat sekitar kawasan bencana banjir yang turut membantu.

Komunikasi pada saat terjadi bencana menjadi elemen utama yang penting untuk diperhatikan, karena jika komunikasi tidak dilakukan dengan baik, maka penanggulangan terhadap bencana yang akan dilakukan tidak akan berjalan dengan efektif.

Terdapat 4 aspek dalam melakukan koordinasi, yaitu manajemen penanggulangan bencana yang baik; adanya tujuan, peran dan tanggungjawab yang jelas dari organisasi; sumberdaya dan waktu yang akan membuat koordinasi berjalan; dan jalannya koordinasi berdasarkan pertukaran informasi dari berbagai sumber informasi yang berbeda (Lestari, dalam Susanto, 2011: 88).

Selain itu, pentingnya memperhatikan koordinasi komunikasi pada saat bencana terjadi adalah untuk tercapainya tujuan bersama, yaitu mampu menanggulangi bencana dengan efektif dan baik. Dalam sebuah penanggulangan bencana, akan terdapat seseorang yang ditunjuk sebagai penanggungjawab, seperti yang terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana, Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atas usul Kepala BNPB/BPBD untuk melaksanakan fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana (Undang-Undang Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana). Maka pentingnya koordinasi komunikasi dalam penanggulangan bencana adalah untuk melihat bagaimana kesiapan dari pihak-pihak terkait dalam menanggulangi bencana tersebut.

Maka penelitian ini akan membahas komunikasi antara BPBD Kabupaten Kampar dengan berbagai pihak yang terkait pada saat penanggulangan bencana banjir. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa pihak yang terkait dalam mengatasi penanggulangan bencana banjir tersebut, yaitu BPBD Kabupaten Kampar, PLTA

Koto Panjang, BMKG Stasiun Pekanbaru, serta masyarakat sekitar kawasan bencana banjir.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi bencana pihak-pihak terkait dalam penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Kampar, Riau?
2. Bagaimana pola yang terbentuk dari komunikasi bencana tersebut?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan komunikasi bencana tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana pola komunikasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kampar dan berbagai pihak terkait lainnya dalam menanggulangi bencana banjir yang terdapat di PLTA Koto Panjang daerah Kampar, Provinsi Riau
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan komunikasi bencana tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Sebagai referensi bagi peneliti yang ingin meneliti dibidang yang sama, yaitu komunikasi bencana.
2. Manfaat Praktis

Sebagai sarana bagi para pihak terkait (BPBD Kabupaten Kampar, PLTA Koto Panjang, BMKG Stasiun Pekanbaru, instansi-instansi pemerintah maupun

non-pemerintah terkait bencana, dan masyarakat sekitar kawasan bencana banjir) dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan untuk meningkatkan kemampuan dalam menanggulangi bencana.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penelitian, maka peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Terdapat 5 penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian yang peneliti lakukan.

Pertama, penelitian yang berjudul *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak* (Musyadad, *et.al*, 2015). Penelitian ini dilakukan karena peneliti melihat beberapa masalah yang terdapat pada kinerja BPBD dalam menangani masalah penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Lebak, diantaranya terbatasnya jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat. Kedua, sumber daya manusia dan aparatur BPBD Kabupaten Lebak yang terbatas. Ketiga, masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana banjir. Keempat, belum adanya peraturan daerah tentang pendanaan penanggulangan bencana. Kelima, ketidakefektifan sosialisasi penanggulangan bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Lebak. Berdasarkan analisis data, disimpulkan bahwa penilaian masyarakat terhadap kinerja BPBD terkait bencana banjir di Kabupaten Lebak dirasa masih kurang oleh sebagian masyarakat, dimana kinerja BPBD Kabupaten Lebak hanya mencapai angka 60,10% dari angka tertinggi 65%, maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kinerja BPBD Kabupaten Lebak dalam menanggulangi bencana banjir masuk dalam kategori kurang baik.

Penelitian kedua berjudul *Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Jombang* (Nisa', Fachiratun 2014). Penelitian ini hanya membahas penanggulangan bencana alam, yaitu tahapan setelah bencana terjadi, meliputi tahap response (tanggapan), recovery (pemulihan), dan development (pembangunan). Fokus dalam penelitian ini adalah penanggulangan bencana alam oleh BPBD Kabupaten Jombang meliputi response dan recovery dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana alam. Dalam melakukan analisis, peneliti membagi 3 tindakan yang dilakukan yaitu response, recovery, dan development. Response menjadi dua bagian berdasarkan waktu pelaksanaan tindakan, yaitu sebelum dan sesudah bencana terjadi. Tindakan response yang dilakukan sebelum bencana terjadi berupa sosialisasi jika BMKG menginfokan adanya potensi puting beliung. Secara umum tindakan recovery dan development yang dilakukan sudah sesuai dengan teori, yakni pengembalian fungsi bangunan-bangunan yang rusak akibat bencana. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi paling menonjol yang dilakukan masyarakat dalam penanggulangan bencana adalah partisipasi tenaga dan partisipasi sosial.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Surtini (2014), dengan judul *Kontribusi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Pencegahan Bencana Banjir Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu*. Secara geografis, Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu merupakan sebuah daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang berasal oleh faktor alam, non alam, maupun faktor manusia. Maka dari itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bertanggungjawab dalam masalah penanggulangan bencana memberi kontribusi dalam mengantisipasi bencana banjir di daerah tersebut, tetapi kesadaran masyarakat dianggap masih sangat kurang dalam bekerjasama mengantisipasi terjadinya bencana

banjir. Hasil dari penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dianggap telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam memberikan kontribusi untuk mengantisipasi terjadinya bencana banjir, dan memberikan pelatihan kepada masyarakat bahwa masyarakat mempunyai peran penting dalam mencegah bencana banjir.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Putra, Febrian Kurnia, Sri Hastjarjo, dengan judul *Aktivitas Komunikasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar (Deskriptif Kualitatif Megenai Aktivitas Komunikasi di BPBD Kab. Karanganyar dalam Pengenalan Mitigasi Bencana kepada Masyarakat Kab.Karanganyar)*. Dalam melakukan komunikasi mengenai bencana oleh pihak-pihak terkait kepada masyarakat, tidak terlepas dari penggunaan teori mengenai komunikasi pembangunan dan penerapannya terhadap masyarakat, mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan juga termasuk di dalamnya respon dan pemulihan. Maka peneliti ingin melihat sejauh mana komunikasi yang dilakukan oleh BNPB dan BPBD mengenai penanggulangan bencana kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik *purposive sampling*. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah komunikasi mengenai bencana dalam mengenalkan mitigasi bencana kepada masyarakat oleh BPBD Kabupaten Karanganyar dianggap sudah efektif. Hal tersebut dilihat dari data pengurangan resiko akibat bencana.

Penelitian kelima dilakukan oleh Syarif, Ahmad, dkk (2014) berjudul *Pentingnya Komunikasi dan Informasi pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulan Bencana di Kota Makassar*. Penelitian ini membahas mengenai penanggulangan bencana dimana pelaksanaannya harus dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan bersifat menyeluruh. Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, sistem komunikasi dan informasi merupakan suatu bagian penting yang harus diperhatikan agar mengurangi resiko ketidakpastian pada masyarakat yang terkena dan

membutuhkan berita akurat untuk dapat memberikan ketentraman bagi mereka. Pertukaran informasi yang baik tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi juga bagi petugas di lapangan. Hasil yang terdapat dalam penelitian ini adalah bahwa komunikasi dan informasi menjadi bagian penting, karena semakin tinggi saluran komunikasi maka semakin tinggi pula probabilitas. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, harus dibangun komunikasi yang setara antara pemerintah, masyarakat, serta pihak yang terkait lainnya. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dinilai cukup baik, namun dalam pengimplementasian dibutuhkan sebuah regulasi yang dapat mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut, agar tugas dan peran setiap instansi lebih terinci.

Dari lima penelitian terdahulu diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dalam fokus penelitian dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Kelima penelitian diatas lebih membahas mengenai kinerja BPBD, penanganan saat bencana dan pasca bencana, kontribusi BPBD dalam meningkatkan kesadaran saat pra bencana, dan mengenai pemanfaatan media. Tidak ada atau belum terdapat penelitian yang membahas seluruh elemen yang terdapat dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas kebaruan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu penelitian ini akan membahas seluruh elemen yang terdapat dalam penanggulangan bencana, baik dari sistem komunikasi dan informasi yang dilakukan oleh BPBD sebagai pihak yang bertanggungjawab. Penelitian ini juga membahas komunikasi bencana secara menyeluruh yang dilakukan saat penanggulangan bencana, baik pada pra bencana, dimana BPBD memiliki tugas dan peran dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait bencana, saat bencana yaitu mengenai koordinasi yang dilakukan oleh BPBD dengan pihak-pihak yang terkait baik relawan serta masyarakat, serta membahas mengenai penyaluran informasi

kepada masyarakat saat bencana, dan pasca bencana yaitu mengenai recovery dan menangani masalah kerugian yang terdapat di masyarakat.

F. Kerangka Teori

1. Bencana dan Penanggulangan Bencana

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia seakan terbiasa mendengar kata bencana. Indonesia yang secara geografis terletak di daerah rawan bencana, mau tidak mau membuat masyarakat Indonesia harus siap dengan segala bencana atau kejadian yang akan terjadi, baik yang terjadi secara tiba-tiba maupun bencana yang terjadi secara bertahap. Terjadinya bencana tsunami di Aceh beberapa tahun silam, seakan membangunkan masyarakat Indonesia untuk selalu siap siaga terhadap bencana, agar kejadian buruk yang tidak diinginkan tidak terulang kembali dan bisa diatasi secara tepat dan cepat, juga tidak menimbulkan korban jiwa dalam jumlah yang banyak. Hal tersebut mengingatkan kita sebagai masyarakat Indonesia untuk memiliki kesadaran penuh bahwa kita berada dan tinggal di daerah rawan bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Pasal 1 Angka 1 tentang penanggulangan bencana, definisi bencana itu sendiri adalah:

“Bencana adalah peristiwa maupun rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa bencana merupakan sebuah hal yang buruk, karena bencana tidak hanya merusak alam, infrastruktur, tetapi juga menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat, diantaranya kehilangan keluarga maupun kerabat. Bencana memiliki kategori atau jenis masing-masing. Kategori atau jenis bencana itu sendiri terbagi menjadi tiga.

Pertama, bencana alam yang disebabkan oleh berubahnya kondisi alam, seperti tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor, puting beliung. Kedua, bencana sosial yaitu bencana yang ditimbulkan karena ulah manusia itu sendiri, seperti teror bom, kerusuhan massal, kelaparan, pengungsian. Ketiga, bencana kompleks yaitu bencana yang merupakan perpaduan antara bencana alam dan bencana sosial, seperti kebakaran, kerusakan alam, polusi lingkungan (Arie, 2009: 22).

Nurjanah, *et.all* mengatakan bencana terjadi dikarenakan adanya keterkaitan antara bahaya, kerentanan, dan pemicu (2012: 17). Dapat dipahami bahwa masyarakat yang berada di daerah rawan bencana seperti bantaran sungai atau gunung berapi aktif, menyadari bahwa kehidupan mereka tidak selamanya berada dalam tingkat aman, tetapi bisa saja terjadi sebuah bencana yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Hal tersebut berkaitan dengan kerentanan, dimana masyarakat harus mengerti bagaimana karakteristik dari bahaya tersebut. Kedua hal tersebut, bahaya dan kerentanan berkaitan dengan pemicu seperti, hujan deras yang menyebabkan sungai tidak mampu menampung air lebih banyak lagi. Maka masyarakat yang bertempat tinggal di bantaran sungai tersebut terkena bencana banjir.

Dalam menghadapi sebuah bencana, maka haruslah dipikirkan bagaimana cara penanggulangan yang baik terhadap suatu bencana tersebut. Tidak hanya saat bencana, tetapi pada saat penanggulangan bencana, semua elemen yang terkait terhadap bencana tersebut haruslah menjalani kerjasama dan berkoordinasi dengan baik, baik dari lembaga pemerintah, relawan, maupun masyarakat di sekitar daerah bencana itu sendiri.

Dalam menanggulangi bencana, maka pihak-pihak yang terlibat haruslah mengetahui skala dan tingkat bahaya dari bencana yang sedang terjadi, apakah bencana tersebut dalam tingkat bahaya ringan, menengah, berat atau bahkan mencapai tingkat bahaya dahsyat (Arie, 2009: 23). Penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan ketika bencana itu terjadi, namun juga harus dilakukan pada saat pra bencana, bencana, dan pasca bencana. Ramli (dalam Susanto, 2011:

44) menjelaskan bahwa pra bencana meliputi kesiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Saat bencana meliputi tanggap darurat. Pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menurut Bintoro (dalam Susanto, 2011: 64), menjelaskan bahwa siklus bencana bermula pada saat bencana, dimana pada fase ini keadaan berubah menjadi kacau balau yang menyebabkan kritis yang membutuhkan mobilisasi sumber daya dari luar, baik berupa barang dan material sehingga kondisi tersebut dinyatakan sebagai kondisi tanggap darurat. Setelah tanggap darurat dijalankan dan kondisi cukup membaik, maka pemulihan awal yang dilanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai hingga kondisi dapat kembali berjalan membaik dan normal. Fase rekonstruksi dan rehabilitasi ini masih membutuhkan mobilisasi sumber daya dari luar, namun tidak mendesak seperti kondisi tanggap darurat. Siklus terakhir dari bencana yaitu pada saat kondisi suatu daerah bencana sudah kembali normal, maka pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penting dilakukan agar ketika terjadi bencana pemerintah serta masyarakat berada dalam keadaan siap untuk meminimalisir dampak dari bencana.

Menurut Chamsah (dalam Susanto, 2011: 14) dalam implementasi penanggulangan bencana, pemerintah daerah harus menyusun *contingency plan* penanggulangan bencana yang mencakup analisa daerah rawan bencana, identifikasi potensi dan sistem sumber yang dapat dimobilisasi, menentukan kebijakan serta langkah strategis jika terjadi bencana. Hal tersebut menegaskan bahwa dalam menanggulangi bencana tidak hanya bisa dilihat berdasarkan satu aspek saja, tetapi juga harus dilihat dari berbagai aspek sehingga dalam mengatasi bencana tersebut tidak mengalami masalah dan dapat diselesaikan dengan baik.

2. Komunikasi Bencana

Komunikasi merupakan bagaimana pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan dapat dipahami oleh penerima pesan dengan baik, dimana dalam penyampaian pesan tersebut terdapat dimensi-dimensi komunikasi di dalamnya, yaitu isi pesan, gangguan yang terdapat dalam penyampaian pesan, jaringan yang digunakan dalam menghubungkan pesan, dan arah. Menurut Suprpto (2009: 5), komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang berhasil melahirkan kebersamaan (*commonness*), kesepahaman antara sumber (*source*) dengan penerima (*audience-receiver*). Berdasarkan teori di atas dapat diambil pengertian bahwa dalam melakukan sebuah komunikasi, baik penyampai pesan dan penerima pesan haruslah memiliki kesepahaman agar pesan disampaikan dapat terwujud, sehingga komunikasi dapat efektif.

Dalam melakukan komunikasi bencana, terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mengurangi resiko bencana, yaitu *preparedness*, *mitigation*, *response*, dan *recovery* (Purnomo, & Rony, 2010: 89-90). Tahapan-tahapan bencana dilakukan agar resiko yang timbul saat bencana dapat berkurang, sehingga kerugian-kerugian yang timbul setelah bencana terjadipun tidak banyak. Menurut Nurjanah (2012:17), adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam menjalankan komunikasi bencana adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan penanggulangan bencana, bagian ini merupakan penyusunan data dalam resiko yang terdapat akibat bencana.
- b. Pengurangan resiko bencana, yaitu untuk mengurangi dampak buruk yang terjadi akibat bencana.
- c. Pencegahan bencana, yaitu dengan mempersiapkan apa saja langkah-langkah yang akan diambil pada saat terjadi bencana.
- d. Pemanduan kedalam perencanaan pembangunan, dimana terdapat unsur-unsur dalam menanggulangi bencana.
- e. Persyaratan analisis resiko bencana, dimana sebelum bencana terjadi maka diperlukan penelitian dan studi mengenai kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk terjadi bencana.

- f. Perencanaan dalam penanggulangan bencana terhadap masyarakat, dimana hal tersebut juga termasuk kedalam bagian pengurangan resiko bencana.
- g. Pendidikan dan latihan, hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki siap cepat tanggap pada saat bencana terjadi.
- h. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Dalam melakukan komunikasi bencana, pihak yang bertanggungjawab tidak hanya dapat memperhatikan komunikasi saat terjadi bencana saja, tetapi juga harus memperhatikan komunikasi saat pra dan pasca bencana. Selama ini, komunikasi yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat terdampak bencana hanya berfokus pada masa tanggap darurat. Menurut Sudibyakto dalam Susanto (2011: 48), komunikasi dengan masyarakat yang terdampak bencana pada masa prabencana dianggap satu hal yang sangat penting yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Hal tersebut juga didukung oleh PJ, Prihadi dalam Susanto (2011: 11) yang mengatakan dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana dapat dilakukan dengan 8 cara, yaitu meningkatkan pemahaman dalam penanganan bencana untuk aparat pemerintah daerah, pelatihan kepada masyarakat untuk tanggap bencana, paket pendidikan masyarakat, pembuatan peta jalur evakuasi, pembuatan dan pemasangan *signboard*, simulasi berkala sistem peringatan dini dan evakuasi, kampanye melalui media cetak dan elektronik, dan pelatihan untuk siswa sekolah. Komunikasi yang dilakukan dalam melakukan kesiapsiagaan dan menanggulangi bencana juga harus dilakukan antara pemerintah dan masyarakat yang terdampak bencana. Hal tersebut diatur dalam pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penyelenggaraan penanggulangan pada tahap prabencana, dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat situasi bencana.

Setelah melakukan komunikasi pada prabencana, dimana antara pemerintah, aparat pemerintah desa, dan warga desa sudah saling mengetahui

bagaimana peran yang harus dilakukan saat terjadi bencana, maka saat kondisi darurat komunikasi tersebut harus segera dijalankan agar proses mengumpulkan informasi atau data dapat dilakukan secara sistematis. Pada kondisi darurat, dilakukan monitoring yang berlangsung secara terus menerus antara pemerintah, aparat desa dan warga yang terdampak guna mengetahui kebutuhan korban yang terdampak.

Tahap terakhir dalam melakukan penanggulangan bencana yaitu tahap pasca bencana. Pada tahap ini, penyelenggaraan penanggulangan bencana tahap pasca bencana terdapat dalam pasal 33 huruf c Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Rekonstruksi yang dilakukan menyangkut perbaikan terhadap infrastruktur-infrastruktur penting yang rusak akibat bencana. Sebelum dilakukannya rehabilitasi dan rekonstruksi, komunikasi juga penting dilakukan baik antara pemerintah dengan aparat desa maupun dengan masyarakat yang terdampak, yaitu melakukan pendataan terhadap kerusakan terlebih dahulu. Setelah data didapat, maka tahap pasca bencana baru bisa dilakukan. Pada fase ini, keadaan dari wilayah yang terdampak akan kembali normal, dan pada tahap ini pemerintah penting melakukan tahap pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana jika suatu waktu terjadi kembali. Jadi, setiap proses penanggulangan bencana selalu melibatkan peran komunikasi, baik komunikasi interpersonal, kelompok, organisasi, publik, media massa bahkan komunikasi lintas budaya.

3. Pola Komunikasi

Dalam melakukan komunikasi, dibutuhkan sebuah jaringan komunikasi yang berfungsi sebagai penyambung pesan antara satu orang dengan orang lain atau yang biasa disebut saluran. Jaringan sangat dibutuhkan dalam melakukan komunikasi, jika tidak terdapat sebuah jaringan maka pesan yang akan disampaikan oleh pengirim pesan tidak dapat dipastikan apakah pesan tersebut sampai atau tidak kepada penerima pesan. Devito (1996: 344), membagi jaringan

komunikasi menjadi 5 struktur dimana jaringan komunikasi ini biasa digunakan dalam perspektif kelompok kecil maupun perspektif organisasi. Adapun kelima struktur jaringan tersebut, yaitu struktur lingkaran, struktur roda, struktur Y, struktur rantai, dan struktur semua saluran.

Joseph A. Devito (1997: 345) dalam bukunya menjelaskan bahwa, struktur lingkaran merupakan struktur yang menganggap bahwa semua anggota yang berada dalam sebuah kelompok maupun organisasi tersebut berada di posisi yang sama dan memiliki kekuatan yang sama dalam mempengaruhi kelompok, dimana tidak terdapatnya seorang pemimpin dalam struktur jaringan komunikasi ini dan setiap anggota dapat saling melakukan komunikasi dengan dua anggota yang berada di sisi kanan dan kirinya. Kedua, struktur roda yaitu struktur yang menggambarkan bahwa dalam melakukan komunikasi dalam suatu kelompok maupun organisasi terdapat seseorang yang berada di titik pusat yang biasa disebut sebagai pemimpin dalam struktur roda. Hal tersebut memperlihatkan bahwa dalam melakukan komunikasi, setiap anggota tidak dapat berkomunikasi langsung dengan anggota lain yang berada dalam kelompok maupun organisasi, dikarenakan setiap anggota yang ingin melakukan komunikasi harus melewati pemimpin yang berada di pusat terlebih dahulu. Dalam struktur roda, pemimpin merupakan satu-satunya orang yang dapat menerima dan mengirim pesan dari setiap anggota, sehingga dalam struktur komunikasi ini tidak jarang pula pesan tidak sampai kepada anggota lain karena terjadi kepadatan informasi di pusat (Devito, 1997: 345).

Ketiga yaitu struktur Y. Pada struktur Y terdapat 2 pemimpin yang dapat saling melakukan komunikasi dengan 2 anggota lainnya, digambarkan bahwa pemimpin yang berada di posisi ketiga dari bawah merupakan pemimpin utama dalam melakukan komunikasi, dan pemimpin kedua berada tepat dibawah pemimpin pertama. Selain kedua pemimpin tersebut, anggota yang berada dalam kelompok kecil maupun organisasi tersebut hanya dapat berkomunikasi dengan satu anggota lain. Struktur Y merupakan struktur yang paling terpusat

dibandingkan dengan struktur jaringan komunikasi lainnya (Devito, 1997: 345). Keempat yaitu struktur rantai. Struktur rantai memiliki kemiripan dengan struktur roda, yaitu kedua struktur ini sama-sama memiliki pola yang terpusat. Pada struktur rantai, digambarkan bahwa yang berperan menjadi pemimpin dalam melakukan sebuah komunikasi merupakan orang yang berada diposisi tengah. Anggota yang berada di posisi tengah dapat melakukan komunikasi dengan 2 orang lain di sebelahnya, dan anggota yang berada di posisi paling ujung hanya dapat melakukan komunikasi dengan satu anggota disebelahnya. Pada struktur rantai, setiap anggota dapat saling berkomunikasi dengan anggota disebelahnya tanpa harus menyampaikan pesan melalui pemimpin terlebih dahulu, sehingga pesan dapat segera sampai kepada anggota lain yang dituju (Devito, 1997: 345).

Struktur yang terakhir, yaitu struktur semua saluran atau yang biasa disebut dengan pola bintang. Struktur semua saluran memiliki kemiripan dengan struktur lingkaran, dimana setiap anggota memiliki kedudukan yang sama dalam mempengaruhi setiap anggota yang berada dalam suatu kelompok kecil maupun organisasi. Namun yang menjadi pembeda, yaitu dalam struktur semua saluran setiap anggota tidak hanya dapat berkomunikasi dengan dua orang disebelahnya saja, namun juga dapat berkomunikasi dengan setiap anggota yang berada dalam kelompok atau organisasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pemimpin yang terpusat, sehingga struktur semua saluran ini memungkinkan setiap anggotanya dapat berpartisipasi dengan baik (Devito, 1997: 345).

Dalam melakukan komunikasi, setiap pemimpin maupun anggota yang ingin menyampaikan pesan kepada anggota lain, tidak hanya dapat dilakukan melalui media yang bersifat formal, namun juga bisa disampaikan menggunakan media informal, seperti tatap muka, telepon maupun setiap media yang dapat menghubungkan setiap anggota maupun pemimpinnya. Selama pesan dapat diterima oleh penerima pesan, maka media sudah tidak menjadi suatu masalah untuk melakukan komunikasi.

Selain jaringan, dalam melakukan komunikasi juga terdapat arus komunikasi, terdapat tiga bentuk arah arus komunikasi dimana dalam arus komunikasi tersebut dapat ditemukan masalah-masalah dalam melakukan komunikasi. Ketiga arus komunikasi tersebut, yaitu komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, dan komunikasi literal. Joseph A. Devito (1997: 346), menjelaskan dalam bukunya bahwa komunikasi ke atas merupakan pesan yang dikirim dari tingkat hirarki yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam melakukan komunikasi ke atas terdapat kelebihan dan kelemahan yang dapat timbul, yaitu komunikasi dengan arus ke atas ini dianggap penting, karena dapat menimbulkan komunikasi yang bersifat umpan balik antara anggota dan pemimpin sebuah kelompok maupun organisasi, dan juga anggota memiliki rasa menjadi bagian dalam sebuah kelompok atau organisasi. Kelemahan dalam melakukan komunikasi ke atas, yaitu terkadang pesan yang ingin disampaikan oleh anggota sebuah kelompok kepada pemimpin tidak sampai. Hal tersebut dikarenakan komunikasi yang dilakukan oleh para anggota kepada pemimpin terkadang hanya sampai di tengah-tengah dimana terdapat pemisah antara anggota dan pemimpin, sehingga hal tersebut menyebabkan anggota lebih memilih untuk tidak melakukan komunikasi kepada pemimpin mereka.

Bentuk arus komunikasi yang kedua merupakan kebalikan dari arus komunikasi ke atas, yaitu komunikasi ke bawah. Arus komunikasi ke bawah merupakan arus komunikasi dari tingkat hirarki yang lebih tinggi kepada tingkat yang lebih rendah. Dalam arus komunikasi ke bawah ini, pemimpin memiliki peran yang lebih penting, dimana sebuah pesan yang diberikan oleh pemimpin dapat dimengerti oleh para anggotanya, sehingga perintah yang diberi oleh pemimpin dapat dijalankan dengan baik pula oleh anggota kelompok maupun organisasi tersebut (Devito, 1997: 346). Bentuk arus komunikasi selanjutnya yaitu komunikasi literal, yaitu pesan yang dilakukan antara sesama tingkat hirarki, pemimpin dengan pemimpin dan anggota dengan anggota (Devito, 1997: 346).

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Mulyana (2004: 202), menjelaskan bahwa studi kasus merupakan penelitian yang membahas sebanyak mungkin data subjek yang diteliti dari berbagai aspek secara menyeluruh (komprehensif) baik aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu program, organisasi (komunitas) atau sebuah situasi sosial. Penelitian studi kasus memiliki keunggulan, yaitu dalam meneliti suatu kasus peneliti melakukan pengumpulan data dari banyak ragam sumber yang dimana kasus tersebut dicari kedalaman penjelasannya, sehingga studi kasus tidak hanya mampu membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan eksploratif (apa), deskriptif (bagaimana), namun juga pertanyaan eksplanatif (mengapa) (Riyanto dalam Narendra, 2008: 87). Dalam melakukan penelitian studi kasus di dalam sebuah sistem akan ditemukan kegiatan-kegiatan terpola, koheren, dan juga berurutan (Stake dalam Narendra, 2008: 87).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan (Oktober 2017-Maret 2018). Pengumpulan data berlokasi di sekitar kawasan rawan bencana banjir, tepatnya di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kampar, PLTA Koto Panjang, Desa Buluh Cina, Desa Kampung Terendam dan Dusun Kampung Deling, Kampar. Peneliti juga mengumpulkan data di Kantor BMKG Pekanbaru, kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau.

3. Pemilihan Narasumber

Dalam melakukan pemilihan narasumber, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana narasumber dipilih secara sengaja. Narasumber dalam penelitian terdapat 2 tipe, yaitu pemerintah dan masyarakat. Narasumber dari pihak pemerintah terdapat 6 orang yaitu:

1. Ir. Elbakhtisar sebagai Kabid. Kedaruratan dan Logistik BPBD Kampar.
2. Adi Chandra Lukita, SE sebagai Kepala Pusdalops Kampar.
3. Iwan Nurdiansyah sebagai Supervisor PLTA Koto Panjang Bagian Operasional.
4. Slamet Ryadi sebagai Kepala BMKG Pekanbaru.
5. Abdul Razak sebagai Kepala Subbid Penyelamatan dan Evakuasi Bidang Kedaruratan BPBD Provinsi Riau.
6. Firmana Putra sebagai Staf Pemerintah Desa Buluh Cina.
7. Sinam sebagai Pakar Media Komunitas dan Isu Kebencanaan.

Narasumber dari pihak masyarakat terdapat 5 orang yaitu:

1. Akmal sebagai warga Dusun Kampung Deling
2. Khoirul sebagai warga Dusun Kampung Deling
3. Fitri sebagai warga Desa Buluh Cina
4. Erawati sebagai warga Desa Buluh Cina, dan
5. Asiah sebagai warga Desa Kampung Terendam
6. Muallimin sebagai warga Desa Tanjung Alay, 13 Koto Kampar

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diperoleh peneliti dalam penelitian berasal dari sumber data primer, dimana data primer ini merupakan data yang berasal dari sumbernya langsung. Sumber data primer diperoleh peneliti melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat sekitar kawasan bencana. Sedangkan data sekunder, atau data yang diperoleh dari tangan kedua berasal dari buku dan internet. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan 3 teknik

pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara mendalam semiterstruktur, dan dokumentasi.

a. Observasi

Jenis observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan, dimana peneliti tidak termasuk menjadi subjek, peneliti hanya mengikuti kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan secara langsung. Hal-hal yang peneliti observasi yaitu lingkungan/wilayah banjir dan saat BPBD Kampar sedang melakukan tanggap darurat bencana banjir disalah satu daerah di Kabupaten Kampar.

b. Wawancara mendalam semiterstruktur

Menurut Sugiyono (2008) tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat serta ide-idenya. Adapun pertanyaan yang diajukan yaitu:

Pertanyaan untuk mengkomunikasikan bencana:

1. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan BPBD saat pra bencana?
2. Siapa yang bertanggungjawab dalam hal tersebut?
3. Bagaimana cara BPBD mengajak masyarakat maupun stakeholder lain untuk turut membantu dalam tahap persiapan upaya mengurangi resiko bencana?
4. Jelaskan bagaimana pesan yang disampaikan dalam memberitahukan perencanaan penanggulangan untuk mengurangi resiko bencana?
5. Program apa saja yang telah dilakukan dalam mengurangi resiko bencana?
6. Dimana program tersebut dilaksanakan?
7. Kapan program tersebut dilaksanakan?

8. Siapa saja yang menjadi stakeholder dalam melakukan program tersebut?
9. Bagaimana cara BPBD menyampaikan pesan pada saat gejala-gejala dalam bencana sudah tampak?
10. Siapa yang bertanggungjawab dalam memproduksi pesan tersebut?
11. Siapa yang bertanggung jawab pada saat pasca bencana?

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah audio, tulisan dan juga gambar.

5. Analisis Data

Menurut Hamidi (2004), unit analisis data adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Adapun tahap-tahap dalam melakukan analisis data terbagi menjadi:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan dari data yang sudah didapat di lapangan dan diolah kembali untuk memudahkan peneliti saat pengambilan data selanjutnya. Menurut Sugiyono (2008), data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah data disederhanakan dan diolah kembali, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, biasanya berbentuk bagan dan uraian singkat.

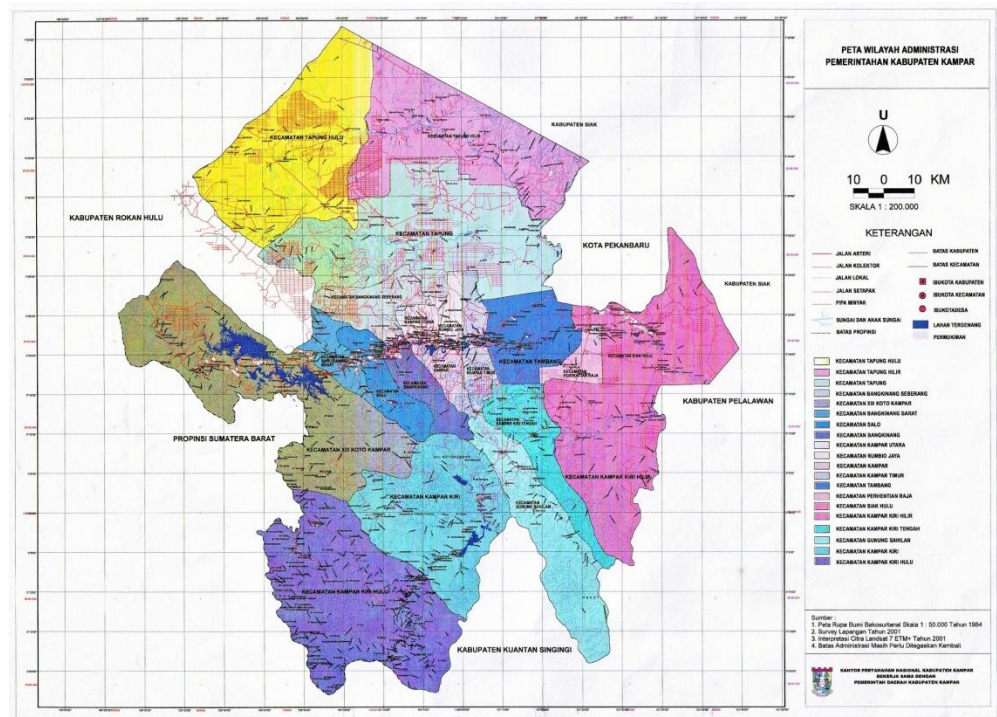
c. Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data diolah dan masuk tahap penyajian data, maka peneliti memiliki tugas dalam menarik kesimpulan terhadap data-data yang telah didapat dari subjek (informan).

BAB II

DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN BANJIR KAMPAR



Sumber: Peta Kota

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Kampar

Dalam Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun 2013, Kabupaten Kampar yang memiliki luas lebih kurang 11.289,28 km² merupakan daerah yang terletak antara 01°00'40" Lintang Utara sampai 00°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30"- 101°14'30" Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis

khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kampar memiliki batas-batas daerah adalah sebagai berikut

Utara	= Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak
Selatan	= Kabupaten Kuantan Singingi
Barat	= Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat
Timur	= Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan, sebagai hasil pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya, yaitu Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, XIII Koto Kampar, Koto Kampar Hulu, Kuok, Salo, Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Bangkinang Kota, Bangkinang, Kampar, Kampar Timur, Rumbio Jaya, Kampar Utara, Tambang, Siak Hulu, dan Perhentian Raja.

Luas wilayah Kabupaten Kampar adalah $\pm 10.983,64 \text{ Km}^2$ yang terbagi dalam 21 kecamatan, 242 desa dan 8 kelurahan. Dengan jumlah penduduk 648.620 jiwa, laki-laki 335.866 jiwa dan perempuan 312.754 jiwa dengan kepadatan rata-rata 59 jiwa/ Km^2 . Berdasarkan hidrologi, Kabupaten Kampar dialiri oleh beberapa aliran sungai yaitu:

- a. Sungai Kampar (panjang $\pm 413,5 \text{ Km}$ dan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 m). Bagian hulu sungai Kampar bercabang 2 (dua) yaitu, Sungai Kampar Kiri dan Sungai Kampar Kanan, dimana terdapat Waduk PLTA Koto Panjang (luas genangan 12.000 Ha) yang mampu menyuplai kebutuhan energi listrik sebesar 114 MW. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi: Koto Kampar Hulu, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kuok, Salo, Bangkinang Kota, Kampar, Kampa, Tambang, dan Siak Hulu.
- b. Sungai Siak bagian hulu (panjang $\pm 90 \text{ Km}$ dan kedalaman rata-rata 8-

12 m) yang melintasi Kecamatan Tapung Hulu, Tapung, Tapung Hilir. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Dengan kondisi geografis tersebut, Kabupaten Kampar menjadi daerah rawan bencana tanah longsor, banjir, kekeringan dan angin puting beliung. Dari pemetaan yang ada di Kabupaten Kampar, kerawanan terhadap bencana adalah sebagai berikut:

1. Bencana tanah longsor sebanyak 8 kecamatan.
2. Bencana banjir sebanyak 11 kecamatan.
3. Kekeringan sebanyak 5 Kecamatan.

Berdasarkan data dari website Kabupaten Kampar (<http://kamparkab.go.id/home/berita/bangkinang-kota/ini-data-sementara-peristiwa-banjir-di-kampar.html>, diakses pada 26 Maret 2018) adapun kecamatan yang rawan banjir yaitu:

1. Kecamatan Koto Kampar Hulu
2. Kecamatan Kuok
3. Kecamatan Salo
4. Kecamatan Bangkinang Kota
5. Kecamatan Bangkinang
6. Kecamatan Kampar
7. Kecamatan Kampar Utara
8. Kecamatan Rumbio Jaya
9. Kecamatan Kampar Timur
10. Kecamatan Tambang
11. Kecamatan Siakhulu
12. Kecamatan Perhentian

B. BPBD KABUPATEN KAMPAR

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dibentuk melalui Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 tentang 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Lingkungan Badan Kabupaten Kampar. Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar terletak di Komplek Pemda Kabupaten Kampar Jl. Lingkar Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Kampar.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pengarah yang mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggapan darurat dan pasca bencana. Unsur

Pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah.
- b. Pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi

Landasan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar adalah Peraturan Bupati Kampar Nomor 56 Tahun 2012 tanggal 2 Oktober 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas/Badan dan Kantor di Kabupaten Kampar. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud :

1. Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut dengan Kepala Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
2. Kepala Pelaksana membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas kepala BPBD sehari-hari;
3. Kepala Pelaksana melaksanakan sistem pengendalian intern, memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
4. Kepala Pelaksana mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

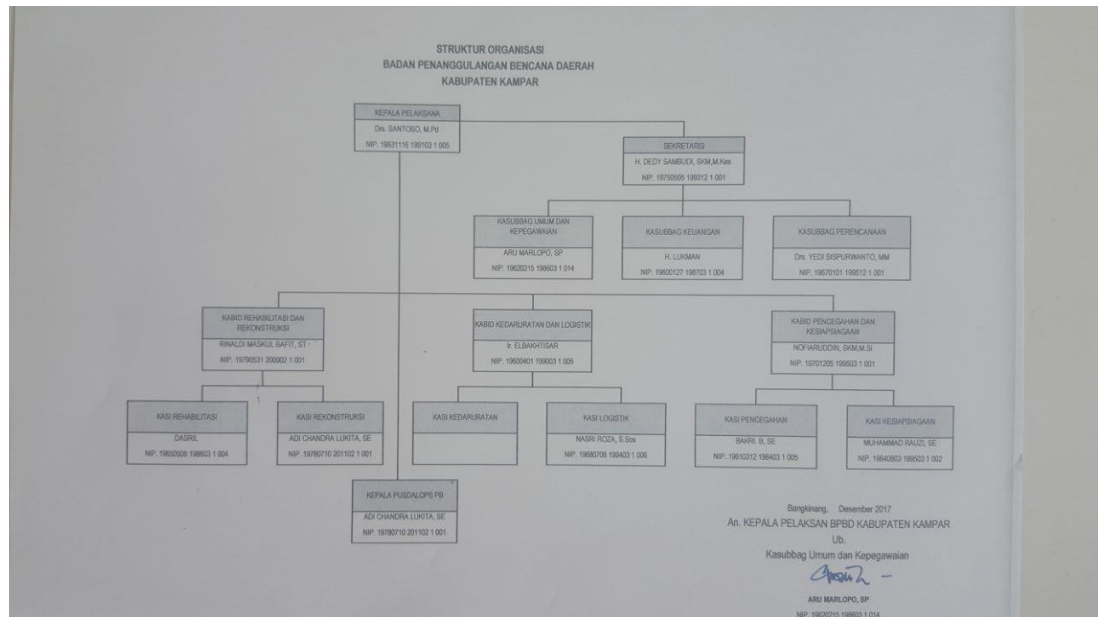
Dalam penyelenggaraan tugas pokok BPBD mempunyai tugas :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar mempunyai fungsi :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan mengumpulkan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi



Sumber: Pusdalops PB

Gambar 2.2 Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Kampar

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar, terdiri dari :

- a. Kepala BPBD dijabat secara rangkap oleh Sekretaris Daerah
- b. Unsur Pengarah
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 1. Kepala Pelaksana
 2. Sekretariat Unsur Pelaksana.
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - a. Seksi Kedaruratan;
 - b. Seksi Logistik.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi;
 - b. Seksi Rekonstruksi
6. Satuan Tugas
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional

BPBD sebagai salah satu lembaga teknis daerah dari Pemerintah Kabupaten Kampar, dalam menetapkan visinya, harus mengacu kepada Visi Kabupaten Kampar dengan serta memperhatikan tugas pokok fungsinya. Visi Kabupaten Kampar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2012 – 2016, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kampar yang madani, berakhlak dan bermoral menuju kehidupan yang sehat, sejahtera serta berdaya saing pada tahun 2016. Visi BPBD Kabupaten Kampar Tahun 2012 - 2016 adalah :

“Tanggap, Tangguh, Terampil dan Tuntas Dalam Menanggulangi Bencana”

Dalam mewujudkan visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi

BPBD Kabupaten Kampar yang di dalamnya mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar yaitu :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas aparat pemerintah, masyarakat, dunia usaha, sektor swasta untuk tangguh bencana.
2. Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
3. Melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana
4. Melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap dampak bencana

Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar adalah :

1. Mengembangkan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
2. Mendorong semangat kemandirian, kegotong royongan dan kebersamaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
3. Mewujudkan relugasi yang lengkap dalam penanggulangan bencana.
4. Mensinkronisasikan penanggulangan resiko bencana dalam program pembangunan daerah
5. Membangun kemitraan dengan stakeholder dan lembaga peduli bencana dalam penanggulangan bencana.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Terciptanya SDM dan sarana dan program penanggulangan bencana

2. Terkoordinasinya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana:
 - a. Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana.
 - b. Mewujudkan program dan kegiatan kebencanaan yang tepat sasaran dalam RPB yang terintegrasi dengan program pembangunan daerah.
 - c. Menyediakan regulasi penanggulangan bencana yang komprehensif.
 - d. Mewujudkan komunitas masyarakat peduli bencana.
 - e. Membina kerjasama pemerintah, tokoh masyarakat dalam menghadapi bencana.
 - f. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengembangkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
 - g. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengembangkan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana.
3. Terlaksana dan terintegrasinya penanganan tanggap darurat bencana dengan meningkatkan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penanganan pengungsi secara optimal.
4. Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah dengan meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksipascabencana melalui program perencanaan.

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan apa saja yang ditemukan dari wawancara dan observasi langsung di lapangan. Pengambilan data dilakukan di Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru, Riau. Metode yang dilakukan dalam pengambilan data berupa wawancara mendalam semiterstruktur kepada informan, hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui secara lebih terbuka dan mendalam serta dapat meminta pendapat dari informan. Setelah melakukan wawancara, peneliti meminta data-data yang terkait selama terjadi banjir, baik surat edaran, dokumentasi, dan lain-lain.

Pengumpulan data dilakukan mulai 1 November hingga 1 Desember 2017, namun tidak dilakukan setiap hari. Terdapat 10 informan dalam penelitian ini, dimana yang menjadi informan utama bagi peneliti yaitu BPBD Kampar, informan selanjutnya merupakan instansi-instansi pemerintahan terkait. Adapun data mengenai nama dan instansi informan disusun dalam table berikut.

Tabel 3.1 Nama dan Instansi Informan

No.	Nama	Instansi
1.	Ir. Elbakhtisar	BPBD Kampar
2.	Adi Chandra Lukita, SE	Pusdalops Kampar
3.	Iwan Nurdiansyah	PLTA Koto Panjang, Kampar
4.	Slamet Ryadi	BMKG Pekanbaru
5.	Abdul Razak	BPBD Provinsi Riau
6.	Firmanah Putra	Kantor Desa Buluh Cina
7.	Sinam	Pakar Media Komunitas dan Isu Kebencanaan

Selain informan dari instansi pemerintahan, peneliti juga mewawancarai beberapa warga Kampar yang terkena dampak banjir. Adapun data mengenai nama dan asal informan disusun dalam tabel berikut.

Tabel 3.2 Nama dan Asal Informan

No.	Nama	Asal
1.	Fitri	Desa Buluh Cina
2.	Erawati	Desa Buluh Cina
3.	Akmal	Dusun Kampung Deling
4.	Khoirul	Dusun Godang
5.	Asiah	Desa Kampung Terendam
6.	Mualimin	Desa Tanjung Alay, 13 Koto Kampar

A. Komunikasi Pra Bencana

Komunikasi saat pra bencana dilakukan untuk menanggulangi bencana banjir agar pada saat terjadinya bencana, pemerintah beserta masyarakat kawasan rawan bencana dapat saling bekerjasama untuk mengurangi kerugian yang terdapat di masyarakat. Masa pra bencana dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap penyebaran informasi mengenai status cuaca dan hujan dan tahap pencegahan resiko bencana atau yang biasa disebut dengan mitigasi bencana.

Pada tahap penyebaran informasi mengenai status cuaca dan hujan, alur komunikasi berawal dari informasi terkait status cuaca dan hujan yang berasal dari BMKG Pekanbaru, dimana informasi tersebut di diseminasikan kepada dinas-dinas terkait kebencanaan yang didalamnya termasuk Bupati, PLTA Koto Panjang, dan BPBD Kabupaten Kampar dan disebarkan menggunakan media buletin berupa softcopy dan hardcopy, dan juga menggunakan sosial media seperti grup whatsapp dan twitter. Setelah mendapat informasi terkait status cuaca dan hujan tersebut, maka informasi tersebut diteruskan kepada setiap kecamatan dan juga desa menggunakan media telpon, dan selanjutnya desa memiliki

tanggung jawab untuk menyebarkan informasi tersebut kepada setiap warga yang berada di kawasan rawan bencana menggunakan media tatap muka langsung.

Tahap masa pra bencana yang kedua yaitu mitigasi bencana, adapun alurnya sebagai berikut:

1. Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana merupakan program pemerintah yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana di masyarakat. Pada saat masa pra bencana, pemerintah khususnya BPBD yang bergerak khusus dibidang kebencanaan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan resiko bencana kepada setiap desa yang berada di kawasan rawan bencana. Adapun program yang dijalankan BPBD untuk melakukan pencegahan resiko bencana yaitu:

a. Desa Tangguh Bencana (Destana)

Komunikator. Desa tangguh bencana merupakan program BNPB yang melibatkan masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan bencana, dimana dalam program DESTANA pemerintah memberikan *pesan* berupa informasi-informasi terkait penanggulangan bencana pada saat bencana datang. Dalam menjalankan program DESTANA, maka BPBD Kampar merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk mengadakan program tersebut kepada masyarakat desa yang kemudian disebut dengan relawan.

Dalam wawancara dengan Pak Elbachtisar yang merupakan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistic BPBD Kampar menyampaikan bahwa memang ada program pelatihan desa tangguh bencana.

*“Salah satu pelatihan yang dijalankan BPBD Kampar ialah destana (desa tangguh bencana)”
(Wawancara, Elbakhtisar, 09 November 2017).*

Ia mengatakan bahwa dalam mengadakan program DESTANA, tidak semua desa yang ada di daerah Kampar mendapat program pelatihan. Hal tersebut dikarenakan dalam satu tahun BNPB memberi jatah kepada setiap BPBD kabupaten/kota untuk mengadakan desa tangguh bencana di dua desa yang dianggap daerah yang rawan bencana dan sangat cocok untuk dilakukan program desa tangguh bencana. Dua desa tersebut juga melewati proses seleksi oleh BPBD Kampar untuk dipilih melakukan program destana di desanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Pak Chandra, Kepala PUSDALOPS Kabupaten Kampar

*“Setiap tahun itu ada anggaran dana untuk pembentukan destana, tentu desa-desa yang ada di kabupaten Kampar ini diseleksi terlebih dahulu”
(Wawancara, Chandra, 21 November 2017).*

Dijelaskan, bahwa proses seleksi untuk DESTANA dikarenakan banyak yang mendaftarkan desanya untuk memperoleh pelatihan desa tangguh bencana. Ia juga mengatakan bahwa pada 2016 pelatihan DESTANA banjir dilakukan di Desa Mentulik dan pada 2017 dilakukan di Desa Buluh Cina.

Media. Media yang digunakan dalam menjalankan program yaitu sosialisasi, pelatihan, dan simulasi dimana dari program ini diharapkan agar relawan yang terdiri dari masyarakat ini paham dengan karakteristik bencana dan

mengerti apa yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana sehingga dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana untuk mengurangi terdapatnya korban jiwa.

Komunikasikan. Terkait pernyataan yang diberikan oleh komunikator tentang program DESTANA, hal tersebut dibenarkan oleh Pak Firmanah Putra, yang merupakan staf kantor Desa Buluh Cina. Ia mengatakan bahwa memang benar Desa Buluh Cina dipilih menjadi lokasi program pelatihan DESTANA yang dilakukan BPBD Kampar.

“BPBD Kabupaten Kampar sering melakukan pelatihan-pelatihan terkait bencana di Buluh Cina, dalam satu tahun bisa terdapat pelatihan 2-3 kali” (Wawancara Firmanah Putra, 20 November 2017).

Namun berbeda dengan pernyataan Pak Elbachtisar, Pak Firmanah Putra mengatakan bahwa pelatihan diberikan selama satu minggu. Pak Firmanah putra juga menambahkan bahwa pelatihan terkait bencana banjir tidak hanya dilakukan oleh BPBD Kampar saja, namun pelatihan juga didapatkan dari SAR dan komunitas-komunitas lain.

Namun, hal tidak senada dikemukakan oleh Bu Erawati yang merupakan warga Desa Buluh Cina, ia mengatakan tidak begitu mengetahui adanya pelatihan terkait bencana di Desa Buluh Cina. Seperti yang dikatakan Bu Erawati dalam wawancara:

“Kurang tahu jika ada pelatihan mengenai menanggulangi bencana banjir” (Wawancara, Erawati 20 November 2017).

Bu Erawati menambahkan bahwa ia hanya mengetahui bahwa pemerintah datang di saat terjadi bencana dan setelah bencana.

Feedback. Hal terkait pelatihan DESTANA di Desa Buluh Cina juga peneliti konfirmasi kepada bu Fitri dan hal senada juga diungkapkan oleh bu Fitri:

“Terkait pelatihan, biasanya aparat desa diberi pelatihan, namun warga desa tidak” (Wawancara, Fitri 20 November 2017).

Dijelaskan, bahwa suami dari Ibu Fitri yang merupakan RT 4 Desa Buluh Cina juga jarang mendatangi pelatihan, hal tersebut dikarenakan warga Desa Buluh Cina menganggap bahwa bencana banjir bukan lagi merupakan suatu hal yang menakutkan, karena bencana banjir sudah terjadi bertahun-tahun di Desa Buluh Cina. Jadi, warga sudah mengerti apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana banjir. Namun Ibu Fitri juga menambahkan bahwa, bagi warga desa yang ingin mengikuti pelatihan dibebaskan saja untuk mengikuti pelatihan.

Namun keluhan diberikan oleh Pak Akmal yang desanya tidak menjadi program dalam mitigasi bencana BPBD yaitu DESTANA. Seperti yang terdapat dalam wawancara:

“Pelatihan buat warga desa belum ada, namun dirasa perlu karena kita daerahnya daerah sungai, sedangkan daerah pegunungan orang diadakan suatu pelatihan, kalau diberikan pelatihan kepada warga, jadi warga bisa tahu bagaimana cara antisipasi cepatnya sehingga dapat menyelamatkan warga. Jadi ya

harapannya warga di sekitar sungai dapat diberi pelatihan juga.”

b. Sosialisasi

Komunikator. Dalam menjalankan program DESTANA, sosialisasi merupakan kegiatan pertama yang dijalankan oleh BPBD kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa ada program yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana untuk menanggulangi bencana di daerah mereka.

Dalam wawancara, Pak Elbachtisar mengatakan bahwa ada sosialisasi yang diberikan kepada warga desa terkait bencana banjir.

“Pada saat pra bencana terdapat bidang kesiapsiagaan dan pencegahan, dimulai dengan sosialisasi dengan masyarakat yang terdampak” (Wawancara, Elbachtisar 09 November 2017).

Pak Elbachtisar mengatakan bahwa selain melakukan sosialisasi dengan berkomunikasi langsung dengan warga desa yang berada di kawasan rawan bencana.

Metode lain dalam sosialisasi juga disampaikan oleh Pak Chandra, yaitu tidak hanya melakukan sosialisasi dengan aparat desa, BPBD Kampar juga mensosialisasikan langsung kepada nelayan maupun warga desa setiap BPBD Kampar melakukan patroli di

sekitar bantaran sungai Kampar. Seperti pernyataan Pak Chandra:

“Hampir setiap hari BPBD mensosialisasikan jika sedang patrol” (Wawancara, Chandra 21 November 2017).

Pak Chandra juga menyampaikan jika ada bencana dan informasinya tidak sampai ke BPBD Kampar, maka masyarakat yang terdampak harus segera melapor kepada pemerintah dan BPBD Kampar agar bencana bisa segera ditanggulangi.

Pesan. Dalam melakukan sosialisasi terkait pencegahan resiko bencana, maka BPBD menyampaikan bahwa pentingnya mengetahui karakteristik bencana di masyarakat. Selain itu, materi yang diberikan dalam bentuk teori yaitu manajemen bencana, pemetaan, pembuatan kanal blocking serta bagaimana penyelamatan dasar menggunakan P3K.

Media. Media yang digunakan BPBD Kampar dalam melakukan sosialisasi yaitu menggunakan spanduk dan brosur-brosur terkait bencana banjir.

Komunikan. Senada dengan pernyataan terkait sosialisasi tidak hanya dilakukan dengan aparat desa namun juga mensosialisasikan langsung kepada nelayan maupun warga desa, Limin yang merupakan warga yang memiliki kerambah menanggapi hal tersebut:

“Sosialisasi sebelum terjadi banjir itu ada dilakukan kalau musim penghujan, pasti ada informasi dari PLTA atau pemerintah” (Wawancara Limin, 11 Februari 2018).

Setiap musim penghujan pasti selalu ada sosialisasi yang dilakukan BPBD kepada warga yang memiliki kerambah. Selain itu, warga juga mendapat informasi melalui alarm peringatan yang terdapat di bawah jembatan danau.

Feedback.

Terkait penggunaan media spanduk dan brosur dalam penyebaran informasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat, Sinam yang merupakan seorang pakar media komunitas dan isu kebencanaan menanggapi:

“Penyebaran terkait informasi bencana melalui spanduk-spanduk, harus diperhitungkan kembali apakah hal tersebut sudah efektif apa belum” (Wawancara Sinam, 16 Februari 2018).

Penyebaran informasi terkait bencana menggunakan media spanduk harus mempertimbangkan lagi berbagai aspek secara keseluruhan, seperti perhitungan mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam memproduksi spanduk, selama rentang waktu antara mendapat informasi pembukaan pintu, penyebaran informasi, dan terjadi banjir. Hal tersebut dinilai penting, karena produksi spanduk membutuhkan waktu lama, apakah kemudian spanduk bisa selesai jika dalam keadaan mendadak.

Selain itu, dalam memproduksi pesan informasi, juga perlu diperhatikan bahwa pesan yang terdapat dalam spanduk merupakan inti dari informasi dan jelas, bukan berarti di dalam spanduk seluruh informasi dituliskan secara panjang dan ukuran tulisan kecil, sehingga informasi yang seharusnya dibaca oleh warga menjadi tidak dibaca karena isi informasi yang sangat panjang. Dalam wawancara, Sinam menambahkan:

*“Perlu diperhatikan kembali apakah waktu dalam melakukan sosialisasi sudah tepat”
(Wawancara Sinam, 16 Februari 2018).*

Dalam melakukan sosialisasi kepada warga, pemerintah juga harus memperhatikan waktu yang tepat dalam melakukan sosialisasi, dimana sosialisasi tidak dilakukan pada saat jam kerja masyarakat, sehingga masyarakat yang datang pada saat sosialisasi hanya sedikit. Dalam melakukan sosialisasi, tidak harus selamanya masyarakat yang mengikuti jadwal dari pemerintah, namun akan lebih baik jika pemerintah yang mengikuti jadwal masyarakat. Sosialisasi tidak harus dilakukan secara formal di balai desa, namun sosialisasi juga bisa dilakukan dengan cara yang unik, seperti menonton film yang terkait dengan bencana serta penanggulangannya. Selain itu, pemerintah juga bisa melakukan sosialisasi dengan masuk ke dalam kegiatan rutin warga, seperti rapat RT, posyandu, maupun kegiatan desa lainnya. Dengan cara tersebut sudah dapat dipastikan akan banyak masyarakat yang datang. Selain itu, dengan sosialisasi masuk ke dalam

kegiatan rutin warga, pemerintah juga dapat menghemat pembiayaan, sehingga dana tersebut dapat dialokasikan ke dalam kegiatan penanggulangan bencana lainnya.

Dalam melakukan sosialisasi kepada warga dengan cara turun langsung kepada nelayan-nelayan yang memiliki kerambah, Sinam juga memberi tanggapan:

“Sosialisasi langsung dengan warga yang mempunyai kerambah dinilai sudah lumayan baik, namun lebih baik mengidentifikasi dan memilih warga yang dapat menjadi simpul informasi dan komunikasi warga, dimana informasi tersebut akan berjalan lebih cepat dan efektif selain kepada teman-temannya yang memiliki kerambah namun juga bisa ke warga lain yang tinggal di sekitar aliran sungai” (Wawancara Sinam, 16 Februari 2018).

Sosialisasi kepada warga mengenai bencana tidak harus selalu dilakukan oleh pemerintah, namun juga bisa dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengidentifikasi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dan yang dapat dipercaya dalam memberikan setiap informasi bencana. Sehingga, dalam satu daerah tersebut terdapat seseorang yang menjadi simpul informasi bencana yang terdapat di sekitar warga, sehingga jika ada pertanyaan yang terkait dengan bencana maka masyarakat cukup bertanya kepada seseorang yang dipercaya oleh pemerintah tersebut. Bisa dikatakan seseorang tersebut merupakan

kader sosialisasi kebencanaan di lapangan. Selain itu melakukan identifikasi dan memilih kader sebagai simpul informasi terkait bencana dinilai penting karena dalam melakukan sosialisasi kader dapat berbicara kepada warga dengan cara yang lebih santai dan dianggap tidak baku, selayaknya berbicara pada teman sehingga bisa dianggap lebih efektif.

c. Pelatihan

Setelah membahas teori pada kegiatan sosialisasi, maka selanjutnya diberikan pelatihan langsung kepada setiap relawan, mulai dari penggunaan p3k dasar hingga penggunaan alat transportasi seperti speedboat. Pelatihan mitigasi bencana dilakukan di desa terdampak dan desa yang sudah dipilih melalui seleksi dari BPBD Kampar.

Komunikator. Pelatihan yang diberikan yaitu berupa pelatihan teori dan praktik. Pak Elbachtisar menyampaikan dalam wawancara bahwa pelatihan teori dilakukan di salah satu hotel di kota selama seminggu, setelah itu dilakukan pelatihan praktik langsung di desa.

*“Pelatihan teori dilakukan dalam 1 minggu awal di salah satu hotel di daerah kabupaten, setelahnya pelatihan dilakukan di desa yang bersangkutan dalam bentuk teori dan praktek”
(Wawancara, Elbakhtisar 09 November 2017).*

Pelatihan diberikan kepada 20 relawan dalam satu desa, dimana relawan merupakan warga desa itu sendiri.

Pesan. Materi yang diberikan dalam bentuk teori yaitu manajemen bencana, pemetaan, pembuatan kanal blocking serta bagaimana penyelamatan dasar menggunakan P3K. Setelah pelatihan teori dilakukan, maka BPBD Kampar memberikan pelatihan berupa praktek, dimana setiap relawan mencoba bagaimana pembuatan pemetaan, kanal blocking, penggunaan p3k serta segala hal yang berkaitan dalam upaya penyelamatan utama saat banjir. Seperti pernyataan Pak Elbachtisar dalam wawancara:

“Pelatihan yang diberikan dalam bentuk praktik yaitu mereka turun dan melihat keseluruhan bentuk desanya” (Wawancara, Elbachtisar 09 November 2017).

Media. Media yang digunakan dalam memberikan pelatih kepada masyarakat yaitu dengan tatap muka langsung.

Komunikan. Pak Firmanah Putra dari staf kantor Desa Buluh Cina juga mengatakan bahwa ada pelatihan teori dan praktik, namun ia menyampaikan bahwa relawan yang tergabung dalam pelatihan terdapat sekitar 30 orang. Seperti pernyataan yang disampaikan Pak Firmana Putra dalam wawancara:

“Pelatihan teori diberikan dalam aula kantor desa, dan praktik langsung dilakukan di sungai” (Wawancara, Firmanah Putra 20 November 2017).

Pelatihan diberikan kepada aparat desa, pemuda desa, serta ninik mamak (orang yang dituakan dalam

satu daerah) yang terdapat di Desa Buluh Cina. Pelatihan teori yang diberikan berupa bagaimana cara penyelamatan barang-barang yang hanyut dan cara penyelamatan jika terdapat korban hanyut. Pelatihan praktik yang diberikan yaitu relawan diberikan kesempatan untuk belajar menggunakan bagaimana *speedboat* jika desa mendapat bantuan *speedboat* ketika banjir.

Feedback. Namun berbeda dengan pernyataan-pernyataan di atas, Bu Fitri mengatakan bahwa ia tidak mengetahui pelatihan apa yang diberikan oleh BPBD Kampar. Hal tersebut dikarenakan ia merasa bahwa mengikuti pelatihan terkait bencana banjir dianggap mubazir dan hanya membuang waktu saja.

“Istilahnya, orang di sini sudah biasa dengan banjir, jadi pergi pelatihan itu terasa mubazir karena berpikir mendingan kerja cari ikan dapat duit. Jadi istilahnya tidak ada hasil” (Wawancara, Fitri 20 November 2017).

Pelatihan memang diberikan kepada aparat desa, pemuda desa, serta ninik mamak (orang yang dituakan di desa), namun warga Desa Buluh Cina menganggap sudah mengerti apa yang harus dilakukan ketika banjir, dan lebih baik mencari ikan atau melakukan pekerjaan lain yang dapat menghasilkan uang daripada mengikuti pelatihan yang diberikan pemerintah. Bu Fitri mengatakan, bahwa oleh sebab itu maka pelatihan dibebaskan bagi siapa saja warga desa yang tertarik dan ingin ikut.

d. Simulasi

Setelah menjalani simulasi dan pelatihan, maka selanjutnya relawan diberikan simulasi langsung yang dilakukan di sungai. Simulasi dilakukan agar pada saat terjadi bencana, relawan sudah mengerti apa saja yang harus dilakukan untuk menanggulangi bencana. Selain itu, relawan juga menjadi perpanjangan tangan bagi BPBD. Tujuan dilakukannya simulasi lapangan yaitu agar relawan tahu bagaimana cara penyelamatan dari rumah warga menuju posko. Saat melakukan simulasi, pemerintah langsung ikut turun bersama relawan desa menjalankan simulasi sesuai dengan rencana penanggulangan yang telah dibahas saat sosialisasi maupun saat pelatihan. Kegiatan ini dianggap penting untuk melihat bagaimana kesiapsiagaan warga jika suatu waktu terjadi bencana.

Terkait dengan simulasi, Sinam memberi masukan:

“Seharusnya saat simulasi, sektor pemerintahan yang lain juga ikut turun melakukan simulasi sesuai dengan rencana kontigensi yang sudah disusun” (Wawancara Sinam, 16 Februari 2018).

Pak Sinam menjelaskan bahwa rencana kontigensi yang sudah disusun harus dijalankan saat melakukan simulasi pada masa prabencana. Hal tersebut dimaksudkan agar simulasi tersebut menjadi pengujian dan untuk melihat apakah rencana kontigensi yang sudah disusun oleh setiap dinas pemerintah yang

termasuk ke dalam sektor penanggulangan bencana sudah cocok apa belum dengan kondisi di masyarakat.

2. **Piket Siaga**

Program lainnya yang dilakukan pihak pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pengurangan resiko bencana yaitu piket siaga. Piket siaga merupakan program yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan dari pemerintah, stakeholders, dan relawan.

Komunikator. Piket siaga merupakan kegiatan rutin yang dilakukan BPBD, TNI, dan Polri saat pra bencana untuk mengetahui kondisi daerah yang sering terdampak bencana. Sebelum piket siaga dilakukan, biasanya BPBD dan pemerintah melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana mengenai bahaya bencana banjir dan bencana lainnya. Waktu dan lokasi piket siaga tidak dapat ditentukan kapan dan dimana, seperti yang disampaikan Pak Chandra dalam wawancara:

“Piket siaga mitigasi biasanya dilaksanakan pada saat pergantian musim (hujan-kemarau maupun kemarau-hujan), ketika momen seperti lebaran dan hari raya besar lainnya yang tingkat frekuensi jalan raya tinggi dan saat ada info pembukaan pintu air PLTA karena ini berhubungan langsung dengan kenaikan debit sungai” (Wawancara Chandra, 21 November 2017).

Lokasi piket siaga biasanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah yang sering terdampak bencana. Yang menjadi petugas saat piket siaga yaitu tim reaksi cepat dan

satuan tugas gabungan TNI dan Polri. Stakeholders maupun relawan tidak mengikuti piket siaga.

Dalam melakukan mitigasi bencana, BPBD dan pemerintah desa mengatakan bahwa belum ada sistem sister village yang dilakukan di setiap desa yang terdapat di daerah Kampar, baik saat terjadi bencana maupun tidak.

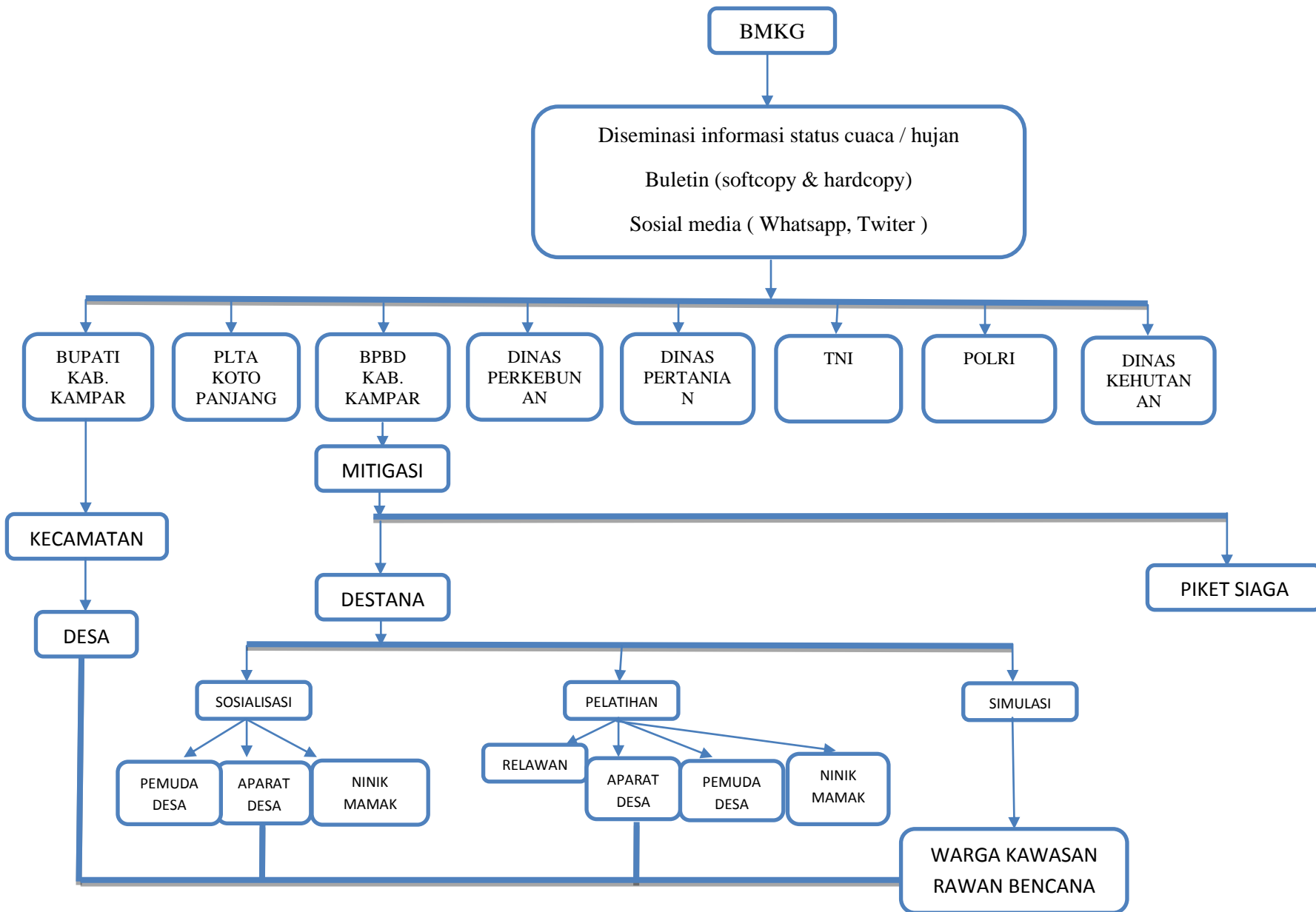
Feedback. Menurut Sinam hal tersebut merupakan suatu unsur yang penting dalam menangani kebencanaan.

”Seharusnya masyarakat sudah harus dikenalkan dengan sistem sister village, dimana tiap warga yang berada di kawasan rawan bencana baik pada saat bencana maupun tidak, menjalin hubungan keakraban layaknya seperti saudara sendiri, agar pada saat terjadi bencana tidak terjadi kecanggungan” (Wawancara Sinam, 16 Februari 2018).

Sister village menjadi opsi ketika banyak masyarakat yang terkena bencana memilih untuk menetap tinggal di rumah masing-masing daripada mengungsi di barak-barak pengungsian yang telah disediakan oleh pemerintah. Jika sister village dijalankan dengan baik, selama sebelum terjadi bencana terjadi hubungan yang sangat baik layaknya saudara sendiri, maka pada saat terjadi bencana dan masyarakat memilih untuk tinggal di desa saudara, maka tingkat kecanggungan akan sedikit berkurang. Juga jika bencana terjadi dalam waktu yang cukup lama, maka masyarakat yang memberikan tumpangan akan menganggap bahwa masyarakat yang menginap di rumah mereka merupakan saudara sendiri.

Tabel 3.3 Alur Komunikasi Saat Masa Normal

No.	Alur Komunikasi	Media	Pesan
1.	BMKG Pekanbaru kepada stakeholder	Buletin (softcopy & hardcopy), Media sosial (Whatsapp, Twitter)	Prakiraan cuaca Bulanan & persepuluh hari
2.	BPBD Kampar dengan relawan, aparat desa, pemuda desa, ninik mamak	Langsung (sosialisasi, pelatihan dan simulasi)	Mitigasi bencana
3.	Dinas Sosial dengan warga terdampak	Langsung	Pencatatan kerugian
4.	BPBD (Bidang RR) dan relawan dengan warga	Langsung	Pencatatan kerugian
5.	Warga kepada pemerintah desa	Data	Pelaporan kerugian dan kerusakan
6.	Dinas Kesehatan dengan warga	Langsung, posyandu	Pengecekan kesehatan



Bagan 3.1 Model Komunikasi Bencana Masa Normal

B. Komunikasi saat bencana

1. Pemberian Informasi & Koordinasi

Pada saat bencana terjadi, pemerintah kabupaten bertindak sebagai pemberi informasi serta komando kepada para stakeholder dan relawan desa. Dalam menanggulangi bencana, sebuah komunikasi merupakan salah satu aspek yang penting agar tujuan dalam mengurangi bencana dapat tercapai oleh setiap badan yang terkait dalam penanggulangan bencana. Dalam penanggulangan bencana Kabupaten Kampar, baik instansi-instansi yang berasal dari pemerintah maupun yang bukan, saling berkoordinasi dan bekerjasama agar proses dalam menanggulangi bencana dapat berjalan lebih cepat dan baik.

Informasi awal saat bencana terjadi berasal dari BMKG Pekanbaru, dimana BMKG memiliki tugas dalam memberikan prakiraan cuaca kepada setiap instansi-instansi yang terkait dalam penanggulangan bencana, baik prakiraan cuaca bulanan, harian maupun prakiraan cuaca dalam jangka pendek, seperti pernyataan pak Slamet yang merupakan Kepala BMKG Pekanbaru:

“Untuk dalam jangka pendeknya, kita memiliki radar, radar ini berupa kondisi awan yang ada potensi hujan yang selalu update, jadi salah satunya kita juga membangun sistem mews (metrogical early warning sistem)” (Wawancara, Pak Slamet Ryadi, 01 Desember 2017).

BMKG akan memberikan *warning* (peringatan) terkait hujan sekitar setengah jam sampai satu jam sebelum hujan turun. Dalam hal ini *warning* disampaikan jika hujan akan turun dalam jumlah besar dan disertai petir. Peringatan tersebut berisi terkait hujan terjadi di wilayah mana, dan jam berapa. Pak Slamet Riyadi juga menambahkan

bagaimana alur informasi yang dilakukan dalam memberikan peringatan terkait perubahan cuaca mendadak.

“Komunikasinya kita mulai dari whatsapp grup, seperti grup siaga bencana bpbd, grup media, dan lain-lain itu selalu kita broadcast mengenai prediksi satu jam sebelum hujan. Juga kita upload di twitter @bmkgpku” (Wawancara, Pak Slamet Ryadi, 01 Desember 2017).

Penggunaan media sosial seperti whatsapp yang digunakan dalam menyampaikan informasi terkait bencana banjir hanya dilakukan antar instansi dan stakeholder yang didalamnya berisi para pemangku kepentingan. Diharapkan informasi yang sudah disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan dapat disampaikan langsung kepada warganya. Selain itu, informasi terkait bencana yang disebar di grup whatsapp, diharapkan bahwa informasi tersebut dapat berjalan seperti efek bola salju, dimana informasi terkait bencana semakin di sebarluaskan kepada setiap pihak.

Selanjutnya, jika para pemangku kepentingan sudah mendapatkan informasi tersebut, maka mereka akan mengkomunikasikan berita tersebut melalui telepon dengan perangkat desa setempat seperti kades dan RT, dan bertanggungjawab menyampaikan pesan kepada warganya, dikarenakan sebagian besar warga tidak familiar dengan media sosial.

Pak Slamet menjelaskan bahwa yang memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan pesan terkait bencana merupakan petugas operasional yang sedang bekerja pada saat itu.

“Jadi broadcaster on duty ini bekerja 24 jam dalam 3 shift, setiap ada perkiraan hujan lebat atau cuaca

ekstrim mereka yang bertanggungjawab memberikan warning” (Wawancara Pak Slamet Ryadi, 01 Desember 2017).

Pernyataan-pernyataan tersebut dikonfirmasi oleh pihak PLTA Koto panjang bahwa, PLTA bergantung kepada BMKG. Seperti yang dinyatakan Pak Iwan dalam wawancara:

“Bmkg hari ini ngasih info ada kemungkinan hujan dan lain-lain ya itu jadi pertimbangan untuk operasionalnya plta” (Wawancara Pak Iwan,30 November 2017).

Dalam mengkomunikasikan bencana, BMKG merupakan awal penyebaran informasi. Setelah mendapat informasi mengenai prakiran cuaca, maka PLTA bisa mempertimbangkan operasional dalam menjaga level air yang terdapat dalam PLTA Koto Panjang. Ketika menerima pesan dari BMKG Pekanbaru, dijelaskan bahwa yang bertanggungjawab dalam menerima pesan yaitu supervisor. Setelah mendapat informasi terkait prakiraan cuaca baik itu bulanan, harian maupun cuaca yang diberikan mendadak, pihak PLTA tidak serta-merta bebas dalam membuka dan menutup pintu spillway jika ketinggian air dalam dam naik secara drastis.

Dalam membuka maupun menutup pintu spillway, PLTA mempunyai SOP (Standar Operasional Prosedur). Dalam membuka pintu spillway, petugas operasional juga harus mengkomunikasikan kepada yang bertanggungjawab. Seperti dijelaskan dalam wawancara:

“Jadi sebelum kita membuka pintu spilway, komunikasi yang pertama adalah memberitahukan manager pl sektor pekanbaru secepatnya, biasanya via telpon, lalu barulah nanti dibuatkan surat izin

pemberitahuan kepada bupati ditempat plta ini berada” (Wawancara Pak Iwan, 30 November 2017).

Setelah mengkomunikasikan terkait perizinan pembukaan pintu spileway, dan mendapat izin, maka pihak PLTA bertanggungjawab memberi informasi terkait pembukaan pintu spileway yang akan dilakukan kepada pemerintah kabupaten, dalam hal ini Bupati Kampar. Informasi terkait pembukaan spileway, secara formal pihak PLTA akan memberikan surat kepada Bupati, seperti pernyataan dalam wawancara

“Setelah surat ini sampai ke bupati, itu tembusannya banyak, mulai dari yang paling dekat kita ini adalah wali desa (kepala desa) rantau ini, sampai ke wali desa sepanjang sungai, kemudian kapolsek, kapolres, korem, pokoknya lembaga instansi, dinas peternakan, perikanan, bpbd” (Wawancara Pak Iwan, 30 November 2017).

Di dalam surat tersebut juga terdapat tembusan kepada instansi-instansi terkait yang tergabung dalam bidang kebencanaan dan juga terdapat lampiran yang berisi pengumuman kepada masyarakat. Di dalamnya dijelaskan bahwa pembukaan pintu akan dilakukan pada hari apa dan jam berapa. Yang bertanggungjawab dalam memberikan pesan saat formal yaitu pt pln persero sektor pembangkitan pekanbaru, namun dalam hal ini surat dibuat di PLTA Koto Panjang, dan di tandatangani oleh manager PL PLTA Koto Panjang.

Selain memberikan informasi terkait pembukaan pintu spileway melalui surat, pihak PLTA juga memberikan informasi tersebut melalui telepon kepada Bupati Kampar. Selain memberikan

informasi terkait pembukaan pintu spillway kepada Bupati Kampar, pihak PLTA juga menginformasikan kepada setiap stakeholders melalui grup whatsapp, bahwasanya akan dilakukannya pembukaan pintu spillway oleh pihak PLTA yang menyebabkan akan berdampak ke masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara

“Sekarang lebih mudahnya itu, teman-teman masih dalam perjalanan mengantarkan surat, foto surat juga sudah bisa kita sampaikan karena sudah ada media sosial, kalau dulu kan tidak, jadi surat itu harus sampai dulu” (Wawancara Pak Iwan, 30 November 2017).

Pak Iwan juga menambahkan bahwa, dalam memberikan informasi tersebut, petugas operasional yang bekerja pada saat itu yang bertanggungjawab dalam memberikan informasi tersebut. Dalam memberikan informasi terkait pembukaan pintu spillway, pihak PLTA juga menginformasikan melalui radio dan media, hal ini diharapkan agar informasi dapat langsung diterima oleh masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. Seperti yang dinyatakan dalam wawancara

“Media sangat membantu, jadi misalkan kita sudah mulai tinggi elevasi, rekan-rekan media datang kesini dan konfirmasi ke kita minimal kalau mereka tidak sempat kesini mereka via telpon menanyakan bagaimana kondisi air disini” (Wawancara Pak Iwan, 30 November 2017).

Manager PL PLTA Koto Panjang juga menjadi gerbang dalam menyampaikan informasi terkait kondisi waduk terkini, agar masyarakat mengetahui apakah air di waduk masih aman, waspada atau sudah siaga.

Informasi yang diberikan oleh PLTA Koto Panjang baik melalui surat maupun media sosial, kemudian diterima oleh instansi-instansi yang bergerak dalam bidang kebencanaan, termasuk PUSDALOPS (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana). Maka, PUSDALOPS dalam hal ini satgas tanggap reaksi cepat bertugas untuk melakukan survey dan monitoring langsung di kawasan rawan bencana, untuk melihat bagaimana keadaan daerah tersebut. Seperti yang dinyatakan dalam wawancara:

“Sejak dibentuk Pusdalops 2016, berjalan 2017 Januari malah berjalan lebih cepat, karena ada satgas tanggap reaksi cepat, begitu dapat informasi mereka langsung survey, monitoring” (Wawancara Chandra, 21 November 2017).

Saat di lapangan satgas tanggap reaksi cepat juga bertanggung jawab dalam mengecek lapangan, dalam hal ini mengumpulkan data mengenai berapa KK, dan berapa anak usia sekolah. Nantinya, PUSDALOPS bisa mengambil tindakan terkait bantuan apa saja yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak, termasuk di dalamnya paket sembako dan paket sekolah. Pak Chandra menambahkan bahwa PUSDALOPS menerima informasi terkait air yaitu 3-4 hari sebelum waduk terisi penuh atau overload.

Selain itu, tidak ada yang diberi tanggungjawab dalam memberikan laporan terkait survey yang sudah dilakukan oleh satgas tanggap reaksi cepat. Menurut Pak Chandra, laporan tersebut bersifat otomatis, dalam hal ini dimaksudkan setiap petugas tanggap reaksi cepat yang mengecek ke lapangan dapat memberikan informasi maupun laporan. Laporan mengenai keadaan daerah tersebut

dilaporkan kepada Kabid. Kedaruratan dan Logistik, yang diteruskan kepada Kepala Pelaksana. Namun, selain menyampaikan pesan secara formal, informasi yang berisi laporan dan dokumentasi mengenai keadaan daerah tersebut juga bisa disampaikan melalui grup Whatsapp yang di dalamnya sudah termasuk Kepala Pelaksana BPBD.

Setelah memberi laporan kepada Kepala Pelaksana, maka Kepala Pelaksana akan memberikan petunjuk untuk melakukan tanggap darurat kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dan diteruskan kepada anggota Bidang Kedaruratan dan Logistik. Setelah memberikan informasi, maka langkah selanjutnya yaitu Kabid. Kedaruratan dan Logistik melakukan koordinasi bersama Kepala Seksi Logistik, mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam proses menanggulangi bencana sesuai dengan laporan dari hasil survey yang telah dilakukan satgas tanggap reaksi cepat, termasuk di dalamnya persiapan peralatan-peralatan.

Pak Elbachtisar juga menjelaskan bahwa ketika gejala sudah tampak dan informasi mengenai bencana sudah dilaporkan oleh satgas tanggap reaksi cepat, maka BPBD juga bertanggungjawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekitar kawasan bencana melalui brosur dan spanduk-spanduk mengenai informasi bencana. Dalam melakukan koordinasi awal, BPBD memiliki 2 cara dalam melakukan koordinasi dalam menanggulangi bencana banjir bersama stakeholder, yaitu secara formal dan non formal.

Koordinasi yang dilakukan secara formal yaitu dengan mengadakan rapat dimana terdapat SK dari Bupati dan terdapat tim satuan tugas gabungan. Selain melakukan koordinasi dengan cara formal, BPBD juga melakukan koordinasi secara non formal bersama tim satuan tugas gabungan yaitu dengan berkomunikasi melalui telepon, grup Whatsapp, dan radio. Setelah melakukan koordinasi dan

memenuhi semua kebutuhan dan peralatan yang dibutuhkan dalam menanggulangi bencana, maka personil yang terdiri dari Bidang Kedaruratan dan logistik langsung menuju lokasi bencana, termasuk didalamnya satgas tanggap reaksi cepat yang berada dibawah PUSDALOPS.

Terkait pernyataan mengenai pelaporan informasi terkait hasil monitoring dan kebencanaan yang dilakukan melalui media grup Whatsapp, Pak Sinam memberi tanggapan:

“Yang dilakukan Pusdalops dan pemerintah dalam memberi dan menyampaikan pelaporan melalui grup Whatsapp dianggap sudah baik, namun harus diperhatikan kembali bahwa tidak ada oknum yang menyebar berita yang kurang bermutu” (Wawancara Sinam, 16 Februari 2018).

Langkah pemerintah dalam melakukan komunikasi terkait pelaporan kebencanaan melalui grup Whatsapp merupakan suatu kemajuan yang lumayan baik, karena pesan terkait bencana akan diketahui lebih efektif oleh setiap instansi tanpa harus menunggu surat. Namun, komunikasi yang dilakukan melalui grup Whatsapp juga memiliki kelemahan, yaitu adanya informasi yang tidak benar atau hoax. Tidak dapat dipungkiri, dalam sebuah grup Whatsapp pasti akan terdapat oknum yang menyebar berita yang tidak benar. Maka setiap orang yang terdapat di dalam grup terutama yang bergerak dalam bidang kebencanaan, harus mampu memastikan bahwa informasi terkait bencana yang diterima merupakan informasi yang akurat.

Setelah pemerintah dan instansi-instansi terkait yang bergerak di bidang kebencanaan memberikan dan menyebarkan informasi kepada setiap Kepala Desa, maka selanjutnya Kepala Desa wajib memberikan maupun menyebarkan informasi tersebut kepada seluruh

warganya. Seperti yang dinyatakan oleh Pak Firmana dalam wawancara:

“Yang menjadi penanggungjawab dalam menerima pesan biasanya langsung Kepala Desa, alur komunikasi bergerak dari Kepala Desa, kemudian diinformasikan ke setiap mesjid-mesjid melalui toa” (Wawancara Firmana, 20 November 2017).

Informasi terkait bencana banjir dan pembukaan pintu spillway tidak hanya didapat dari Kepala Desa saja, namun informasi tersebut juga didapat dari kerabat-kerabat yang tinggal di luar Desa Buluh Cina dan sudah terkena dampak sebelumnya. Hal tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Bu Erawati yang merupakan warga Desa Buluh Cina, seperti yang terdapat dalam wawancara:

“Ada peringatan, diberi tahu oleh kepala desa dengan menggunakan mikrofon dan menggunakan sampan berkeliling di aliran sungai pinggir desa, menginformasikan untuk berhati-hati, bahwa air tambah naik” (Wawancara Erawati, 20 November 2017).

Bu Erawati juga menambahkan bahwa pengumuman terkait pembukaan pintu spillway yang dilakukan PLTA dilakukan pada siang hari, dimana pada tahun 2016 banjir naik pada tengah malam.

Pernyataan terkait pemberian informasi bencana yang dilakukan oleh Kepala Desa maupun aparat desa melalui TOA juga dikonfirmasi oleh Bu Fitri yang juga merupakan warga Desa Buluh Cina, seperti pernyataan yang terdapat dalam wawancara:

“Dalam menginformasikan bencana, terkadang melalui telpon, mulut ke mulut, atau toa mushalla” (Wawancara Fitri, 20 November 2017).

Alur informasi terkait bencana banjir yang berasal dari Kepala Desa selanjutnya diteruskan kepada setiap Kepala Dusun, kemudian diteruskan ke RT dan RW. Pemberian informasi tersebut dilakukan secara langsung maupun secara telepon kepada setiap aparat desa. Selain melelalui telpon, mulut ke mulut dan toa mushala, informasi terkait bencana juga didapat dari berita-berita yang terdapat di televisi, keluarga dari warga yang tinggal di luar Desa Buluh Cina yang lebih dulu mengetahui informasi tersebut. Menurut Bu Fitri, di Desa Buluh Cina ini masih sangat terasa kekeluargaannya, jika ada salah satu warga yang mendapat berita terkait bencana banjir yang akan datang, maka informasi tersebut akan disebarakan, karena bagi Bu Fitri seluruh warga di sini mengerti dan sama-sama merasakan bagaimana rasanya jika banjir datang.

Bu Fitri juga menambahkan bahwa biasanya informasi terkait pembukaan pintu spillway diterima sekitar 2 hari sebelum air naik, hal itu dikarenakan kenaikan air yang secara bertahap dan berdasarkan pembukaan pintu spillway yang dilakukan. Namun, disisi lain Bu Erawati juga menyatakan keluhan terkait pemberian informasi bencana, seperti terdapat dalam wawancara:

“Peringatan dini terkadang tidak sampai ke warga dusun IV, namun masyarakat lebih banyak mendapat informasi dari keluarganya yang sudah mendapat kabar terlebih dahulu” (Wawancara Erawati, 20 November 2017).

Pada saat banjir datang, pemerintah desa juga melakukan komunikasi kepada BPBD dengan memberitahukan apa saja keperluan yang dibutuhkan desa. Seperti dinyatakan dalam wawancara:

*“Komunikasi yang dilakukan pihak desa kepada BPBD, satgas yang tergabung melalui telfon maupun wa seperti meminta pengiriman alat, menyediakan dapur umum, meminta bantuan anggota”
(Wawancara Firmana, 20 November 2017).*

Desa Buluh Cina merupakan desa yang terkena banjir paling terakhir dan terendam paling lama dibandingkan dengan desa-desa lain yang berada di Kabupaten Kampar, maka hal tersebut juga membuat Desa Buluh Cina membutuhkan persediaan yang lebih banyak dibanding dengan desa-desa lain yang juga terdampak banjir. Pak Firman menambahkan bahwa tidak terdapat masalah pada alur komunikasi dengan pemerintah terkait informasi saat terjadi bencana, namun ia mengatakan bahwa bantuan yang datang ke Desa Buluh Cina datang sedikit agak terlambat.

Banjir tanpa diduga, seperti air meluap dengan sangat cepat pernah terjadi pada 2016 awal, dimana pada pagi hari pemerintah telah mengimbau kepada warga yang berada dekat dengan bendungan dan merupakan lintasan dari sungai Kampar, bahwasanya saat itu sudah berstatus siaga, dan mengimbau kepada warga untuk menyiapkan diri dan menyelamatkan harta benda. Namun karena pada tengah malam air meluap dengan sangat cepat dan banyak. Saat itu PLTA sesuai pertimbangan dan SOP segera membuka pintu yang menyebabkan terjadinya banjir mendadak. Seperti yang dijelaskan oleh pihak PLTA:

“PLTA itu mendatanya di inflow waduk, inflow waduk paling besar itu di 2016 awal. Jadi air yang dari hulu itu memang sangat-sangat besar,

perjamnya itu bisa ribuan meter kubik/detik. Satu jam itu kalau rata-rata sih 2500 meter kubik/detik, jadi kenaikan elevasi itu terlihat” (Wawancara Iwan, 30 November 2017).

Pada saat itu terjadi kenaikan air drastis, jika standarnya terjadi di angka 268 atau diangka 300 meter kubik/detik, maka pada saat itu air sudah ribuan meter kubik/detik, sehingga hal tersebut sudah di luar kehendak PLTA. Pak Iwan mengatakan, dam itu luas dan dalam, namun pada saat itu jika kita berdiri saja di dam maka terlihat kenaikan air yang sangat drastis.

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Pak Akmal yang merupakan salah satu Kepala Dusun di Desa Godang, mengatakan bahwa banjir terjadi pada pukul 00.30 dini hari dan warga tidak mendapat informasi sebelumnya karena kejadian tersebut terjadi secara mendadak. Seperti pernyataan yang terdapat dalam wawancara:

“Kejadian terjadi pukul 1 tengah malam dan tidak ada himbauan dari pemerintah sebelumnya, namun air sudah terlihat naik” (Wawancara Akmal, 15 November 2017).

Pada siang air sudah kelihatan naik, maka pada malam hari Pak Akmal beserta pemuda desa memutuskan untuk tidak tidur dan berjaga-jaga untuk menyelamatkan dan membangunkan warga. Pak Khoirul yang juga merupakan warga Desa Godang mengatakan hal yang sama:

“Banjir mendadak terjadi tengah malam, air mendadak langsung pasang ke daerah sini melewati anak sungai Kampar, meluap” (Wawancara Khoirul, 15 November 2017).

Berbeda dengan sebelumnya, pada 2016 warga tidak mendapat peringatan yang berasal dari alarm yang berada di bawah jembatan.

Sebelumnya, warga dapat mengetahui kenaikan air dari alarm peringatan tersebut jika status air sudah menunjukkan status siaga maupun waspada.

Setelah membaca alur informasi dan komunikasi diatas, Sinam menambahkan beberapa hal yang harus diperhatikan kembali oleh BPBD dan pemerintah:

“Perlu diidentifikasi kembali terkait titik-titik kumpul, simpul warga, yang menjadi sumber informasi warga, identifikasi perangkat komunikasi dan informasi warga dan pelaku komunikasi, kemudian membangun sistem setelah semuanya diidentifikasi” (Wawancara Sinam, 16 Februari 2018).

Dalam melakukan komunikasi dan informasi kepada masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, pemerintah perlu mengidentifikasi dan memastikan media apa yang sangat memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat terhubung dengan cepat dalam mengkomunikasikan informasi bencana, serta memilih seseorang sebagai sumber informasi yang valid untuk warga, agar tidak terjadi penyebaran informasi yang simpang-siur yang kemudian dapat menimbulkan efek buruk bagi warga dikawasan rawan bencana. Perlunya memilih seseorang yang dapat menjadi sumber informasi bagi warga, karena dibutuhkan seseorang yang dapat menjadi penghubung yang cepat antara pemerintah dan warga.

“Struktur komunikasinya jangan terlalu panjang, jadi kalau bisa ini ada yang lebih cepat dan ada juga orang-orang yang mempertemukan ini semua. Dalam mendesain komunikasi dan informasi juga harus dilakukan pengandaian” (Wawancara Sinam, 16 Februari 2018).

Sinam mengatakan bahwa pengandaian sangat perlu dilakukan dalam menanggulangi bencana jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti listrik mati dan BTS (Base Transceiver Station) roboh, maka signal dalam melakukan komunikasi melalui grup Whatsapp akan otomatis terhambat. Maka perlu kembali dipikirkan media apa yang dapat digunakan secara efektif. Selain itu, Sinam juga menyarankan bahwa pemerintah menyediakan satu radio di setiap desa yang menjadi kawasan rawan bencana, yang tidak memerlukan listrik dalam penggunaannya, dan selalu aktif agar jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, maka masyarakat dapat mengetahui informasi tersebut melalui radio.

Tabel 3.4 Alur Komunikasi Masa Tanggap Darurat

No.	Alur Komunikasi	Media	Pesan
1.	BMKG Pekanbaru kepada stakeholder	Whatsapp, telpon, surat	Laporan perubahan cuaca
2.	PLTA Koto Panjang dengan Manajer Sektor PL Pekanbaru	Surat, whatsapp, telpon	Koordinasi izin pembukaan pintu
3.	PLTA Koto Panjang kepada Bupati Kampar dan tembusan	Surat resmi, Whatsapp	Informasi tentang pembukaan pintu
4.	Pusdalops kepada BPBD Kampar	Whatsapp, radio, HT	Laporan survey lokasi bencana
5.	Kabid. Kedaruratan dan Logistik dengan Kalaksa BPBD Kampar	Langsung, telpon	Koordinasi bencana

6.	PLTA kepada Kepala desa	Surat, telpon	Informasi tentang pembukaan pintu
7.	Kepala desa kepada warga	Toa mushala, berkeliling desa	Informasi tentang air naik dan pembukaan pintu

2. Kedaruratan dan Logistik

Pada saat mendapat informasi terkait bencana dan petunjuk dari kepala daerah, maka kedaruratan dan logistik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak, seperti tenda pengungsi dan dapur umum. Seperti yang dijelaskan oleh pak Elbakhtisar dalam wawancara:

“Misalnya, siapkan tenda pengungsi, dan dapur umum. Misal jembatan putus, maka disiapkan jembatan darurat, tidak berbentuk permanen. Intinya bagaimana aktivitas dan kebutuhan sementara bisa teratasi” (Wawancara Elbakhtisar, 09 November 2017).

Pemenuhan kebutuhan warga yang berada di kawasan rawan bencana merupakan satu bagian utama yang sangat penting, agar koordinasi antara pemerintah, stakeholders, dan masyarakat di sekitar kawasan bencana dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dijelaskan juga bahwa pada saat bencana, relawan yang tergabung dalam program desa tangguh bencana, juga menjadi tangan kanan pemerintah jika pemerintah terlambat datang. Pak Elbachtisar menambahkan, saat

tanggap darurat yang menjadi penanggungjawab ialah Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, namun secara keseluruhan tanggungjawab berada di Kepala Pelaksana BPBD Kampar.

Dalam pemenuhan kebutuhan warga, Pak Chandra juga mengatakan bahwa pada saat terjadi bencana biasanya setiap instansi membangun posko masing-masing untuk penanganan masyarakat terdampak bencana seperti, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, TNI, POLRI, bahkan PLN juga turut membangun posko. Seperti yang terdapat dalam wawancara:

“Masing-masing instansi membuat posko sendiri dan pekerjaan di lapangan pada saat bencana sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi. BPBD, Dinsos melaksanakan kegiatan kebencanaan dan rescue dibantu TNI, Polri melaksanakan penegakan hukum dan pengamanan, Dinkes membuka tenda puskesmas untuk korban, kira-kira seperti itu gambarannya” (Wawancara Chandra, 21 November 2017).

Ditambahkan juga oleh Pak Chandra mengenai rantai komando saat tanggap darurat bencana:

“Untuk rantai komando saat ini, jika saat terjadi bencana lingkupnya kabupaten, biasanya itu bupati sebagai kepala daerah tentu dia sebagai kepala tertinggi untuk memantau kebencanaanya” (Wawancara Chandra, 21 November 2017).

Kepala Pelaksana BPBD berada di bawah Wakil Komandan Satgas Bupati yaitu, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kapolres, Komandan Kodim, dan Danyon. Pak Elbachtisar juga menginformasikan stakeholder-stakeholder saat tanggap darurat bencana:

“Stakeholder BPBD Kabupaten Kampar yaitu TNI, Polri di lokasi seperti Babinsar dan Babin Kamtibmas, Dinas Sosial, aparat desa, relawan dan masyarakat” (Wawancara Elbakhtisar, 09 November 2017).

Selain bantuan yang berasal dari instansi-instansi pemerintahan, tanggap darurat bencana juga mendapat bantuan yang berasal dari luar pemerintah. Seperti yang dijelaskan Pak Chandra dalam wawancara:

“Bahkan saat banjir di wilayah kabupaten, banyak CSR dari perusahaan, masyarakat pribadi, maupun dari organisasi masyarakat” (Wawancara Chandra, 21 November 2017).

Bantuan-bantuan yang berasal dari luar pemerintah tersebut membantu mempermudah tim satgas gabungan dalam menanggulangi bencana dikarenakan bantuan-bantuan yang berasal dari luar tersebut datang dengan menawarkan bantuan tanpa diminta seperti bantuan tenaga, pakaian dan makanan.

Pada saat BPBD dan stakeholders mendapat informasi dari PLTA bahwasanya pintu air dibuka dan laporan yang masuk dari masyarakat bahwa pemukiman mereka terdampak banjir dari pembukaan pintu tersebut, maka TRC bergerak cepat membantu dan menyiapkan posko untuk mengevakuasi warga termasuk di dalamnya membangun tenda, menyiapkan logistik, dan membantu mengevakuasi warga.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Pak Akmal:

“Pemerintah sigap, pagi itu kami sudah mendapatkan makanan meskipun yang diperuntukkan terutama bagi anak-anak, dan pada malam itu BPBD datang dengan perahunya dan membantu mengevakuasi warga” (Wawancara Akmal, 15 November 2017).

Tidak hanya Pak Akmal, pernyataan tersebut juga dikonfirmasi oleh Pak Khoirul seperti yang terdapat dalam wawancara:

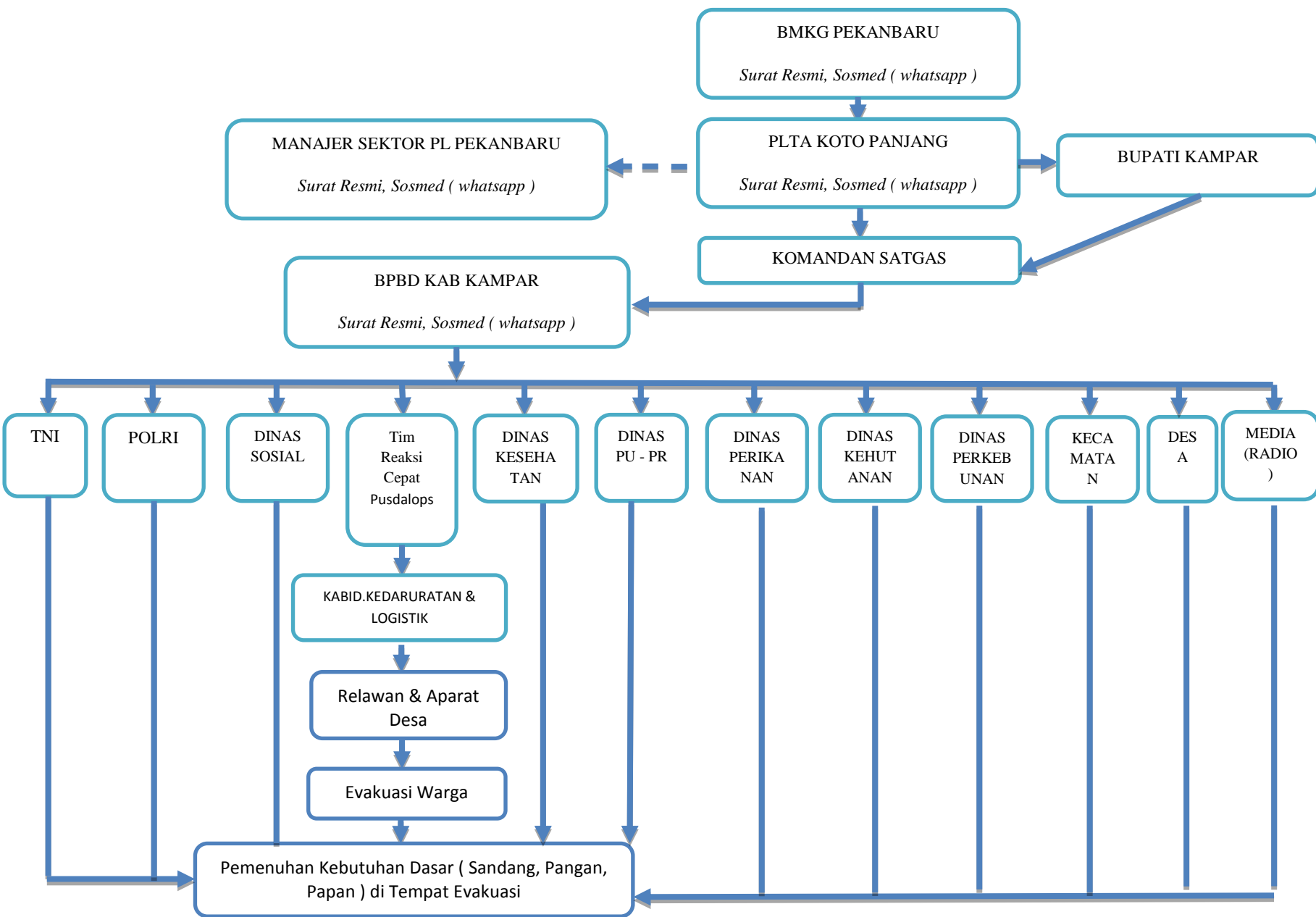
“BPBD sempat membantu menyelamatkan warga dan mengungsikan menggunakan perahu karet pada malam itu dan membawa ketempat pengungsian” (Wawancara Khoirul, 15 November 2017).

Namun, hal berbeda dinyatakan oleh Bu Asiah, yang merupakan warga Desa Kampung Terendam, yang menyatakan bahwa pada saat terjadi bencana tidak ada bantuan evakuasi oleh pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, semua dilakukan masing-masing oleh warga.

“Tidak ada yang datang mengecek dan tak ada bantuan dari kepala desa atau pemerintah, semuanya dikerjakan sendiri. Kalau bertahan ya bertahan di lantai atas, kalau air sudah lebih naik baru mengungsi tempat anak yang tidak banjir” (Wawancara Asiah, 16 November 2017).

Selain mempersiapkan pemenuhan kebutuhan dasar warga di kawasan bencana, pemerintah beserta aparat desa juga melakukan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mengungsi di posko yang telah dipersiapkan oleh pemerintah. Seperti yang dinyatakan Pak Firman dalam wawancara:

“Desa juga menghimbau untuk mengungsi dan menyediakan posko” (Wawancara Pak Firman, 20 November 2017).



Bagan 3.2 Model Komunikasi Masa Tanggap Darurat

3. Respon dan Perilaku Warga

Pada saat banjir terjadi, seluruh akses di Desa Buluh Cina terputus, jadi setiap warga yang ingin keluar rumah menggunakan perahu, selain itu juga dijelaskan bahwa warga tidak ingin mengungsi dikarenakan banjir sudah bukan menjadi hal yang menakutkan lagi bagi warga Buluh Cina, karena Desa Buluh Cina sudah menjadi jatah atau langganan banjir setiap tahunnya. Bencana banjir yang terjadi di awal tahun 2016, setelah diberikan himbuan untuk mengungsi, hanya terdapat sekitar 2 orang yang mengungsi di posko yang telah disediakan, hal tersebut dikarenakan ketinggian air di rumah mereka sudah mencapai 3 meter. Banjir yang terjadi di awal tahun 2016 di Kabupaten Kampar merupakan banjir yang besar kedua setelah sekitar 10 tahun lalu.

Pak Firmana juga menambahkan bahwa warga Desa Buluh Cina memilih untuk tetap tinggal dirumah dibandingkan mengungsi di posko dan tempat yang lebih aman. Pada saat banjir di Desa Buluh Cina, warga desa merasa banjir menimbulkan dampak yang positif dan negatif. Seperti yang terdapat dalam wawancara

“Positifnya yaitu terdapatnya pertukaran air di danau, jadi untuk reproduksi ikan juga membutuhkan air yang segar, kalau air naik biasanya setelah itu ikan kembali banyak di danau. Para nelayan juga mendapatkan hasil yang banyak” (Wawancara Firmana, 20 November 2017).

Dijelaskan, sebagian besar warga Desa Buluh Cina bekerja sebagai nelayan, sehingga pada saat banjir air naik, maka warga yang bekerja sebagai nelayan akan mendapat ikan lebih banyak dan mudah, selain itu juga penghasilan yang didapat setelah ikan dijual juga lebih besar. Hal tersebut yang menjadi alasan warga Desa Buluh Cina

mengapa memilih untuk menetap di rumah dibanding mengungsi. Pernyataan tersebut bahkan dikonfirmasi oleh Bu Fitri yang merupakan warga Desa Buluh Cina dan tinggal persis di pinggir sungai.

“Jika disuruh ngungsi tidak ada yang mau mengungsi, karena disini kebanyakan kerjanya nelayan, jadi alasannya kalau banjir datang itu maka ikan banyak, sehingga mencari ikan ketika banjir menjadi lebih mudah” (Wawancara Fitri, 20 November 2017).

Dijelaskan juga, bahwa ketika banjir terjadi dan masuk ke dalam kediaman warga, maka otomatis pintu rumah tidak bisa dikunci. Maka alasan lain yang diberikan warga untuk tidak mengungsi ialah tidak mau mengungsi karena ingin menjaga barang, karena selama banjir rumah tidak bisa dikunci, jadi takut paerabotan hilang atau hanyut, meski hal tersebut sangat jarang terjadi. Saat air datang, warga di Desa Buluh Cina sudah mengerti apa yang harus dilakukan.

“Karena sudah dari dulu terkena banjir jadi sudah mengerti sendiri apa yang mau diperbuat, tidak perlu menunggu kabar ini, tidak perlu harus seperti ini, sudah kesadaran masing-masing, makanya jika disuruh ngungsi tidak mau mengungsi” (Wawancara Fitri, 20 November 2017).

Tidak hanya Bu Fitri, Bu Erawati yang juga tinggal di pinggir sungai juga mengatakan hal yang sama:

“Saat banjir warga lebih gampang untuk mendapatkan ikan, karena pada saat banjir air sungai meluap dan ikan juga menyebar kemana-mana” (Wawancara Erawati, 20 November 2017).

Ketika mendapat informasi terkait pembukaan pintu spillway oleh PLTA, maka seluruh warga sudah mulai berjaga-jaga dan

mengamankan barang seperti berkas-berkas, dan juga warga sudah mulai meninggikan barang, agar tidak terkena basah secara keseluruhan.

Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Kampar, tentu tidak hanya memberikan dampak positif, namun juga terdapat banyak dampak negatif yang dirasakan dari bencana banjir tersebut. Salah satu dampaknya yaitu akan banyak timbul penyakit yang menyerang masyarakat yang terdampak, terutama penyakit kulit. Seperti yang dinyatakan oleh Pak Firman dalam wawancara:

“Negatifnya tentu setelah banjir banyak sampah yang ngebuat kampung halaman menjadi jelek kembali, dan efek-efek lain setelah banjir seperti terkena penyakit” (Wawancara Firmana, 20 November 2017).

Saat banjir dan pergantian air yang terjadi di sungai menyebabkan baik sampah yang berasal dari arus sungai maupun sampah dari daun, menyebabkan desa menjadi kotor kembali, sehingga masyarakat, aparat desa serta pemerintahan memiliki tanggungjawab untuk membersihkan desa, selain membersihkan rumah masing-masing. Selain itu, pada saat air sungai naik, maka banyak anak-anak yang berenang, sehingga banyak anak-anak yang terkena penyakit kulit seperti gatal-gatal. Hal tersebut juga di konfirmasi oleh Bu Fitri, seperti yang disampaikan dalam wawancara

“Kebanyakan efek dari kesehatan setelah banjir anak-anak banyak yang terkena batuk, demam, pilek, gatal-gatal, alergi kulit, karena selama banjir anak-anak banyak yang berenang-berenang dan susah dilarang” (Wawancara Fitri, 20 November 2017).

Selain penjelasan diatas, Pak firman juga menjelaskan alasan mengapa warga lebih memilih untuk tidak mengungsi dan menetap di

rumah. Hal tersebut dikarenakan pada saat bencana, BPBD dan stakeholders rutin melakukan pengecekan dan berkeliling ke rumah-rumah warga untuk mengecek bagaimana keadaan warga, sehingga menyebabkan warga merasa masih aman untuk tetap bertahan tinggal didalam rumah.

“Saat bencana, BPBD, pemerintah dan instansi terkait selalu berkeliling mengecek ke rumah-rumah di pinggiran sungai, satu hari kemungkinan bisa 2-3 kali pengecekan, dan juga mengecek tempat-tempat yang sudah terendam lama” (Wawancara Firmana, 20 November 2017).

Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Bu Fitri bahwa pada saat bencana, pemerintah rutin mengecek ke rumah-rumah warga dengan menggunakan perahu karet, mengecek keadaan dan kondisi warga. Jika ada warga yang membutuhkan obat, maka obat-obatan akan akan diantar. Namun, pemerintah juga masih tetap menghimbau warga untuk mengungsi jika terdapat kondisi warga yang sudah kurang baik.

“Obat-obatan selalu sampai setiap hari, kebanyakan masyarakat tidak mau mengungsi, namun jika ada obat-obatan seperti bantuan mereka mengambil itu” (Wawancara Fitri, 20 November 2017).

Pernyataan yang diberikan oleh Pak Firman dan Bu Fitri juga dikonfirmasi oleh Bu Erawati, yang menyatakan dalam wawancara

“Pada saat banjir, BPBD, satgas dan aparaturnya desa bersama-sama langsung turun ke daerah bencana. Saat bencana terjadi, tidak ada warga yang dievakuasi dikarenakan warga sudah bersiap-siap dan merasa sudah terbiasa menghadapi banjir. Selama bencana banjir pemerintah datang ke dusun setiap hari dan membangun posko di kantor kepala desa bersama satgas dan relawan” (Wawancara Erawati, 20 November 2017).

4. Hambatan-hambatan dalam Komunikasi Tanggap Darurat Bencana

Dalam melakukan tanggap darurat bencana, Pak Khoirul memberikan kritikan kepada pemerintah, seperti yang terdapat dalam wawancara:

“Kalau dipikir-pikir pemberitahuan melalui alarm peringatan sudah bagus, namun kalau bisa jangan setelah air masuk terlebih dahulu baru warga diberitahu lalu apa gunanya lagi, percuma. Kalau memang airnya mau masuk kan tidak ada salahnya alarm itu dihidupkan” (Wawancara Khoirul, 15 November 2017).

Keluhan terhadap pemerintah Desa Kampung Terendam pun diberikan oleh Bu Asiah, seperti yang terdapat dalam wawancara

“Memang diberitahu bahwa air naik dan akan ada pembukaan pintu, namun pemerintah desa dianggap terkesan cuek bahkan kepala dusun ini juga tidak tahu bahwa akan terjadi banjir” (Wawancara Bu Asiah, 16 November 2017).

Menanggapi keluhan dari Bu Asiah terkait tidak adanya bantuan yang diberikan, baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten terhadap Desa Kampung Terendam dalam ditanggapi oleh Pak Chandra bahwa BPBD juga banyak menerima keluhan tersebut dari masyarakat, dan ketika mendapatkan keluhan tersebut, maka BPBD akan mengkomunikasikan kepada pemerintah desa agar lebih aktif dalam hal tanggap bencana.

“Keluhan Kampung Terendam tidak ada bantuan dari pemerintah, banyak seperti itu keluhan dari masyarakat. Jadi yang seperti itu, biasanya ditekankan ke kecamatannya sama ke desanya, mereka harus aktif baik dalam mendata atau segala macamnya” (Wawancara Chandra, 21 November 2017).

Dalam menanggulangi bencana, Pak Chandra juga mengatakan bahwa terdapat kendala-kendala baik internal maupun eksternal. Kendala internal seperti sumber daya manusia, dimana penempatan sumber daya manusia dalam BPBD kurang tepat karena tidak semua berlatarbelakang dari kebencanaan.

“Kendala internal, yaitu sumber daya baik dari peralatan, kendaraan operasional. Selain itu, yang paling vital masalah sumber daya manusianya, bpbd Kampar kekurangan sdm yang memang berpotensi di bidang kebencanaan” (Wawancara Chandra, 21 November 2017).

Terdapat juga kendala di peralatan, terkadang BPBD Kampar meminjam bantuan peralatan kepada BPBD Provinsi Riau, namun jika lingkup bencana sudah kabupaten, tidak jarang pula peralatan tersebut tidak tersedia karena masih dipakai di wilayah lain. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Pak Abdul yang merupakan Kepala Subbid Penyelamatan dan Evakuasi Bidang Kedaruratan.

”Apabila BPBD Kampar membutuhkan stock seperti logistik, peralatan dan lain-lain, maka BPBD Kabupaten Kampar bisa meminta bantuan dari BPBD Provinsi Riau, dan jika kebutuhan yang diajukan oleh BPBD Kabupaten Kampar tersebut tersedia di BPBD Provinsi Riau, maka kebutuhan tersebut segera dikirimkan ke wilayah bencana” (Wawancara Abdul Razak, 02 November 2017).

BPBD Provinsi Riau bertugas untuk mensupport BPBD Kampar. BPBD Provinsi Riau juga memiliki tanggungjawab dalam membantu BPBD Kampar dalam menangani bencana yaitu dengan

sikap kesiapsiagaan dan membantu memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh BPBD Kabupaten Kampar.

Kendala lain yang terdapat dalam penanggulangan bencana yaitu kendala eksternal. Dijelaskan oleh pak Chandra bahwa kendala eksternal yaitu terdapat dalam koordinasi, dimana saat menanggulangi bencana, terkadang setiap instansi bekerja masing-masing. Selain itu, karena BPBD ini sangat identik dengan penanggulangan bencana, tak jarang pula tugas menanggulangi bencana lebih banyak diatasi oleh BPBD. Maka rencana kontigensi yang telah disepakati bersama melalui pemda dengan instansi terkait yang terhubung dengan kebencanaan kurang berjalan dengan baik.

“BPBD hampir seluruh daerah ada kontigensi, yaitu kesepakatan bersama melalui pemda dengan instansi terkait yang terhubung dengan kebencanaan. Contohnya dinas sosial, dinas kesehatan. Di luar institusi dari pemerintah ada pihak kuasa dari perusahaan. Gunanya kontigensi ialah saat bencana, semua lini tersebut bergerak, baik dari internal BPBD maupun eksternal. Namun pada kenyataannya koordinasi kurang berjalan dengan baik” (Wawancara Chandra, 21 November 2017).

Kendala eksternal juga dijelaskan oleh Pak Chandra seperti yang terdapat dalam wawancara:

“Kendala eksternal yang dirasakan yaitu terdapat pada anggaran dana, kendala di koordinasi dengan instansi terkait mengenai koordinasi lapangan, dan kendala mengenai kurangnya kesadaran masyarakat” (Wawancara Chandra, 21 November 2017).

Saat menanggulangi bencana masih terdapat kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam membantu BPBD serta tim

satgas dalam membantu menanggulangi bencana, bahkan bantuan lebih sering datang dari volunteer bantuan dari luar. Maka Pak Chandra mengatakan, melihat hal tersebut solusi yang dapat dijalankan yaitu dengan tetap melakukan sosialisasi lebih sering lagi kepada setiap masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.

C. Komunikasi Pasca Bencana

Komunikasi yang dilakukan saat pasca bencana yaitu bertujuan untuk mengetahui apa saja permasalahan dan keluhan yang terdapat di kawasan bencana setelah terjadi bencana.

3. Pendataan Kerugian dan Kerusakan

Proses ini bertujuan agar kerusakan dan kerugian yang dirasakan masyarakat diketahui pemerintah dan dapat diganti rugi. Setelah bencana, dilakukan pencatatan terkait kerugian, apabila terjadi kerusakan infrastruktur misalnya jembatan, mesjid, atau yang lain.

Komunikator. Langkah-langkah yang dilakukan saat pasca bencana yaitu mendata dampak kerusakan. Seperti yang terdapat dalam wawancara bersama Pak Elbakhtisar:

“Data direkap, diusulkan, kemudian dibuat dalam bentuk surat dan dikirim ke BNPB pusat” (Wawancara Elbakhtisar, 09 November 2017).

Setelah melakukan pendataan terkait kerusakan dan kerugian yang dirasakan, maka data tersebut dilaporkan kepada BNPB pusat yang berada di Jakarta untuk dapat dilakukan ganti rugi. Namun jika kerugian merupakan kerugian wilayah tersebut, maka data dilaporkan ke pemerintah Provinsi. Pihak yang bertanggungjawab mendata

kerugian-kerugian yang dirasakan masyarakat dari dampak bencana banjir yaitu Kepala Dusun maupun ketua RT setempat.

Adapun cara pendataan yang dilakukan pemerintah dijelaskan oleh Pak Firman dalam wawancara

“Pendataan biasanya dilakukan setelah banjir seperti meminta data berapa rumah yang terendam, berapa KK yang terkena, berapa hewan ternak yang terendam atau hilang, berapa kerambah yang hanyut” (Wawancara Firmana, 20 November 2017).

Setelah melakukan pendataan terkait kerugian dan kerusakan yang disebabkan banjir, langkah selanjutnya yaitu pelaporan. Adapun alur komunikasi dalam memberi laporan dijelaskan oleh Pak Firman dalam wawancara

“Setelah terjadi banjir dan terdapat aduan yang dilakukan oleh masyarakat, pertama kali aduan dilaporkan kepada ketua RT setempat, setelah itu RT langsung melaporkan ke desa, dan desa yang melaporkan ke kecamatan atau langsung ke kabupaten juga bisa” (Wawancara Firmana, 20 November 2017).

Pesan. Adapun pesan yang disampaikan oleh warga kepada dinas-dinas terkait berisi kerugian-kerugian yang mereka alami, seperti pesan yang disampaikan oleh Pak Amal yaitu kerugian tidak hanya berupa bahan elektronik dan perabotan rumah tangga, namun kerugian juga terdapat di sebagian kecil perkebunan milik warga seperti perkebunan ubi kayu, karena banjir yang merendam perkebunan tersebut selama beberapa hari menyebabkan ubi kayu tersebut membusuk. Selain perkebunan, kerusakan yang dirasakan setelah

banjir yaitu terdapat banyak surat-surat dan buku-buku sekolah anak yang terendam karena belum sempat diselamatkan, namun hal tersebut dapat diantisipasi oleh warga dan pemerintah dengan cara menjemur semua barang, termasuk diantaranya surat-surat dan buku-buku sekolah anak.

Media. Media yang digunakan dalam melakukan pencatatan kerugian kepada warga yaitu dengan komunikasi secara langsung.

Komunikan. Adapun kerugian-kerugian yang dirasakan masyarakat yang terdampak bencana, juga dijelaskan oleh Pak Akmal, seperti yang terdapat dalam wawancara

“Banjir yang mendadak, jadi perabotan yang terbuat dari bahan triplek, itu habis tenggelam. Lalu barang-barang seperti elektronik (kipas angin, tv) banyak juga punya masyarakat yang rusak, karena terendam dan tidak bisa diselamatkan karena mendadak tadi” (Wawancara Akmal, 15 November 2017).

Terkait pernyataan pak Firman mengenai pencatatan kerugian yang dilakukan pemerintah setelah banjir dikonfirmasi oleh Pak Akmal seperti yang terdapat dalam wawancara:

“Cara mendatanya dengan bertanya dan mengecek ke setiap KK, apa ada kerugian, dan kerugian apa saja yang dirasakan” (Wawancara Akmal, 15 November 2017).

Feedback. Laporan-laporan yang diberikan warga kadang bersifat ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah, namun tidak semua laporan kerugian dapat direalisasikan oleh pemerintah. Pak firman mengatakan, jika dipresentase, laporan kerugian dan kerusakan

yang dilaporkan, direalisasikan hanya 30% dan 70% tidak direalisasikan.

Pernyataan diatas dikonfirmasi oleh Pak Chandra, ia mengatakan bahwa memang tidak semua laporan kerugian dapat direalisasikan, karena anggaran dana yang diberikan juga terbatas. Selama ini jarang ada warga yang meminta ganti rugi, baik kebun atau apapun yang terkena banjir. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Bu Fitri, yang mengatakan bahwa sebenarnya dia jarang meminta ganti rugi, karena banjir sudah merupakan hal yang biasa, dan juga barang-barang yang dimiliki warga desa juga biasa-biasa saja.

“Kalau dibilang jaranglah ada yang minta ganti rugi, karena kan kalau orang-orang desa barangnya tidak banyak-banyak kali. Karena udah langganan banjir, jadi tau mana barang yang harus ditinggikan biar tidak kena air” (Wawancara Fitri, 20 November 2017).

4. Rekonstruksi dan Rehabilitasi

Komunikator. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kerugian yang terdapat akibat banjir serta langkah perbaikan kerusakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah serta stakeholder dari segi infrastruktur. Pak Elbachtisar menjelaskan bahwa setelah banjir surut, maka BPBD beserta tim satgas dari TNI dan Polri dan juga masyarakat setempat bekerjasama untuk membersihkan wilayah-wilayah yang terkena dampak banjir seperti membersihkan sekolah, masjid dan tempat-tempat lain.

Media. Media yang digunakan yaitu komunikasi langsung yang dilakukan dinas-dinas terkait dengan aparat desa dan warga

Komunikasikan. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Pak Akmal seperti yang terdapat dalam wawancara:

“Jadi, pagi-pagi warga sibuk ke sekolah menyelamatkan buku-buku yang ada. Anak-anak sekolah tetap datang 3 hari kemudian untuk membantu membersihkan sekolah, menjemur dan memelihara buku-buku kembali” (Wawancara Akmal, 15 November 2017).

Bu Erawati juga menjelaskan bahwa setelah banjir, Pemerintah masih sering melakukan pengecekan ke Desa Buluh Cina.

“Setelah banjir surut, masih ada pemerintah yang selalu datang ke dusun untuk memberikan bantuan dan mengecek masyarakat, seperti mengecek kesehatan masyarakat. Jika ada yang sakit, dibawa ke puskesmas untuk dirawat” (Wawancara Erawati, 20 November 2017)

Selain itu, Bu Fitri menambahkan bahwa:

“Setelah bencana pemerintah mengecek keadaan apakah ada jatuh korban seperti itu. Peran pemerintah setelah bencana juga selalu mengecek ke daerah apa saja yang rusak, biasanya efek setelah banjir itu jalan yang rusak” (Wawancara Fitri, 20 November 2017).

Feedback. Efek jalan yang rusak disebabkan banjir menjadi beban pikiran dan kendala juga bagi warga, hal tersebut dikarenakan jalan yang rusak tersebut merupakan jalan satu-satunya yang harus dilalui warga untuk keluar baik saat mengantar anak ke sekolah maupun berbelanja. Bu Fitri juga menambahkan bahwa setelah 2 bulan paska banjir, jalan hanya ditimbun dan belum diperbaiki sepenuhnya.

Dalam membahas rekonstruksi dan rehabilitasi, Pak Sinam memberikan tanggapan bahwa:

“Jadi mungkin masukan yang di Kamar, perlu diketahui berapa desa yang terdampak banjir, dan total warga. Perlu ditanyakan juga sudah ada renkon (rencana kontigensi) atau belum” (Wawancara Sinam, 16 Februari 2018).

Setelah bencana maka situasi akan menjadi lebih kompleks, karena akan terdapat banyak kontraktor dalam melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi kerusakan-kerusakan yang terdapat setelah bencana, dan jumlah relawan juga akan berkurang. Maka, Sinam menjelaskan bahwa renkon (rencana kontigensi) yang dimiliki oleh pemerintah seharusnya dilakukan uji coba pada saat mitigasi bencana untuk dapat mengetahui apa saja tugas-tugas yang harus dilakukan saat banjir terjadi dan hal tersebut juga harus disimulasikan dalam gladi sebelum terjadi bencana, agar pada saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana 10 atau 11 cluster dapat bergerak sesuai tugas masing-masing.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada pembahasan kali ini, peneliti akan membahas mengenai rumusan masalah sesuai dengan temuan-temuan yang telah peneliti temukan di lapangan. Adapun temuan yang akan dibahas dalam bab ini adalah mengenai pola komunikasi yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintahan beserta pihak-pihak yang terkait dalam penanggulangan bencana banjir di wilayah Kampar.

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai pola komunikasi serta penyebaran alur informasi, peneliti menggunakan struktur jaringan komunikasi seperti yang terdapat dalam buku Joseph A. Devito (1997), dimana jaringan komunikasi tersebut terbagi ke dalam lima struktur yaitu, a) Struktur Lingkaran, b) Struktur Roda, c) Struktur Rantai, d) Struktur Y, dan e) Struktur semua saluran. Dari kelima struktur jaringan komunikasi, peneliti memilih 3 jaringan yang dirasa sesuai dengan temuan dalam pola komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait penanggulangan bencana, yaitu struktur rantai, struktur Y dan struktur roda. Peneliti membagi pembahasan terkait pola komunikasi menjadi 3, yaitu a) Pola komunikasi menggunakan struktur rantai dan struktur roda pada masa pra bencana, b) Pola komunikasi menggunakan struktur roda dan struktur Y pada masa tanggap darurat, c) Pola Komunikasi menggunakan struktur rantai pada masa pasca bencana.

A. Pola Komunikasi Menggunakan Struktur Rantai dan Struktur Roda Pada Masa Pra Bencana

Dalam melakukan komunikasi untuk menanggulangi sebuah bencana, dibutuhkan sebuah struktur pengorganisasian dan manajemen komunikasi bencana, termasuk didalamnya struktur jaringan komunikasi yang baik untuk mencapai tujuan. Menurut Susanto (2011), sebuah organisasi harus memiliki sebuah manajemen komunikasi bencana yang baik agar tujuan oleh organisasi dapat tercapai dengan baik dan tidak sia-sia. Manajemen komunikasi

berfungsi untuk menjaga keseimbangan setiap tujuan-tujuan organisasi sehingga tujuan-tujuan yang ingin dicapai dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Jaringan komunikasi merupakan saluran yang digunakan dalam melakukan komunikasi, dalam hal ini saluran merupakan penghubung dalam menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Semakin banyak anggota yang terlibat dalam penanggulangan bencana, maka tingkat penggunaan saluran dalam komunikasi semakin menjadi lebih penting dan kompleks.

Saluran menjadi penting dalam menyampaikan pesan kepada orang lain seperti yang dikatakan Baird & kerps dalam Devito (1997), jaringan komunikasi yang beragam harus dimiliki oleh sebuah organisasi dalam menjalankan dan menyelesaikan sebuah tugas dimana setiap orang memiliki tingkat kompetensi yang berbeda-beda. Mendukung manajemen komunikasi dalam bencana, maka dibutuhkannya sebuah koordinasi yang baik dalam menyampaikan informasi dan komunikasi, baik antara pemerintah, masyarakat, serta para relawan. Seperti yang dikatakan oleh Lestari (dalam Susanto, 2011), koordinasi dapat berjalan berdasarkan dengan adanya pertukaran informasi yang berasal dari sumber yang berbeda-beda. Menjalankan manajemen komunikasi bencana serta melakukan koordinasi kepada setiap anggota yang berada dalam kelompok penanggulangan bencana, maka perlu didasari pula dengan berjalannya komunikasi antar manusia yang baik, seperti halnya setiap pihak yang menjadi anggota penanggulangan bencana.

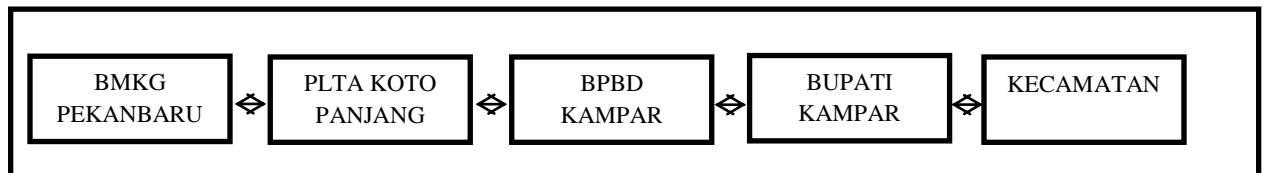
Dalam membahas pola komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait pada masa pra bencana, peneliti membagi pembahasan kedalam 2 kategori, yaitu pola komunikasi yang dilakukan antar instansi-instansi pemerintah dan pola komunikasi yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat di kawasan rawan bencana.

Pada masa pra bencana, informasi mengenai prakiraan cuaca penting untuk diketahui oleh setiap instansi yang terkait penanggulangan bencana dan juga masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. Informasi mengenai prakiraan cuaca terutama intensitas hujan perdasarian, baik prakiraan per-bulan, per-sepuluh harian, maupun prakiraan cuaca harian di Kabupaten Kampar selalu diberikan oleh BMKG Pekanbaru. Adapun pola komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah pada saat pra bencana yaitu, informasi terkait prakiraan cuaca tersebut diseminasikan kepada PLTA Koto Panjang, BPBD Kabupaten Kampar serta instansi terkait bencana lainnya, termasuk di dalamnya Bupati. Setelah informasi tersebut sampai kepada Bupati, maka Bupati menurunkan informasi tersebut kepada Kecamatan, Kecamatan lalu ke Desa.

Melihat pola komunikasi yang dilakukan BMKG Pekanbaru dalam memberikan informasi kepada instansi terkait, peneliti melihat adanya kecocokan pola komunikasi yang dilakukan dengan struktur rantai. Struktur rantai yaitu, anggota yang berada di posisi tengah memiliki peran sebagai pemimpin yang dapat melakukan komunikasi dengan orang-orang yang berada di sebelah kanan maupun kirinya, sedangkan orang yang berada di posisi paling ujung, hanya dapat berkomunikasi dengan satu orang saja (Devito, 1997: 345). Selain 3 orang yang berada di tengah dapat saling melakukan komunikasi dengan dua orang di sisi kanan dan kirinya, struktur jaringan rantai menurut Leavitt (dalam Tubbs dan Moss, 1996), mengatakan bahwa struktur jaringan rantai merupakan struktur jaringan yang paling baik diantara struktur jaringan lainnya, dimana struktur rantai memiliki kinerja yang lebih cepat. Maka dari itu, dalam pola komunikasi rantai, anggota yang berada di tengah dapat menjadi sentral komunikasi agar tujuan dalam melakukan penanggulangan untuk mengurangi resiko bencana dapat berjalan dengan baik.

Jika dikaitkan dengan hasil temuan data, maka BMKG Pekanbaru berada di posisi paling awal. PLTA, Bupati dan BPBD berada di posisi tengah, dimana BPBD dapat melakukan komunikasi dengan PLTA dan Bupati untuk mengetahui ketinggian air di waduk dan mengenai perencanaan penanggulangan pencegahan resiko bencana. Diseminasi informasi yang dilakukan BMKG Pekanbaru kepada instansi-instansi pemerintahan terkait, dilakukan dengan secara struktural dan non-struktural. BMKG melakukan diseminasi informasi dengan mengirimkan buletin terkait prakiraan cuaca baik berupa hardcopy maupun softcopy. Selain mengirimkan buletin berupa hardcopy secara langsung kepada instansi-instansi, BMKG juga selalu menginformasikan prakiraan cuaca harian melalui media sosial Twitter dan mengirimkan buletin yang berupa softcopy via grup Whatsapp (media sosial) siaga bencana, yang di dalamnya terdapat para pemangku kepentingan setiap instansi.

Bagan 4.1 Pola Komunikasi Rantai dalam Menyampaikan Informasi Prakiraan Cuaca Masa Pra Bencana



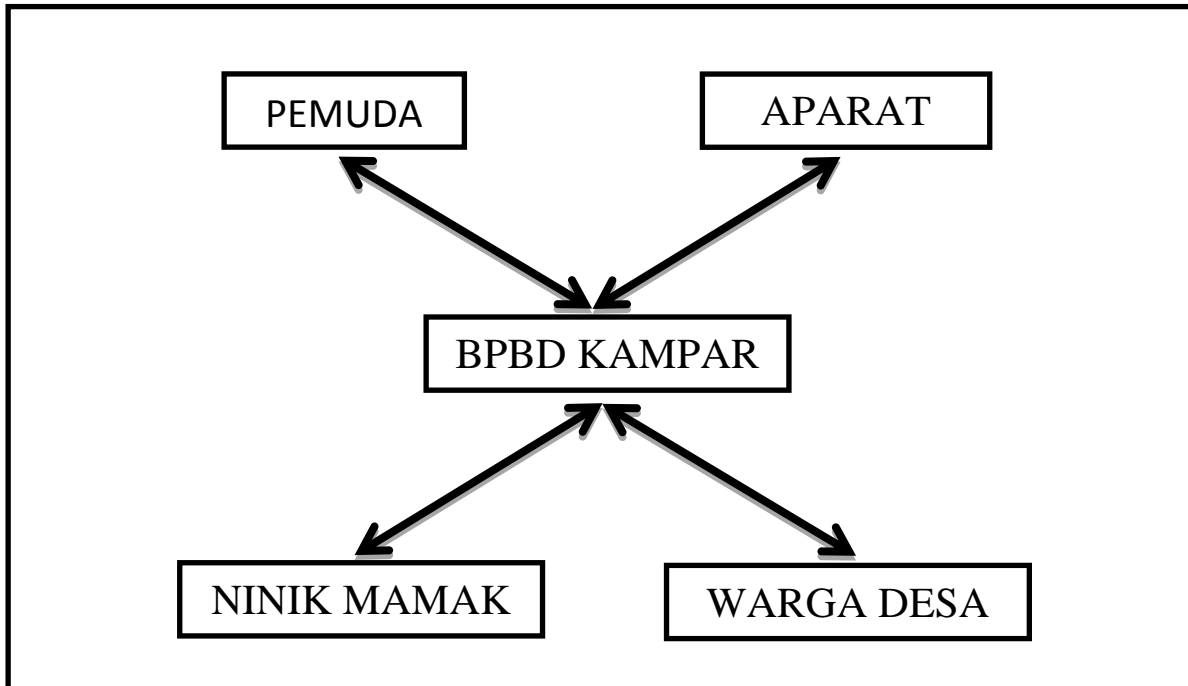
Selain pola komunikasi yang dilakukan antar instansi pemerintahan, terdapat juga pola komunikasi yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat di kawasan rawan bencana. Setelah informasi diseminasikan kepada setiap instansi yang terkait dalam penanggulangan bencana dan disebarkan Bupati hingga ke Desa setempat yang termasuk kedalam kawasan rawan bencana, maka dalam menanggulangi bencana, mitigasi bencana menjadi suatu hal yang penting. Mitigasi merupakan suatu cara pencegahan resiko bencana yang dapat dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat

yang berada di kawasan rawan bencana, agar pada saat terjadi bencana, masyarakat yang terdampak dapat menyelamatkan diri sendiri sehingga dapat menghindari terdapatnya korban jiwa.

Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab dalam mengurangi resiko bencana, BPBD merupakan salah satu instansi yang bergerak dalam bidang kebencanaan, melakukan mitigasi bencana merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh BPBD, dimana terdapat bidang khusus yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan mitigasi bencana, yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Dalam melakukan mitigasi, BPBD melakukan 2 program, yaitu Desa Tangguh Bencana dan Piket Siaga. Adapun alur komunikasi dalam melakukan desa tangguh bencana yaitu berasal dari BPBD yang disampaikan kepada relawan desa, dalam hal ini yang menjadi relawan desa yakni aparat desa, pemuda desa, ninik mamak (orang yang dituakan).

Pola komunikasi tersebut cocok dengan struktur roda. Struktur roda yakni struktur yang memiliki pemimpin yang jelas yang berada pada posisi sentral. Dalam melakukan program desa tangguh bencana, pola roda peneliti anggap sangat cocok dengan pola komunikasi yang dijalankan oleh BPBD dimana pola tersebut merupakan pola yang paling efisien untuk digunakan. Menurut Leavitt (dalam Tubbs dan Moss1996), dalam menetapkan sebuah prosedur yang akan dilakukan secara terus menerus, para anggota yang berada dalam struktur roda mampu mengatur diri mereka sendiri. Selain itu, efektifitas kerja dalam melakukan program DESTANA, dapat dinilai tergantung pada orang yang berada di posisi sentral, apakah program tersebut berjalan dengan baik atau tidak karena orang yang berada di posisi sentral dianggap memiliki kekuatan terbesar dalam menjalankan sebuah komunikasi.

Bagan 4.2 Pola Komunikasi Roda, dalam Melakukan Program DESTANA



Jika dikaitkan dengan pola komunikasi yang dilakukan oleh BPBD, aparat desa, pemuda desa serta ninik mamak saat menjalankan program desa tangguh bencana, BPBD berada di posisi pusat, dan merupakan pemimpin dalam melakukan komunikasi. Dalam hal ini, baik pemuda desa, aparat desa serta ninik mamak akan melakukan komunikasi terkait penanggulangan bencana melalui BPBD, maksudnya adalah jika tidak ada pemimpin (dalam hal ini BPBD) untuk melakukan program desa tangguh bencana, maka tidak akan ada pula komunikasi yang dilakukan oleh pemuda desa, aparat desa serta ninik mamak terkait penanggulangan bencana banjir di desa mereka.

Dalam melakukan program DESTANA, BPBD menggunakan saluran komunikasi berupa sosialisasi, pelatihan dan simulasi kepada relawan desa. Setelah setiap relawan desa mengikuti program DESTANA, maka relawan juga bertugas untuk menyampaikan informasi-informasi yang sudah didapat kepada setiap warga desa tersebut. Berdasarkan temuan penelitian, peneliti

melihat bahwa dalam melakukan sosialisasi, pelatihan dan simulasi, komunikasi tidak hanya terpusat kepada pemateri (BPBD), namun baik pemateri maupun peserta (relawan) dapat saling berinteraksi satu sama lain, seperti halnya kegiatan tanya jawab. Sehingga dengan melakukan pola yang seperti itu, pemerintah akan mendapat informasi lain dari masyarakat terkait bencana.

Melihat pola komunikasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam berkomunikasi terkait bencana, baik secara struktural dan non-struktural ternyata hal tersebut dapat membantu efektivitas alur komunikasi ke bawah. Tubbs dan Moss (1996: 92), mengatakan bahwa dalam memberikan pesan melalui saluran lebih dari satu, maka hal tersebut dinilai memiliki kelebihan yaitu selain dapat memberi informasi, menggunakan saluran lebih dari satu juga dapat membantu memastikan bahwa pesan tersebut akan diingat oleh penerima pesan.

B. Pola Komunikasi Menggunakan Struktur Roda dan Struktur Y Pada Masa Tanggap Darurat Bencana

Setelah melakukan program kegiatan terkait penyelenggaraan penanggulangan di suatu daerah yang terdapat potensi bencana saat pra bencana, maka hal tersebut wajib di terapkan saat tanggap darurat bencana, seperti yang terdapat dalam pasal 33 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 yaitu pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, penentuan status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan segera terhadap sarana dan prasana vital yang terdapat di lokasi bencana.

Masa tanggap darurat merupakan proses terjadinya bencana. Masa tanggap darurat bencana menjadi satu fase penting dimana pemerintah harus mampu untuk merespon bencana tersebut secara cepat, maka peran

komunikasi menjadi lebih penting pada masa darurat, dimana pemenuhan kebutuhan dasar warga yang terdampak harus dioptimalkan, agar resiko bencana dapat berkurang dan bencana dapat ditangani secara menyeluruh (Lestari, dalam Susanto 2011: 93). Dalam melakukan penanggulangan bencana dibutuhkan komunikasi antar manusia yang baik, sebagaimana yang dimaksudkan ialah semua pihak yang tergabung dalam proses penanggulangan bencana harus berfokus pada fungsi komunikasi agar dapat menciptakan pemahaman bersama, karena penanggulangan bencana tidak semata-mata hanya diberikan secara materil, namun juga secara moral. Oleh karena itu, dalam memberikan bantuan terhadap bencana, komunikasi dapat menjadi sangat esensial.

Komunikasi yang dilakukan saat masa tanggap darurat bencana yaitu informasi yang berasal dari BMKG Pekanbaru terkait prakiraan cuaca. Kemudian diberikan kepada PLTA Koto Panjang serta dinas-dinas terkait termasuk didalamnya Bupati. Dengan melihat prakiraan cuaca yang diberikan oleh BMKG, maka PLTA yang berada di bagian operasional bertugas untuk melihat ketinggian air yang berada di waduk saat itu, dan jika terjadi hujan yang deras maka PLTA Koto Panjang bertugas memantau kenaikan air. Jika kenaikan air banyak dan tinggi, maka PLTA akan melakukan pembukaan pintu berdasarkan SOP (*Standard Operational Procedure*) yang ada. Pada saat dilakukannya pembukaan pintu, maka PLTA bertugas melakukan koordinasi kepada Manajer PL Kota Pekanbaru dan memberikan informasi kepada Bupati yang kemudian PLTA juga menyebarkan surat tersebut langsung kepada tembusan, yaitu TNI, POLRI, BPBD Kampar, Dinas Soisal, Dinas Kesehatan, Dinas PU-PR, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan. Selain itu PLTA Koto Panjang juga menyebarkan surat terkait informasi pembukaan pintu langsung kepada Kecamatan dan setiap Kepala Desa yang wilayahnya berada di sepanjang aliran sungai dan termasuk

kawasan rawan bencana. Kepala Desa meneruskan informasi tersebut kepada Kepala Dusun, Kepala Dusun kepada warga desa.

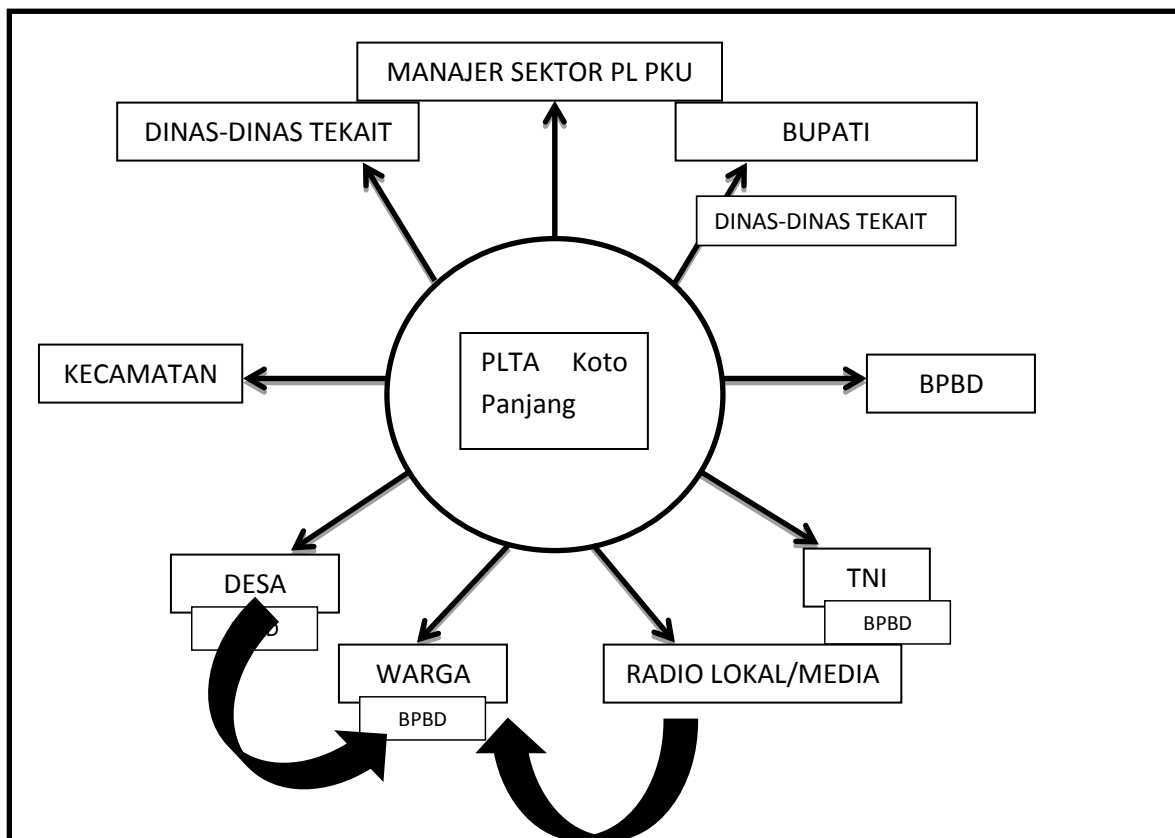
Saat masa bencana, PLTA merupakan sentral informasi awal bagi instansi lainnya. Dimana bencana dapat terjadi dari kenaikan air sungai yang cukup tinggi akibat pembukaan pintu air di waduk PLTA Koto Panjang. Sehingga ketika pembukaan pintu air sudah dilakukan, darisana BPBD mulai melakukan patroli dan monitoring untuk melihat ketinggian air. Dalam melakukan penyebaran informasi mulai dari pembukaan pintu, pengurangan pembukaan pintu hingga penutupan pintu air, PLTA melakukan penyebaran informasi secara struktural dan non-struktural. Secara struktural, PLTA Koto Panjang melakukan penyebaran informasi melalui media surat resmi, sehingga harus melewati struktur yang panjang hingga informasi sampai ke warga desa terdampak. Dalam penanganan sebuah bencana, komunikasi merupakan bencana kedua setelah bencana itu sendiri. Untuk menghindari bencana komunikasi di masyarakat, maka PLTA Koto Panjang juga melakukan koordinasi bersama radio dan media yang terdapat di daerah Kampar. PLTA Koto Panjang menilai bahwa cara tersebut merupakan cara yang cukup baik untuk menghindari keraguan terhadap informasi terkait bencana di masyarakat, dan hal tersebut dapat membantu kecepatan informasi dimasyarakat.

Selain menggunakan media-media komunikasi diatas, dalam melakukan komunikasi terkait pembukaan pintu air, PLTA juga menggunakan media telpon kepada Bupati, Manajer Sektor PL Pekanbaru, dan BPBD Kampar untuk melakukan koordinasi bahwa pintu air sudah dibuka, dan juga PLTA menggunakan sosial media seperti grup Whatsapp untuk mengkomunikasikan bahwa sudah dilakukan pembukaan pintu, berupa surat dalam bentuk PDF. Adapun media yang digunakan saat mengkomunikasikan bencana yaitu dengan menggunakan telpon, komunikasi langsung tatap muka,

grup Whatsapp (media sosial), *handy talky*, radio, dan juga toa. Seperti yang terdapat dalam buku Joseph A Devito (1997), dimana setiap anggota dapat berkomunikasi dengan jarak jauh dengan media yang dapat saling menghubungkan antara satu sama lain seperti telpon, dan setiap anggota dapat memberi dan menerima informasi dari anggota lain, meski di tempat yang berbeda.

Melihat pola komunikasi yang dilakukan PLTA Koto Panjang kepada instansi pemerintah terkait bencana lainnya, peneliti melihat bahwa adanya kecocokan pola komunikasi yang dilakukan dengan struktur roda, yaitu dimana terdapat pemimpin yang jelas. Dalam hal ini, PLTA Koto Panjang merupakan pusat informasi terkait kebencanaan yaitu buka tutup pintu air. PLTA merupakan pusat yang dapat mengirim maupun menerima pesan dari semua anggota lainnya terkait pembukaan, penambahan, dan penutupan pintu air.

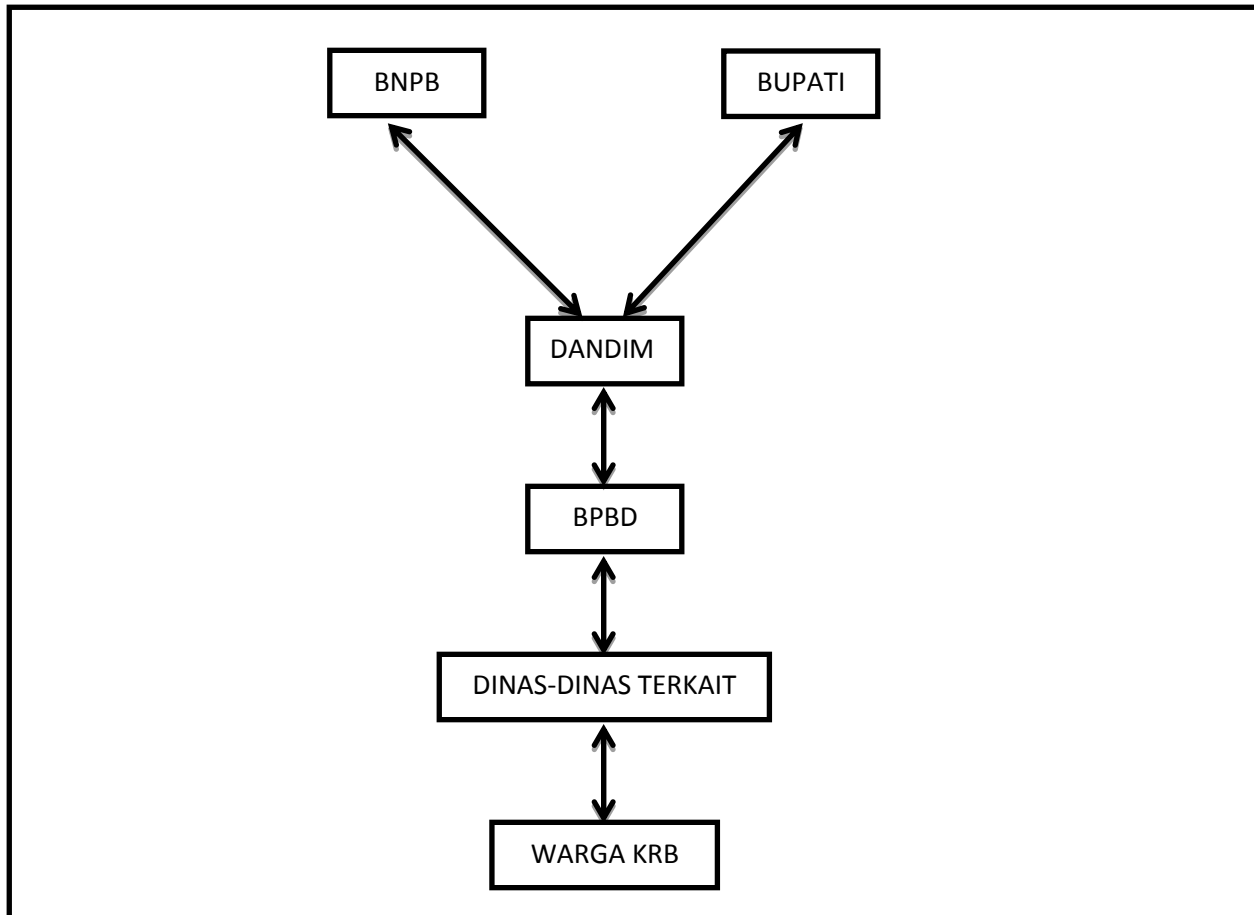
Bagan 4.3 Pola Komunikasi Roda dalam Penyebaran Informasi Kebencanaan



Setelah mendapat informasi terkait pembukaan pintu air yang dilakukan oleh PLTA Koto Panjang, selanjutnya pemerintah melakukan koordinasi secara formal maupun non-formal tergantung situasi dan kondisi. Secara formal, pemerintah mengadakan rapat untuk melakukan koordinasi awal, namun jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan, maka koordinasi penanggulangan bencana dilakukan secara non-formal yaitu melalui telpon atau grup Whatsapp. Selain itu, tidak selamanya pembukaan pintu menyebabkan terjadinya bencana, maka saat mendapat informasi pembukaan pintu, BPBD melakukan pengecekan bagaimana kenaikan air di sungai. Jika tinggi, dan dilihat adanya potensi bencana, maka kemudian Tim Reaksi Cepat yang berada dibawah PUSDALOPS melakukan monitoring dan memberikan laporan langsung terkait pendataan di desa yang terdampak melalui grup Whatsapp yang didalamnya terdapat Kepala Pelaksana dan Kabid. Kedaruratan dan Logistik BPBD. Selanjutnya koordinasi turun kepada anggota kedaruratan dan logistik, dan juga melakukan koordinasi bersama relawan dan aparat desa melalui telpon, kemudian mengevakuasi warga yang terdampak bersama. Dalam melakukan penanggulangan bencana, yang menjadi pusat komando yaitu kepala satuan yang berasal dari kemilitiren.

Peneliti melihat adanya kecocokan pola komunikasi yang dilakukan dengan pola komunikasi struktur Y. Menurut Devito (1997:345), dalam struktur Y terdapat pemimpin yang jelas, dan anggota dibawahnya berperan sebagai pemimpin kedua, sehingga kedua pemimpin tersebut dapat saling memberi dan menerima pesan dari 2 anggota lainnya. Jika dikaitkan dengan pola komunikasi, Dandim merupakan pusat koordinasi dalam penanggulangan bencana banjir Kampar, dan BPBD menjadi pemimpin kedua.

Bagan 4.4 Pola Komunikasi Y, dalam Menjalankan Komando



Dalam melakukan masa tanggap darurat, kecepatan informasi, komunikasi yang efektif dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat menjadi suatu hal yang penting. Hal tersebut perlu dilakukan agar warga yang menjadi korban akibat banjir langsung mendapat pemulihan dari sisi psikologis. Saat masa tanggap darurat, alur komunikasi dalam melakukan koordinasi lebih bersifat struktural dan terdapat alur komunikasi kebawah, yaitu koordinasi berasal dari tingkat hirarki yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah.

C. Pola Komunikasi Menggunakan Struktur Rantai Pada Masa Pasca bencana

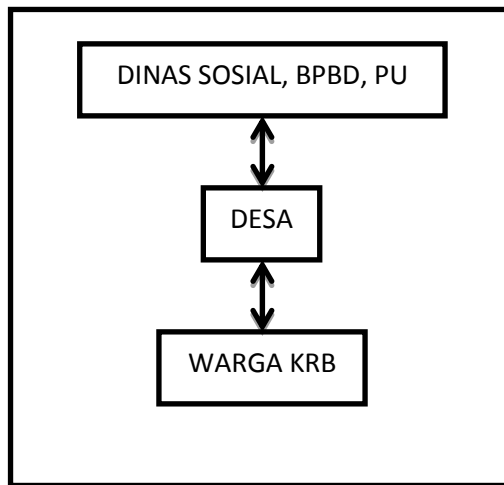
Setelah bencana merupakan fase terakhir dalam proses penanggulangan bencana. Masa pasca bencana merupakan sebuah proses pemulihan yang harus dilakukan baik secara moral maupun kondisi sosial ekonomi warga setempat yang terdampak bencana. Pasca bencana terdiri atas tahap rekonstruksi dan rehabilitasi. Setelah Bencana, terjadi proses pencatatan kerugian baik dari infrastruktur desa maupun kerugian yang dialami warga. Hal tersebut bermaksud agar setiap kerugian yang terdapat dampak dari banjir dapat diperbaiki kembali dan diganti, namun tidak semua pendataan yang dilaporkan mendapat ganti rugi, karena hal itu juga dilihat dari seberapa besar jumlah kerugian. Setelah bencana juga terdapat proses rekonstruksi, yaitu perbaikan pada setiap infrastruktur yang terkena dampak dari banjir.

Komunikasi yang dilakukan dalam pencatatan kerugian yaitu, BPBD, Dinas Sosial beserta aparat desa, berkoordinasi dalam mencatat setiap kerugian warga. Setelah mendapat data dari warga, maka data tersebut dilaporkan oleh aparat desa ke Kecamatan, dari Kecamatan lapor ke Kabupaten. Namun, tidak jarang pula pendataan kerugian tidak melewati tingkat hirarki yang panjang, pendataan kerugian terkadang diberikan langsung kepada BPBD, maupun Dinas Sosial.

Melihat proses komunikasi di atas, dinilai cocok dengan struktur rantai. Alur komunikasi yang dilakukan yaitu secara struktural dan non-struktural. Secara struktural, pola komunikasi memiliki arus komunikasi ke atas, dimana tingkat hirarki dalam proses tersebut berasal dari yang paling rendah, yaitu warga yang terdampak hingga ke hirarki yang tertinggi dalam lingkup Kabupaten, yaitu Bupati Kampar. Namun secara non-struktural, proses tersebut dapat berjalan lebih cepat, dimana BPBD dan Dinas Sosial

dapat langsung turun ke warga dan mencatat kerugian, sehingga tidak perlu melalui proses pelaporan dari warga ke Desa.

Bagan 4.5 Pola Komunikasi Rantai masa Pascabencana



D. Analisis SWOT

1. Masa pra bencana

a. Strengths (Kekuatan)

Pada masa pra bencana, dinas terkait khususnya BPBD sudah menjalankan beberapa kegiatan dari program pencegahan dan pengurangan resiko bencana melalui komunikasi langsung dan tidak langsung dengan menggunakan berbagai media untuk dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat, sehingga komunikan dan komunikator dapat bersifat aktif dalam memberi dan menerima pesan dan mampu bekerjasama dalam mengurangi resiko bencana.

b. Weakness (Kelemahan)

Kelemahan yang terdapat dalam melakukan mitigasi bencana. Pertama, tidak semua dinas-dinas terkait yang termasuk kedalam rencana kontigensi turut serta dalam mengikuti simulasi bersama masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. Jika pada masa

Jpra bencana dinas-dinas terkait yang terdapat dalam renkon dapat turut serta, maka pada saat bencana terjadi koordinasi dapat berjalan lebih efektif. Kedua, kegiatan sosialisasi, pelatihan dan simulasi dilakukan disaat jam kerja warga sehingga sebagian besar dari warga desa lebih memilih untuk bekerja daripada mengikuti kegiatan yang dilakukan dinas terkait, sebaiknya pemerintah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk melakukan program DESTANA pada saat kegiatan rutin desa. Ketiga, simpul informasi antara pemerintah dan warga untuk memberikan informasi kebencanaan belum teridentifikasi dengan jelas, selain itu belum terdapatnya simbol-simbol kebencanaan didaerah rawan bencana.

c. *Opportunities* (Peluang)

Peluang yang akan didapatkan jika program destana dilakukan pada saat kegiatan rutin desa yaitu dapat di pastikan akan lebih banyak warga yang datang dan dinas terkait dapat menghemat pembiayaan sehingga dana tersebut dapat dialokasikan ke dalam kegiatan lain.

d. *Threats* (Ancaman)

Ancaman yang terdapat jika melihat respon warga terhadap program yang dijalankan dinas terkait, masyarakat akan lebih memilih untuk bekerja daripada mengikutin program pencegahan resiko bencana yang kemudian terdapat pemikiran bahwa program yang dijalankan pemerintah bukan suatu hal yang penting lagi.

2. Masa tanggap darurat.

a. *Strengths* (Kekuatan)

Komunikasi saat tanggap darurat bencana dengan menggunakan telpon media sosial akan lebih cepat membantu untuk melakukan penyebaran informasi dan koordinasi baik antar pemerintah maupun antara pemerintah dan relawan yang terdapat di kawasan rawan bencana

b. *Weakness* (Kelemahan)

Kelemahan yang terdapat pada masa tanggap darurat yaitu, tidak semua pemerintah desa meneruskan penyebaran informasi terkait

peringatan pembukaan pintu spill way PLTA kepada warga desa, sehingga beberapa warga tidak mengetahui bahwa akan terjadi bencana banjir.

c. *Opportunities* (Peluang)

Peluang yang terdapat pada komunikasi masa tanggap darurat dengan selalu melakukan patrol rutin setiap harinya, maka akan menjalin hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan warga desa, sehingga berkurangnya penilaian-penilaian yang kurang baik dari masyarakat kepada pihak pemerintah.

d. *Threats* (Ancaman)

Ancaman yang terdapat pada komunikasi masa tanggap darurat yaitu akan banyak keluhan dan tuntutan yang datang dari masyarakat di kemudian hari jika pemerintah desa masih kurang aktif dalam menyebarkan informasi kebencanaan yang diberikan oleh dinas terkait dan masyarakat menganggap bahwa yang bertanggungjawab dalam menanggulangi bencana hanyalah pemerintah sehingga kesadaran masyarakat dalam menanggulangi bencana semakin berkurang.

3. Masa pasca bencana

a. *Strengths* (Kekuatan)

Kekukatan yang terdapat pada masa pasca bencana, yaitu dinas-dinas terkait masih melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat seperti mencatat kerugian warga dan juga melakukan pengecekan kesehatan kepada setiap warga sehingga warga memberikan penilaian yang baik terhadap pemerintah.

b. *Weakness* (Kelemahan)

Kerusakan yang terdapat setelah bencana tidak segera dilakukan perbaikan seperti perbaikan jalan utama yang rusak, sehingga memberikan hambatan kepada setiap warga yang ingin keluar dan masuk desa.

c. *Opportunities* (Peluang)

Peluang pada masa pasca bencana yaitu keluhan kepada pemerintah akan sedikit berkurang karena saat pasca bencana terdapat banyak bantuan-bantuan yang berasal dari luar pemerintahan, seperti relawan-relawan yang tergabung dalam kegiatan dan juga CSR yang berasal dari perusahaan-perusahaan untuk pemenuhan kebutuhan pasca bencana.

d. *Threats* (Ancaman)

Pada masa pasca bencana terdapat tahap rekonstruksi dan rehabilitasi berupa perbaikan pada setiap kerusakan yang terdapat pasca banjir, termasuk didalamnya perbaikan pada jalan utama yang terdapat di desa. Jika perbaikan tidak segera dilakukan oleh dinas terkait, maka akan menimbulkan keluhan dan penilaian yang kurang baik di masyarakat.

4. Analisis umum dan usulan

1. Analisis umum (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman)

Kekuatan yang peneliti temukan dalam penelitian ini secara keseluruhan yaitu komunikasi yang dilakukan antara pemerintah, relawan, dan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana sudah sangat baik, dimana terdapat komunikan dan komunikator yang jelas. Penggunaan media sosial grup whatsapp dan telpon saat dalam penyeberaan informasi dan melakukan koordinasi pada masa tanggap darurat merupakan pilihan media yang cukup tepat dimana dalam melakukan komunikasi kebencanaan tidak hanya dapat dilakukan secara formal dimana harus melewati tingkatan birokrasi yang sangat panjang.

Komunikasi terkait kebencanaan tidak hanya dilakukan melalui media sosial namun juga komunikasi tatap muka langsung yang dilakukan pemerintah dan masyarakat kawasan rawan bencana. Selanjutnya, dalam melakukan masa tanggap darurat sudah terdapat pemimpin yang jelas, sehingga alur informasi dan komunikasi juga terlihat jelas. Tanggap darurat yang dilakukan pemerintah sudah dilakukan dengan sigap, selain itu masyarakat juga sudah mengerti apa

yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, sehingga membuat tahap penanggulangan bencana dapat berjalan dengan efektif sehingga dapat mengurangi terdapatnya korban jiwa.

Kelemahan yang terdapat dalam melakukan komunikasi bencana yaitu pada masa pra bencana belum dilakukannya simulasi uji coba pada saat gladi bersama relawan yang berasal dari masyarakat. Selanjutnya, masih belum adanya simbol-simbol bencana di kawasan rawan bencana, dan kelemahan yang terakhir yaitu tahap rehabilitasi dan rekonstruksi masih kurang optimal sehingga menimbulkan keluhan dari masyarakat terdampak.

Adapun peluang yang terdapat pada penelitian ini yaitu peneliti melihat jika program sosialisasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan rutin desa, maka akan banyak masyarakat yang terlibat dan mengetahui bahwa adanya program pencegahan resiko bencana yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya, komunikasi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dinilai sudah sangat baik sehingga dapat mengurangi keluhan dari masyarakat.

Ancaman yang terdapat berdasarkan komunikasi bencana yang dilakukan yaitu masyarakat akan menganggap bahwa program terkait pencegahan resiko bencana yang dilakukan pemerintah bukan merupakan suatu hal yang penting lagi untuk diikuti jika waktu pelaksanaan dilakukan pada saat jam kerja warga desa. Selanjutnya ancaman yang terdapat dalam komunikasi bencana yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat yang menganggap bahwa BPBD bukan merupakan satu-satunya dinas yang menanggulangi bencana, sehingga penanggulangan bencana tidak hanya merupakan tanggungjawab BPBD tetapi juga dinas-dinas terkait kebencanaan lainnya.

2. Usulan (Meningkatkan kekuatan, mengurangi kelemahan, mengoptimalkan peluang dan menghindari ancaman)

Usulan yang dapat peneliti diberikan yaitu pertama, pemerintah menjaga komunikasi yang sudah berjalan antara pemerintah dan masyarakat baik melalui media sosial maupun komunikasi langsung, agar setiap pihak dapat bekerjasama dengan efektif. Kedua, melakukan

sosialisasi di kegiatan rutin warga sehingga tidak mengganggu waktu kerja masyarakat, selain itu dinas terkait dapat menghemat biaya sehingga dapat dialokasikan ke program bencana yang lain, selain itu pemerintah juga dapat menggunakan media lain dalam melakukan sosialisasi pencegahan resiko bencana seperti pemutaran film yang berkaitan dengan bencana

Ketiga, simulasi untuk menanggulangi bencana saat tanggap darurat, agar dapat diikuti oleh setiap dinas-dinas terkait yang termasuk dalam rencana kontijesi yang sudah ditandatangani oleh Bupati. Keempat, pemasangan simbol-simbol bencana merupakan suatu hal yang penting untuk melakukan evakuasi. Kelima, penempatan sumber daya alam dalam melakukan kebencanaan sebaiknya dilakukan dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu masyarakat harus lebih aktif dalam mengetahui karakteristik dan mengikuti program pencegahan resiko bencana yang dilakukan pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan, kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu dalam melakukan penanggulangan bencana banjir di daerah Kampar, Riau, terdapat 3 pola komunikasi yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat yaitu, pola komunikasi rantai dan pola komunikasi roda pada saat pra bencana, pola komunikasi roda dan pola komunikasi Y pada saat tanggap darurat, dan pola komunikasi rantai pada saat pasca bencana. Pada ketiga pola komunikasi ini, alur yang terdapat dalam melakukan komunikasi yaitu alur yang terstruktur dan non terstruktur. Berdasarkan rumusan masalah, peneliti dapat menarik kesimpulan seperti berikut:

1. Program yang dijalankan BPBD dalam menanggulangi bencana yaitu Desa Tangguh Bencana. Pemilihan desa untuk menjalankan DESTANA berdasarkan dari tingkat keparahan dan antusias warga desa dalam melakukan program. Dari seluruh desa yang menjadi kawasan rawan bencana di daerah Kampar, BPBD baru menjalankan DESTANA di dua desa yaitu, Desa Mentulik pada tahun 2016 dan Desa Buluh Cina pada tahun 2017.
2. Sumber informasi kebencanaan berasal dari PLTA Koto Panjang berdasar dari analisis prakiraan cuaca yang diberikan oleh BMKG Pekanbaru, dan kemudian dilakukan monitoring oleh PUSDALOPS dan BPBD dengan melihat kenaikan air di sepanjang aliran sungai.

Isi pesan dalam melakukan penanggulangan bencana berbeda-beda. Pada saat pra bencana isi pesan yaitu, prakiraan cuaca perdasarian yang diberikan oleh BMKG Pekanbaru melalui buletin (softcopy dan hardcopy). Pada saat tanggap darurat, isi pesan terkait pembukaan pintu pelimpah, pengurangan dan

penambahan bukaan pintu, serta penutupan pintu pelimpah. Saat pasca bencana, isi pesan berupa laporan pendataan kerugian yang terdapat di desa maupun masyarakat.

Media yang digunakan dalam menginformasikan bencana memiliki sedikit perbedaan saat prabencana, dan saat tanggap darurat. Saat pra bencana, media yang digunakan untuk menginformasikan cuaca menggunakan buletin, media sosial (twitter dan whatsapp). Media yang digunakan saat program Desa Tangguh Bencana kepada warga yaitu, sosialisasi, pelatihan, dan simulasi. Saat tanggap darurat bencana, media yang digunakan yaitu, surat resmi, media sosial (grup Whatsapp), telfon, *handy talky*, toa, radio daerah. Media utama yang digunakan dalam melakukan komunikasi kebencanaan yaitu, grup Whatsapp.

Pengirim dan penerima pesan dalam penanggulangan bencana juga berbeda-beda setiap pola komunikasi. Pada saat prabencana, dimulai dari BMKG Pekanbaru, yang kemudian diteruskan kepada Bupati, PLTA Koto Panjang, serta dinas pemerintahan terkait bencana lainnya hingga ke aparat desa dan relawan. Saat tanggap darurat, informasi awal kebencanaan dimulai dari analisis prakiraan cuaca BMKG Pekanbaru, kepada PLTA Koto Panjang, diteruskan kepada Bupati, BPBD dan dinas terkait bencana lainnya, ke aparat desa, relawan desa, hingga masyarakat. Saat pasca bencana, informasi berasal dari warga desa, diteruskan kepada pemerintah.

3. Pola komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pada saat pra bencana peneliti membagi pola komunikasi menjadi 2 kategori, yaitu pola komunikasi rantai dan pola komunikasi roda.

Pola komunikasi rantai, merupakan pola yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait status cuaca, dimana dalam pola komunikasi ini BMKG Pekanbaru merupakan sumber informasi terkait prakiraan cuaca dalam 1 hari, persepuluh hari hingga prakiraan cuaca dalam satu bulan kedepan, kemudian informasi tersebut disebarkan kepada pihak

pemerintah terkait bencana, yaitu Bupati Kampar, PLTA Koto Panjang, BPBD Kampar, dan dinas-dinas lainnya. Kemudian informasi tersebut di turunkan Bupati ke Kecamatan, Kecamatan ke Desa. Alur komunikasi yang terdapat dalam pola komunikasi tersebut yaitu alur komunikasi secara struktural, dimana terdapat alur birokrasi dalam melakukan komunikasi yaitu dari tingkat hirarki yang lebih tinggi hingga ke yang rendah. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan pola komunikasi rantai, BPBD berada di posisi tengah dimana BPBD dapat melakukan komunikasi dengan BMKG Pekanbaru dan dapat melakukan komunikasi kepada aparat desa, relawan hingga masyarakat. Untuk Pola komunikasi roda yaitu, komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Komunikasi dapat dilakukan secara struktural dan non-struktural. Hal tersebut dikarenakan, media yang digunakan dalam melakukan komunikasi tidak hanya terpaut pada satu media yaitu buletin, namun bisa menggunakan berbagai media, sehingga timbul adanya komunikasi timbal balik yang terdapat antara pemerintah dan masyarakat. Yang menjadi pusat dalam melakukan pola komunikasi roda yaitu BPBD Kampar.

4. Pola komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pada saat tanggap darurat bencana yaitu campuran antara pola komunikasi roda dan pola komunikasi Y.

Untuk pola komunikasi roda saat tanggap darurat, jika dikaitkan dengan pola komunikasi yang dilakukan dalam melakukan penyebaran informasi kepada seluruh pihak terkait bencana, PLTA Koto Panjang merupakan pusat informasi. Untuk melakukan tanggap darurat secara cepat dan tepat, pemerintah tidak hanya menggunakan surat resmi sebagai media, tetapi pemerintah juga menggunakan media lain untuk mempercepat jalannya komando.

Dalam melakukan tanggap darurat bencana, terdapat alur struktural dan non-struktural dalam melakukan komunikasi. Jika dikaitkan dengan pola

komunikasi Y, dalam melakukan penanggulangan saat tanggap darurat bencana, Dandim bertindak sebagai titik pusat komando, dan dibawahnya terdapat BPBD sebagai pemimpin kedua, beserta dinas-dinas terkait bencana lainnya yang terdapat dibawah. Hal itu memperlihatkan bahwa adanya alur komunikasi yang struktural, dimana pemimpin ketiga dan kedua dari bawah, dalam hal ini Dandim dan BPBD, dapat melakukan komunikasi baik dengan atasan maupun anggota yang berada dibawahnya.

Saat pasca bencana, terdapat pola komunikasi rantai. Pada saat pasca bencana alur informasi bersifat struktural dan non-struktural, karena saat pascabencana terdapat proses pendataan kerugian yang terdapat dimasyarakat. Pendataan kerugian tersebut dapat langsung dilakukan dengan melewati tingkat hirarki dari bawah ke atas, namun juga dapat dicatat langsung oleh BPBD dan Dinas Sosial ketika turun langsung saat bertanya ke warga. Yang menjadi pusat saat pasca bencana yaitu desa.

5. Analisis SWOT dan usulan. Untuk Analisis SWOT secara umum yaitu Kekuatan yang peneliti temukan dalam penelitian ini secara keseluruhan yaitu komunikasi yang dilakukan antara pemerintah, relawan, dan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana sudah sangat baik, dimana terdapat komunikasi dan komunikator yang jelas. Penggunaan media sosial grup whatsapp dan telpon saat dalam penyeberaan informasi dan melakukan koordinasi pada masa tanggap darurat merupakan pilihan media yang cukup tepat dimana dalam melakukan komunikasi kebencanaan tidak hanya dapat dilakukan secara formal dimana harus melewati tingkatan birokrasi yang sangat panjang. Komunikasi terkait kebencanaan tidak hanya dilakukan melalui media sosial namun juga komunikasi tatap muka langsung yang dilakukan pemerintah dan masyarakat kawasan rawan bencana. Selanjutnya, dalam melakukan masa tanggap darurat sudah terdapat pemimpin yang jelas, sehingga alur informasi dan komunikasi juga terlihat jelas. Tanggap darurat yang dilakukan pemerintah sudah dilakukan dengan sigap, selain itu

masyarakat juga sudah mengerti apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, sehingga membuat tahap penanggulangan bencana dapat berjalan dengan efektif sehingga dapat mengurangi terdapatnya korban jiwa.

Kelemahan yang terdapat dalam melakukan komunikasi bencana yaitu pada masa pra bencana belum dilakukannya simulasi uji coba pada saat gladi bersama relawan yang berasal dari masyarakat. Selanjutnya, masih belum adanya simbol-simbol bencana di kawasan rawan bencana, dan kelemahan yang terakhir yaitu tahap rehabilitasi dan rekonstruksi masih kurang optimal sehingga menimbulkan keluhan dari masyarakat terdampak.

Adapun peluang yang terdapat pada penelitian ini yaitu peneliti melihat jika program sosialisasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan rutin desa, maka akan banyak masyarakat yang terlibat dan mengetahui bahwa adanya program pencegahan resiko bencana yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya, komunikasi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dinilai sudah sangat baik sehingga dapat mengurangi keluhan dari masyarakat.

Ancaman yang terdapat berdasarkan komunikasi bencana yang dilakukan yaitu masyarakat akan menganggap bahwa program terkait pencegahan resiko bencana yang dilakukan pemerintah bukan merupakan suatu hal yang penting lagi untuk diikuti jika waktu pelaksanaan dilakukan pada saat jam kerja warga desa. Selanjutnya ancaman yang terdapat dalam komunikasi bencana yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat yang menganggap bahwa BPBD bukan merupakan satu-satunya dinas yang menanggulangi bencana, sehingga penanggulangan bencana tidak hanya merupakan tanggungjawab BPBD tetapi juga dinas-dinas terkait kebencanaan lainnya.

Adapun usulan dari peneliti yaitu usulan yang dapat peneliti diberikan yaitu pertama, pemerintah menjaga komunikasi yang sudah berjalan antara pemerintah dan masyarakat baik melalui media sosial maupun komunikasi langsung, agar setiap pihak dapat bekerjasama dengan efektif. Kedua,

melakukan sosialisasi di kegiatan rutin warga sehingga tidak mengganggu waktu kerja masyarakat, selain itu dinas terkait dapat menghemat biaya sehingga dapat dialokasikan ke program bencana yang lain, selain itu pemerintah juga dapat menggunakan media lain dalam melakukan sosialisasi pencegahan resiko bencana seperti pemutaran film yang berkaitan dengan bencana

Ketiga, simulasi untuk menanggulangi bencana saat tanggap darurat, agar dapat diikuti oleh setiap dinas-dinas terkait yang termasuk dalam rencana kontijesi yang sudah ditandatangani oleh Bupati. Keempat, pemasangan simbol-simbol bencana merupakan suatu hal yang penting untuk melakukan evakuasi. Kelima, penempatan sumber daya alam dalam melakukan kebencanaan sebaiknya dilakukan dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu masyarakat harus lebih aktif dalam mengetahui karakteristik dan mengikuti program pencegahan resiko bencana yang dilakukan pemerintah.

6. Faktor pendukung saat melakukan tanggap darurat bencana yaitu banyaknya stakeholder, misal TNI, Polri, relawan di bawah Dinas Lingkungan Hidup, relawan di bawah Dinas Sosial yaitu Tagana). Sedangkan faktor penghambat saat melakukan tanggap darurat bencana terbagi menjadi dua yaitu, kendala internal dan kendala eksternal. Terdapat dua kendala internal dalam melakukan penanggulangan bencana, pertama kendala dari peralatan, dalam hal ini kendaraan operasional. Kendaraan operasional hanya terdapat 2, dimana terkadang dalam satu tempat dibutuhkan lebih dari 2 kendaraan operasional, sehingga tidak jarang mengharuskan anggota BPBD menggunakan kendaraan pribadi, selain itu kendala dari luas wilayah dan daerah yang sulit dijangkau. Kendala internal kedua yang dirasa cukup vital yaitu, kurangnya sumber daya manusia yang memang berkompetensi dibidang kebencanaan, penempatan sumber daya manusia yang kurang tepat. Selain kendala internal, terdapat pula kendala eksternal yaitu, kurang berjalannya rencana kontigensi yang telah

disepakati bersama melalui Pemerintah Daerah dengan instansi terkait yang terhubung dengan kebencanaan, hal ini disebabkan berbagai pihak melangkah sendiri-sendiri, sering tanpa koordinasi. Selain itu, terdapat pula kendala pada anggaran dana, kendala dikoordinasi dengan instansi terkait mengenai koordinasi lapangan, dan kendala mengenai kurangnya kesadaran masyarakat.

B. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan yang peneliti rasakan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Masih Banyak Stakeholders yang belum diwawancarai seperti, TNI, Polri, dan dinas-dinas terkait kebencanaan lainnya.
2. Potensi bencana di daerah Kabupaten Kampar tidak hanya banjir, namun juga terdapat bencana lainnya seperti kabut asap dan longsor.

C. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti lakukan kepada beberapa pihak yang terkait dalam penanggulangan bencana banjir Kampar, yaitu:

1. Saran kepada BPBD Kabupaten Kampar, yaitu agar dapat melakukan program sister village dalam melakukan mitigasi bencana. Sehingga ketika terjadi bencana, warga desa tidak hanya mengungsi di tempat evakuasi akhir namun juga dapat mengungsi di rumah warga.
2. Program mitigasi bencana dapat merata di seluruh desa yang menjadi kawasan rawan bencana
3. Warga yang berada di kawasan rawan bencana dapat memiliki tingkat kesadaran lebih tinggi dalam menanggulangi bencana di daerahnya, agar dapat bekerjasama dengan baik bersama pemerintah.

Daftar Pustaka

Buku

- Arie, Priambodo S. (2009). *Panduan Praktis Menghadapi Bencana*. Yogyakarta: Kanisius
- Calvin, Hall, Lindzey Gardner. (1993). *Psikologi Kepribadian 2, Teori-Teori Holistik(Organismik-Fenomenologis)*. Yogyakarta: Kanisius
- Devito, Joseph A. (1997). *Komunikasi Antar Manusia*. Jakarta: Professional Book
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press
- J.R, Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Kuswarno, Engkus. (2009). *Fenomenologi*. Bandung: Widya Padjadjaran
- Nurjanah, et.al. (2012). *Manajemen Bencana*. Bandung: ALFABETA, cv
- Patilima, Hamid. (2005) . *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Purnomo, Hadi, Ronny Sugiantoro. (2010). *Manajemen Bencana: Respons Dan Tindakan Terhadap Bencana*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Pb, PUSDALOPS “Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun 2013”
- Pb, PUSDALOPS “Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar”
- Soehatman, Ramli. (2010). *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*. Jakarta: PT DIAN RAKYAT
- Sugiarto, Eko. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Suprpto, Tommy. (2009). *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: Media Pressindo

Susanto, Eko Harry. (2011). *Komunikasi Bencana*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo

Tubbs, Stewart L dan Sylvia Moss. (1996). *Human Communication ; Prinsip-prinsip Dasar, buku 1*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Undang-Undang

Peraturan Bupati Kampar Nomor 56 Tahun 2012 tanggal 2 Oktober 2012
Tentang Uraian tugas Jabatan Struktural Dilingkungan Dinas/Badan dan Kantor di Kabupaten Kampar

Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2012 – 2016

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana

Internet

Analisa Daily “Data Kejadian banjir tahun 2016”
<http://news.analisadaily.com/read/kejadian-banjir-meningkat-52-persen-di-2016/292422/2016/12/29> (akses 3 April 2018)

BPBD Provinsi Riau “Data Statistik Bencana” <http://bpbdriau.go.id/public/>
(akses 25 maret 2017)

BNPB “Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana”
<https://bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/40.pdf> (akses 10 April 2017)

Tribun Pekanbaru “Banjir Riau” <http://pekanbaru.tribunnews.com/topic/banjir-riau>
(akses 11 Maret 2017)

Pecinta Ilmu “Kronologi Sejarah Danau PLTA Koto Panjang, Kampar Riau”
<http://www.putramelayu.web.id/2013/05/kronologi-sejarah-danau-plta-koto.html> (akses 11 Maret 2017)

- BMKG Pekanbaru “Tugas dan Fungsi” <http://www.stametpekanbaru.com/> (akses 28 Maret 2017)
- Kampar, Kabupaten “Data Sementara Banjir di Kampar” <http://kamparkab.go.id/home/berita/bangkinang-kota/ini-data-sementara-peristiwa-banjir-di-kampar.html> (akses 26 Maret 2018)
- Musyadad, *et.al* “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak” <http://repository.fisip-untirta.ac.id/560/> (akses 3 April 2017)
- Nisa’ “Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Jombang” <http://repository.unair.ac.id/16217/> (akses 3 April 2017)
- Surtini “Kontribusi badan penanggulangan bencana daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pencegahan bencana banjir kecamatan kunto darussalam kabupaten rokan hulu” <http://repository.uin-suska.ac.id/3482/> (akses 4 April 2017)
- Putra dan Sri Hastjarjo “Aktivitas Komunikasi Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar (Deskriptif Kualitatif Mengenai aktivitas Komunikasi di BPBD Kab. Karanganyar dalam Pengenalan Mitigasi Bencana Kepada Masyarakat Kab. Karanganyar)” <https://eprints.uns.ac.id/26738/> (akses 5 April 2017)
- Peta Kota “Peta Kota Kabupaten Kampar” <http://peta-kota.blogspot.co.id/2017/01/peta-kabupaten-kampar.html> (akses 1 April 2018)
- Syarif, *et.al* “Pentingnya Komunikasi dan Informasi Pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulan Bencana di Kota Makassar” <http://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/viewFile/583/406> (akses 30 April 2017)